



PEMERINTAH
KABUPATEN
SIDOARJO

Laporan
**STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL**
(SPM)
TAHUN
2025

DI SUSUN OLEH :

BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

 www.sidoarjakab.go.id



BUPATI SIDOARJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Melalui penerapan SPM, Pemerintah Daerah berkewajiban memastikan terpenuhinya pelayanan dasar bagi setiap warga Negara secara minimal pada enam bidang layanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan kebijakan, capaian kinerja serta upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mencapai target pelayanan dasar sesuai dengan indikator SPM pada tahun 2025, yang berlaku sebagai landasan dalam penyelenggaraan SPM. sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sidoarjo, 17 Maret 2026

Bupati Sidoarjo,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Subandi

Bupati Sidoarjo

Subandi

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211
Telepon (031) 8921946, 8941145, Faksimile (031) 8946924,
Laman www.sidoarjokab.go.id, Pos-el bupati@sidoarjokab.go.id

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kebijakan Umum	5
C.1 Visi Kabupaten Sidoarjo	8
C.2 Misi Kabupaten Sidoarjo	9
D. Arah Kebijakan	12
BAB II PENERAPAN SPM TAHUN 2025	15
A Pengumpulan Data	15
B Penghitungan Kebutuhan dan Pemenuhan Pelayanan Dasar..	99
C Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	140
D Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	171
BAB III PENCAPAIAN SPM TAHUN 2025	224
A Bidang Urusan Pendidikan	224
B Bidang Urusan Kesehatan	234
C Bidang Urusan Pekerjaan Umum	244
D Bidang Urusan Perumahan Rakyat	250
E Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	256
F Bidang Urusan Sosial	267
BAB IV PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	275
A Program Kegiatan SPM Bidang Pendidikan	276
B Program Kegiatan SPM Bidang Kesehatan.....	279
C Program Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum	280
D Program Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat	281
E Program Kegiatan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	282
F Program Kegiatan SPM Bidang Sosial	285
BAB V PENUTUP	286

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peransertamasyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensidan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakanurusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkanstandar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai bataswaktu pencapaian.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu

Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan

penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan kunci dari Startegi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/ terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arah ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan

profesionalisme aparat sipil negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah kabupaten dengan seluruh PD, dan pemerintahan desa.

- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masayarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

C.1. Visi Kabupaten Sidoarjo

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo adalah

”Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Madani”. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 ini adalah **“MENATA DESA MEMBANGUN KOTA MENUJU SIDOARJO MENJADI METROPOLITAN INKLUSIF, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

VISI	POKOK VISI	PENJELASAN
Menata Desa Membangun Kota Menuju Sidoarjo menjadi Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan	Menata Desa Membangun Kota	Menata Desa Membangun Kota merupakan prinsip pembangunan yang menekankan pada keseimbangan antara pembangunan di wilayah pedesaan dan perkotaan mempunyai makna pembangunan fokus dimulai dari penataan desa dengan pendekatan <i>people centered development</i> , membangun kelompok-kelompok masyarakat, pembangunan langsung masuk ke desa. Pemerintah desa diberikan keleluasaan menentukan arah pembangunan desanya sesuai dengan SDGs Desa dan kearifan lokal yang ada, dilengkapi dengan pembangunan perkotaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan seperti kemacetan, polusi dan kesenjangan sosial.
	Metropolitan Inklusif	Metropolitan Inklusif memiliki makna Sidoarjo menjadi pusat ekonomi yang signifikan bagi daerah sekitarnya, memberikan jaminan kesetaraan, keadilan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh golongan masyarakat. Sidoarjo memfasilitasi dan mendukung kehidupan seluruh warganya dengan menciptakan ruang-ruang ramah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup.

	Berdayasaing	<p>Berdayasaing memiliki makna dinamis yang secara substansi adalah memiliki kelebihan dibandingkan daerah lain. Keunggulan dayasaing sebagaimana dimaksud masih dalam koridor sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.</p> <p>Dalam arti lain, keunggulan tersebut mencerminkan tingkat pengelolaan sumberdaya secara optimal.</p>
	Sejahtera	<p>Sejahtera artinya suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila merasa bahagia, merasa tercukupi terhadap apa yang mungkin sudah dicapai dalam hidupnya. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya yang menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.</p>
	Berkelanjutan	<p>Berkelanjutan memiliki makna prinsip pembangunan Sidoarjo harus mempertimbangkan resiko dan kelestarian kehidupan untuk generasi yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)).</p>

C.2. Misi Kabupaten Sidoarjo

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 dijabarkan ke dalam misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Selanjutnya, penjabaran lebih detil terhadap masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Berintegritas, Berahklak dan Mewujudkan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Merata bagi Masyarakat Sidoarjo; Pembangunan

dengan pendekatan *people centered development*, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat berdayasaing. SDM yang berintegritas adalah SDM yang memiliki integritas dan kompetensi dalam bekerja, sedangkan SDM yang berakhlak adalah SDM yang memiliki pranata sosial yang santun, toleran, terbuka, ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Sedangkan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Misi 2 : Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Merata bagi Pelaku Ekonomi ; Pembangunan ekonomi Inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Misi ini merupakan pendukung unsur visi metropolis inklusif, mengingat pesatnya perkembangan sektor Industri, Perdagangan dan Jasa di satu sisi merupakan penopang utama perekonomian daerah.

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Prima dengan Mengandalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ; Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, integratif, dinamis, transparan, inovatif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui reformasi administrasi publik dengan digitalisasi dan terpadu.

Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Merata dan Mendukung Pembangunan Sektor Potensial dan Sektor Strategis Berkelanjutan:

Percepatan pembangunan salah satunya didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo harus dapat mendukung Kebijakan Strategis Nasional dan Provinsi dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan pengembangan sektor strategis berupa pengembangan transportasi aglomerasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan. Sektor potensial Kabupaten Sidoarjo meliputi 2 sektor pendukung utama PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sedangkan sektor strategis meliputi usaha mikro, industri kecil, ekonomi kreatif dan sektor jasa lainnya. Pembangunan sektor potensial berkelanjutan dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang.

Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Setara, Tentram

dan Nyaman; Mewujudkan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang religius, setara, tentram dan nyaman. Upaya membangun masyarakat yang religius dengan merevitalisasikan dan mengaktualisasikan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, dan membangun harmoni sosial dengan menciptakan keserasian di tengah perbedaan yang ada. Harmoni sosial mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang hidup melalui berbagai bentuk kearifan lokal yang multikultur, dalam rangka menciptakan suasana pembangunan yang kondusif ke depan.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah rumusan perencanaan secara menyeluruh terkait bagaimana tujuan dan sasaran bisa dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran secara operasional dari Visi dan Misi Bupati terpilih yang mana juga merupakan bagian dari janji politik yang wajib untuk diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Sebagai upaya mewujudkan visi **“MENATA DESA MEMBANGUN KOTA MENUJU SIDOARJO MENJADI METROPOLITAN INKLUSIF, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**, maka strategi umum yang ditempuh oleh Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari visi yang diemban, yaitu berfokus pada “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter”, “Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo”, “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”, “Menurunnya Ketimpangan Wilayah”, “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Digital”, “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Merata”. “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana” dan “Meningkatnya Masyarakat yang Inklusif, Aman, dan Religius serta Berkebudayaan”. Secara ringkas, penjelasan mengenai Strategi Umum Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter.

Arah kebijakan difokuskan pada percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem pendukung layanan kesehatan secara bertahap dan

berkelanjutan, serta peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan berbasis kebutuhan dan prioritas wilayah, guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, adaptif, dan berkarakter

2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

Arah kebijakan diarahkan pada percepatan penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penanganan kantong kemiskinan secara tepat sasaran berbasis data terpadu, serta penguatan implementasi sistem jaminan sosial melalui sinergi lintas sektoral untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan secara berkelanjutan..

3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Arah kebijakan dilaksanakan melalui penguatan kebijakan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemberdayaan UMKM dan sektor produktif, serta perluasan akses ekonomi secara spasial dan sektoral guna menciptakan pertumbuhan yang merata, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4. Menurunnya Ketimpangan Wilayah.

Arah kebijakan difokuskan pada percepatan pembentukan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru (*growth pole*) yang mendorong pemerataan pembangunan kewilayahan, penguatan konektivitas antar kawasan, serta peningkatan kemandirian perdesaan secara bertahap berbasis potensi lokal.

5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Digital.

Arah kebijakan diarahkan pada penguatan kapasitas ASN melalui penerapan sistem merit dan budaya birokrasi yang gesit (*agile*), serta peningkatan kualitas dan jangkauan

pelayanan publik berbasis digital yang transparan, akuntabel, merata, dan inklusif.

6. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Merata

Arah kebijakan dilaksanakan melalui pengembangan infrastruktur inklusif berbasis perencanaan spasial yang mendukung konektivitas wilayah dan percepatan pengembangan potensi lokal daerah, guna mendorong pemerataan pembangunan dan akses layanan dasar.

7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Resiliensi Bencana

Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta akselerasi pembangunan infrastruktur tangguh dan ramah lingkungan (*green infrastructure*) untuk meminimalkan risiko bencana dan dampak ekologis.

8. Meningkatnya Masyarakat yang Inklusif, Aman, dan Religius serta Berkebudayaan

Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta akselerasi pembangunan infrastruktur tangguh dan ramah lingkungan (*green infrastructure*) untuk meminimalkan risiko bencana dan dampak ekologis.

BAB 2 PENERAPAN SPM TAHUN 2023

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND).

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Kemudian data yang juga perlu dikumpulkan pada tahapan pertama ini adalah terkait dengan jumlah barang dan atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Pengumpulan dan pendataan harus sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun. Hasil pendataan yang dilakukan oleh OPD diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dalam tahapan Pengumpulan Data digunakan form-form sebagai berikut:

Tabel
Tahapan Pengumpulan Data

Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas		Sosial
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		<i>6</i>
Form 1.A.2	Form 2.A.2	Form 3.A.3	Form 4.A.4	(Penegakan Perda)		
Form 1.A.4	Form 2.A.3	Form 3.A.4	Form 4.A.5	Form 5.A.1	Form 5.A.5	Form 6.A.1
Form 1.A.7			Form 4.A.6	Form 5.A.2	Form 5.A.6	Form 6.A.2
Form 1.A.9			Form 4.A.10	Form 5.A.3	Form 5.A.7	Form 6.A.4

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/ SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B.		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5- 6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERTINGGI	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5-6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/K B/SPS/TPA)	Jumlah Peserta Didik Paud Formal dan Nonformal = 83.819	Jumlah Populasi anak usia 3-6 tahun = 109.016	-	-	-	-	-	-	33.528	16.764
2	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)			204.423	195.617	96.625	92.102	276.577	287.719	-	-

**b. FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRIST EK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0	1	0,44	0,41
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	400	400	0	SD = 199 SMP = 91	SD = 0,76 SMP = 0,69	SD = 0,44 SMP = 0,32

C. FORM 1.A.7. REKAPITULASI DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	SD/ sederajat = $91,21 - 91,95 = -0,74$ (turun) SMP/ sederajat = $93,71 - 90,15 = 3,56$ (naik)	SD/ sederajat = 91,95 SMP/ sederajat = 90,15	SD/ sederajat = $89,87 - 87,01 = 2,86$ (naik) SMP/ sederajat = $90,43 - 86,62 = 3,81$ (naik)	SD/ sederajat = 87,01 SMP/ sederajat = 86,62

d. FORM 1.A.9. REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAT ;
LITERASI DAN NUMERASI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Perbedaan skor literasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan SD/MI/Kesetaraan = 3,97 SMP/MTs/Kesetaraan = 5,21		Perbedaan skor literasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan tinggi SD/MI/Kesetaraan = 0,13 SMP/MTs/Kesetaraan = 0,26		Perbedaan skor numerasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan SD/MI/Kesetaraan =1,13 SMP/MTs/Kesetaraan = 0,7		Perbedaan skor numerasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan tinggi SD/MI/Kesetaraan = 0,01 SMP/MTs/Kesetaraan = 0,2	

e. FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1130	1289	Pendidik S1/DIV = 4691 Jumlah Pendidik PAUD = 5143 persentase = 91,21	Pendidik berijazah S1/DIV = 4414 Jumlah Pendidik PAUD = 5027 Persentase = 87,81	Pengawas TK = 6 Penilik PAUD = 6 Total = 12	1620

FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	SD/MI = 79,43 SMP/MTs = 74,78	SD/MI = 76,79 SMP/MTs = 73,10	Indeks iklim kebinekaan SD/MI = 75,98 SMP/MTs = 74,40 Indeks inklusivitas SD/MI = 64,07 SMP/MTs = 63,46	Indeks iklim kebinekaan SD/MI = 76,34 SMP/MTs = 76,04 Indeks inklusivitas SD/MI = 60,02 SMP/MTs = 60,60

2. Bidang Kesehatan**a. FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TARIK	TARIK	539	539	508	2.051	4.944	25.555	4.717	2.907	1.241	73	492	633
		TARIK 2	367	367	347	1.397	3.366	17.408	3.209	1.979	845	49	335	431
	PRAMBON	PRAMBON	1.273	1.273	1.200	4.845	11.669	60.331	11.138	6.861	2.930	172	1163	1.494
	KREMBUNG	KREMBUNG	1.014	1.014	956	3.857	9.290	48.034	8.869	5.462	2.333	137	926	1.190
	PORONG	PORONG	351	351	330	1.331	3.207	16.587	3.064	1.887	805	47	320	411
		KEDUNGSOLO	595	595	561	2.264	5.448	28.178	5.201	3.205	1.369	80	543	699
	JABON	JABON	783	783	738	2.978	7.171	37.080	6.848	4.217	1.801	105	715	919
	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1.034	1.034	975	3.932	9.474	48.988	9.042	5.571	2.379	139	944	1.214
	CANDI	CANDI	1.560	1.560	1.470	5.937	14.297	73.931	13.644	8.408	3.590	210	1424	1.831
		SIDODADI	723	723	681	2.749	6.621	34.245	6.325	3.895	1.664	97	660	848

	TULANGAN	TULANGAN	914	914	862	3.478	8.376	43.301	7.996	4.924	2.103	123	834	1.073
		KEPADANGAN	509	509	480	1.938	4.665	24.128	4.454	2.744	1.172	69	465	597
	WONOAYU	WONOAYU	802	802	756	3.053	7.347	37.985	7.011	4.319	1.845	108	732	941
		WONOKASIAN	429	429	405	1.633	3.930	20.327	3.752	2.311	987	58	392	504
	SUKODONO	SUKODONO	1.814	1.814	1.711	6.902	16.621	85.958	15.868	9.775	4.175	244	1656	2.129
	SIDOARJO	SIDOARJO	1.472	1.472	1.388	5.598	13.484	69.718	12.871	7.929	3.386	198	1343	1.728
		URANGAGUNG	511	511	481	1.945	4.683	24.216	4.470	2.753	1.176	69	467	599
		SEKARDANGAN	599	599	564	2.280	5.483	28.356	5.230	3.224	1.377	81	546	702
		URANGAGUNG 2	476	476	446	1.805	4.353	22.552	4.172	2.566	1.096	64	434	558
	BUDURAN	BUDURAN	1.460	1.460	1.377	5.558	13.381	69.187	12.774	7.868	3.360	197	1333	1.714
	SEDATI	SEDATI	1.513	1.513	1.427	5.754	13.856	71.656	13.228	8.149	3.480	204	1381	1.775
	WARU	WARU	1.728	1.728	1.629	6.573	15.829	81.856	15.108	9.308	3.976	233	1577	2.028
		MEDAENG	1.077	1.077	1.015	4.097	9.861	51.006	9.417	5.801	2.477	145	984	1.264
		TAMBAKREJO	631	631	595	2.398	5.780	29.883	5.515	3.398	1.452	85	576	741
	GEDANGAN	GEDANGAN	1.138	1.138	1.074	4.330	10.426	53.920	9.956	6.132	2.619	153	1039	1.335
		GANTING	926	926	874	3.523	8.484	43.872	8.098	4.989	2.131	125	845	1.088
	TAMAN	TAMAN	2.203	2.203	2.077	8.383	20.184	104.376	19.266	11.870	5.070	297	2011	2.586
		TROSOBO	1.321	1.321	1.245	5.025	12.095	62.555	11.547	7.114	3.038	178	1205	1.550
	KRIAN	KRIAN	1.380	1.380	1.301	5.253	12.648	65.405	12.078	7.438	3.177	186	1260	1.620
		BARENGKRAJAN	658	658	621	2.504	6.033	31.201	5.758	3.548	1.516	89	601	772
	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1.147	1.147	1.082	4.365	10.505	54.326	10.031	6.178	2.639	154	1047	1.346

POPCI														5.622
Total		30947	30947	29176	117736	282.660	1.391.348	266.597	156.726	69.784	4169	28250		34.098

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. FORM 3.A.3. KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Unit Air Baku		Unit Produksi		Unit Distribusi		Unit Pelayanan (PDAM / UPTD / Badan Usaha / KP SPAM)	Kondisi		
			Jenis Sumber Air	Nama Sumber Air	Kapasitas Unit Produksi (L/d)	Idle Capacity (L/d)	Jenis Pipa	Diameter Pipa (mm)		Beroperasi (Ya/Tidak)	Kuantitas	Kualitas
1	2	3	4	5	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Porong	Plumbon	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
2		Kedungboto	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
3		Kebonagung	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
20	Jabon	Kedungpandan	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
21		Kupang	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
22		Balongtani	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi

23		Kedungrejo	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
24		Tropoasri	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
25		Permisan	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
35	Tanggulangin	Putat	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
36		Penatarsewu	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
37		Sentul	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
38		Banjarasri	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
39		Banjarpanji	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
40		Kedungbanteng	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
41		Ganggangpanjang	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
42		Ngaban	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
54	Balongbendo	Suwaloh	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
55		Balongbendo	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
56		Jabaran	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
57		Singkalan	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi

58		Bakalanwringinpitu	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
59		Seduri	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
60		Seketi	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
74	Candi	Kedungpeluk									Terpenuhi	Terpenuhi
75		Kalipecabean									Terpenuhi	Terpenuhi
76		Balongdowo	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
77		Kendalpecabean	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
97		Sidodadi										Terpenuhi
98	Tulangan	Kemantren	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
99		Pangkemiri	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
100		Telasih	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
101		Modong	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
120	Krembung	Jenggot	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
121		Kandangan	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
122		Lemujut	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
123		Tambakrejo	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi

124		Keret	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
125		Wangkal	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
126		Gading	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
127		Kedungsumur	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
128		Tanjekwagir	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
129		Mojaruntut	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
130		Ploso	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
131		Balonggarut	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
132		Rejeni	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
133		Krembung									Terpenuhi	Terpenuhi
134		Keper	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
139	Buduran	Sawohan	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
140		Dukuhtengah	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
154	Tarik	Kramattemenggungan									Terpenuhi	Terpenuhi
155		Sebani							KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
156		Gempolklutuk	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi

157		Segodobancang	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
158		Kemuning	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
159		Mliriprowo	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
160		Klanticsari									Terpenuhi	Terpenuhi
161		Janti	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
174	Krian	Terungwetan	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
175		Keboharan	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
176		Sedenganmijen	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
177		Sidomojo	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
178		Sidomulyo	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
179		Terik	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
180		Tempel	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi
181		watugolong	Air Tanah	Sumur Bor	2	2	PVC S12,5	3	KPSPAMS	YA	Terpenuhi	Terpenuhi

b. FORM 3.A.4. KONDISI SPALD KABUPATEN SIDOARJO

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	Beroperasi	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
					KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
							(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	IPAL GISIKAN	Kel. Krian	Baik	Tidak	Krian	Krian		150		56
2	IPAL TAMBAKSUMUR	Desa Tambaksumur	Baik	Ya	Waru	Tambaksumur		100		55
3	IPAL KEMANGSEN	Desa Kemangsen	Baik	Ya	Balongsendo	Kemangsen		100		45
4	IPAL TAMBAKKEMERAKAN	Kel. Tambakkemerakan	Baik	Ya	Krian	Tambakkemerakan		150		11
								500		167

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

a. FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Puting Beliung	Rendah	TULANGAN	-	-	-	-	4.282	-	-	4.282	-	4.282	-
			PRAMBON	-	-	-	-	3.034	-	-	3.034	-	3.034	-
			KREMBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			PORONG	-	-	-	-	977	-	-	977	-	977	-
			JABON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TANGGULANGIN	-	-	-	-	6.689	-	-	6.689	-	6.689	-
			CANDI	-	-	-	-	25.104	-	-	25.104	-	25.104	-
			WONOAYU	-	-	-	-	1.364	-	-	1.364	-	1.364	-
			SUKODONO	-	-	-	-	1.052	-	-	1.052	-	1.052	-
			SIDOARJO	-	-	-	-	20.430	-	-	20.430	-	20.430	-
			BUDURAN	-	-	-	-	15.718	-	-	15.718	-	15.718	-
			SEDATI	-	-	-	-	4.589	-	-	4.589	-	4.589	-

			WARU	-	-	-	-	3.491	-	-	3.491	-	3.491	-
			GEDANGAN	-	-	-	-	7.546	-	-	7.546	-	7.546	-
			TAMAN	-	-	-	-	6.299	-	-	6.299	-	6.299	-
			KRIAN	-	-	-	-	8.676	-	-	8.676	-	8.676	-
			BALONGBENDO	-	-	-	-	41	-	-	41	-	41	-
			TARIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total *)				109.292	-	-	109.292	-	109.292	-

b. FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI
RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	TARIK	Nihil	Nihil	Nihil	Tidak terdapat lahan yang potensial sebagai tempat relokasi, dan juga tidak terdapat kawasan yang berpotensi untuk di relokasi.. Karena kawasan disidoarjo rata-rata sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Adapun ada program RTLH, hanya bentuk rehabilitasi, tidak sampai di relokasi
	PRAMBON	Nihil	Nihil	Nihil	
	KREMBUNG	Nihil	Nihil	Nihil	
	PORONG	Nihil	Nihil	Nihil	
	JABON	Nihil	Nihil	Nihil	
	TANGGULANGIN	Nihil	Nihil	Nihil	
	CANDI	Nihil	Nihil	Nihil	
	TULANGAN	Nihil	Nihil	Nihil	
	WONOAYU	Nihil	Nihil	Nihil	
	SUKODONO	Nihil	Nihil	Nihil	
	SIDOARJO	Nihil	Nihil	Nihil	
	BUDURAN	Nihil	Nihil	Nihil	
	SEDATI	Nihil	Nihil	Nihil	
	WARU	Nihil	Nihil	Nihil	
	GEDANGAN	Nihil	Nihil	Nihil	
	TAMAN	Nihil	Nihil	Nihil	
	KRIAN	Nihil	Nihil	Nihil	
	BALONGBENDO	Nihil	Nihil	Nihil	

c. FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Putting Beliung	2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Total					0					

**d. FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Sempadan Rel KA	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Daerah Sempadan Sungai	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Kolong Jembatan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Permukiman Kumuh/Ilegal	Kecamatan Waru	Waru	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

e. FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN SIDOARJO

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KECUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Waru	Waru	1,48	4	4	sedang	
		Kureksari		2	2	sedang	
		Tambak Sumur		2	2	sedang	
		Medaeng		3	3	sedang	
		Wadungasri		1	1	sedang	
		Berbek		1	1	sedang	
		Wedoro		1	1	sedang	
		Ngingas		1	1	sedang	
		Bungurasih		1	1	sedang	
		Pepelegi		1	1	sedang	
2	Krian	Kemasan	0	11	11	sedang	
		Gamping		1	1	sedang	
		Keboharan		4	4	sedang	
3	Gedangan	Semambung	3,56	3	3	sedang	
		Karangbong		3	3	sedang	
		Tebel		2	2	sedang	
		Gemurung		2	2	sedang	
		Ketajen		1	1	sedang	
		Gedangan		1	1	sedang	

		bangah		1	1	sedang	
		sruni		2	2	sedang	
		wedi		1	1	sedang	
		punggul		2	2	sedang	
		keboansikep		1	1	sedang	
		ganting		1	1	sedang	
		keboananom		1	1	sedang	
		Karangan		1	1	sedang	
4	Taman	Tantungsari	3,8	2	2	sedang	
		Trosobo		1	1	sedang	
5	Tanggulangin	Kedungbanteng	0	2	2	sedang	
		Gempolsari		2	2	sedang	
		Ketegan		1	1	sedang	
		Kedensari		1	1	sedang	
6	Tulangan	Grabagan	0	2	2	sedang	
		Kedondong		2	2	sedang	
		Singopadu		1	1	sedang	
7	Balombangendo	Wonokupang	2,95	2	2	sedang	
		bakungtemanggungan		2	2	sedang	
		wonokarang		1	1	sedang	
8	Tarik	Mindugading	2	2	2	sedang	
		Klantingsari		2	2	sedang	
		Sebani		1	1	sedang	
9	Prambon	Cangkringturi	0	1	1	sedang	
		Watutulis selatan		1	1	sedang	

		Watutulis		1	1	sedang	
		Wonoplintahan		1	1	sedang	
		Gedangrowo		1	1	sedang	
10	Wonoayu	Sawocangkring	0	1	1	sedang	
11	Sukodono	Pekarungan	1,06	1	1	sedang	
12	Porong	candipari	0	4	4	sedang	
		Lajuk		2	2	sedang	
		Pesawahan		1	1	sedang	
13	Jabon	Permisan	0	1	1	sedang	
14	Sidoarjo	Bluru Kidul	8,27	4	4	sedang	
		Celep		1	1	sedang	
15	Buduran	Damarsih	0	3	3	sedang	
		Dukuh Tengah		1	1	sedang	
		Pagerwojo		1	1	sedang	
16	Sedati	Kwangsan	3,53	1	1	sedang	
17	Krembung	Kedungrawan	0	1	1	sedang	
18	Candi	Durungbedug	0	4	4	sedang	
		Gelam		5	5	sedang	
		Klurak		1	1	sedang	

g. FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	NIHIL, tidak ada program pemerintah yang menyebabkan adanya warga yang du relokasi															

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Ketentraman dan Kertiban Umum

A.1. FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	ASMURINI	3515065012610001	3515062501093873	SURABAYA	10 12 1961	JL. A. YANI 66 NO 0
2	PRIASTUTIK	3515066302380001	3515062501093873	KEDIRI	23 02 1938	JL. A. YANI 66 NO 0
3	SILWANA MUMTHAZA	3515084102840007	3515080411110010	SIDOARJO	01 02 1984	JL A. YANI NO.11
4	BENNY LATTOMORA	3515081104750005	3515080411110010	SIDOARJO	11 04 1975	JL A. YANI NO.11
5	MAR'I FIRDAUS	3515082010780003	3515081210150006	SIDOARJO	20 10 1978	JL. A. YANI 11
6	MUJIANI	3515047101910001	3515081412150008	SIDOARJO	31 01 1991	JL. ACHMAD YANI / GG WISMA NO 10
7	ALIYAH FUAD, SE	3515096901800002	3515081503130003	MEKKAH	29 01 1980	JL. R. WIJAYA 2
8	MUHAMMAD ALAUDIN	3515091405750003	3515081503130003	SURABAYA	14 05 1975	JL. R. WIJAYA 2
9	NISMA NOVIANTI	3515084611680005	3515081510120008	JAKARTA	06 11 1968	JL. UNTUNG SUROPATI 15
10	NUR SALAM	3317010807910005	3515081801160024	KAB REMBANG	08 07 1991	JL. A. YANI GANG WISMA NO.4
11	RACHMA DIAN FATMAWATI	3515086208810002	3515081801160024	SIDOARJO	22 08 1981	JL. A. YANI GANG WISMA NO.4
12	DEVI VERDIANA SARI	3525045304930001	3515082012160024	MOJOKERTO	13 04 1993	DUSUN DAYU SIDOKUMPUL
13	ARIS DANI SAPUTRA	3507031402870002	3515082012160024	MALANG	14 02 1987	DUSUN DAYU SIDOKUMPUL
14	TOMEI ROMADIANTO	3515082605850007	3515082102110010	SIDOARJO	26 05 1985	JL. UNTUNG SUROPATI 21
15	ETIK GURUH PURWANINGSIH	3515084307800006	3515082102110010	SURABAYA	03 07 1980	JL. UNTUNG SUROPATI 21
16	ENDANG TITIK SUHERMIN	3515085506590009	3515082102110010	SIDOARJO	15 06 1959	JL. UNTUNG SUROPATI 21
17	HENDRO YULIANTO	3515081607730002	3515082603100017	SIDOARJO	16 07 1973	JLA YANI GG WISMA 6
18	LUSI ENDANG WAHYUNINGSIH	3515085109650002	3515082603100017	SIDOARJO	11 09 1965	JLA YANI GG WISMA 6
19	DESI AYU KURNIA DEWI	3515086402960002	3515082701090796	SIDOARJO	24 02 1996	JL A YANI 23B

20	SUSANTI AYU OCTAVIA	351508481090003	3515082701090796	JAKARTA	08 10 1990	JL A YANI 23B
----	---------------------	-----------------	------------------	---------	------------	---------------

Lanjutan

50026	UMI KALSUM	3515085707720007	3515082601097838	SIDOARJO	17 07 1972	LEMAHPUTRO III/81
50027	SAMANI	3515084101600108	3515082601097839	SIDOARJO	01 01 1960	LEMAHPUTRO III/60
50028	CHOIRUL HUDA	3515080210690002	3515082601097840	SURABAYA	02 10 1969	LEMAHPUTRO III/60
50029	HENI PURWANTI	3515085003760002	3515082601097840	SIDOARJO	10 03 1976	LEMAHPUTRO III/60
50030	BILQIS DIENUL ISLAM	3515086311020001	3515082601097840	SIDOARJO	23 11 2002	LEMAHPUTRO III/60
50031	AGUS SUPRIYADI	3515081708720005	3515082601097841	SIDOARJO	17 08 1972	LEMAHPUTRO III/60
50032	MAMAN TURYAMAN	3515081103730004	3515082601097842	TASIKMALAYA	11 03 1973	LEMAHPUTRO III
50033	ANDRI ROHMAN	3515083004870003	3515082601097842	SIDOARJO	30 04 1987	LEMAHPUTRO III
50034	DJUMA'INAH	3515084101670012	3515082601097842	SIDOARJO	01 01 1967	LEMAHPUTRO III
50035	SUGIANTO	3515080705770008	3515082601097844	JEMBER	07 05 1977	LEMAHPUTRO III
50036	MUHAMMAD KHASBI MUBAROK	3515081010030008	3515082601097844	SIDOARJO	10 10 2003	LEMAHPUTRO III
50037	MASIAH	3515084101790009	3515082601097844	BANGKALAN	01 01 1979	LEMAHPUTRO III
50038	CHUSNUL KHULUQ	3515084405980002	3515082601097844	SIDOARJO	04 05 1998	LEMAHPUTRO III
50039	HERI PURWANTO	3515080204740001	3515082601097845	SURABAYA	02 04 1974	LEMAHPUTRO III/68

A.2. FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4
1	Alun-alun Jl. Jenggolo, Kec. Sidoarjo		BAIK
2	Taman Tanjung Puri Jl. Lingkar Timur, Kec. Sidoarjo		BAIK
3	Taman Gelora, Jl. Gelora, Kec. Sidoarjo		BAIK
4	Taman Dermaga, Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Sidoarjo		BAIK
5	Taman Lansia Jl. Hasanuddin, Kec. Sidoarjo		BAIK
6	Taman Lansia, Jl. Pahlawan, Kec. Sidoarjo		BAIK
7	Taman Bumi Suko Indah		BAIK
8	Taman Puri Indah Sidoarjo		BAIK
9	Taman Pondok Mutiara		BAIK
10	Taman Mangundiprojo, Jl. R. Moh. Mangundiprojo, Kec. Buduran		BAIK
11	Taman TARA, Jl. Pagerwojo, Kec. Buduran		BAIK
12	Taman Skateboard, Jl. Pagerwojo, Kec. Buduran		BAIK
13	Taman Abirama, Jl. Raya Ponti, Kec. Buduran		BAIK
14	Oma Pesona Buduran		BAIK
15	Taman Tiara Regency 1		BAIK

16	Taman Tiara Regency 2		BAIK
17	Taman Monumen Perjuangan		BAIK
18	RTH Griya Permata, Perum Griya Permata, Kec. Gedangan		BAIK
19	Taman Ilyushin, Jl. Raya Aloha		BAIK
20	Taman Abisatya, Kec. Taman		BAIK
21	Taman Grand Aloha 1		BAIK
22	Taman Grand Aloha 2		BAIK
23	Taman Grand Aloha 3		BAIK
24	Taman Grand Aloha 4		BAIK
25	Taman Grand Aloha 5		BAIK
26	Taman Grand Aloha 6		BAIK
27	Taman Abirupa, Jl. St. Krian, Kec. Krian		BAIK
28	Taman Apkasi, Jl. Raya Porong, Kec. Porong		BAIK
29	Taman Dwarakerta, Jl. Raya Porong, Kec. Porong		BAIK
30	Taman Wisma Permai Entrance 1		BAIK
31	Taman Wisma Permai Entrance 2		BAIK
32	Taman Wisma Permai Playground		BAIK
33	Taman Wisma Permai Lapangan Basket		BAIK
34	Taman Gading Fajar 2, Jl. Lingkar Barat, Kec. Sidoarjo, Kec. Candi		BAIK
35	Taman Citra Sentosa Mandiri		BAIK
36	Taman RTH Makam Mbah Djaelani, Jl. Pesarean Mbah Djaelani, Kec. Tulangan		BAIK
37	RTH Perumtas III RT. 44 RW. 10		BAIK
38	RTH Perumtas III, Kec. Wonoayu		BAIK
39	RTH Perumtas II, Kec. Tanggulangin		BAIK

40	Taman Kecamatan Jabon, Jl. Dukuhsari, Dukuhsari, Kec. Jabon		BAIK
41	Air Mancur ADIPURA, Jl. Pahlawan		BAIK
42	Monumen PANCASILA Depan Exit Toll Sidoarjo		BAIK
43	PERAHU, Sempadan Kali Pucang, Kec. Sidoarjo		BAIK
44	Halaman Pendopo Kabupaten, Jl. Cokronegoro, Kec. Sidoarjo		BAIK
45	Taman Sudut kota, Depan Kantor Pos, Kec. Sidoarjo		BAIK
46	Taman Sudut kota, Jl. Akses Gor, Kec. Sidoarjo		BAIK
47	Taman Sudut kota, Jl. Thamrin, Kec. Sidoarjo		BAIK
48	Taman Sudut kota, Pertigaan Cemengkalang		BAIK
49	Taman Avoer Kemambang, Jl. Jenggolo		BAIK
50	Air Mancur Pagerwojo, Ds. Pagerwojo		BAIK
51	Taman SEMBILAN PULUH, Depan SMAN 1 Sidoarjo		BAIK
52	Taman Sudut kota, Depan Kantor Kecamatan		BAIK
53	Air Mancur ALOHA		BAIK
54	Taman ALOHA		BAIK
55	Taman JINAN, Juanda		BAIK
56	Taman REKREASI JATIKEPUH, Ds. Jatikepuh		BAIK
57	Taman EDUKASI, TPA		BAIK
58	MONUMEN PERJUANGAN, Jl. Prambon, Kec. Krian		BAIK
59	TUGU BATAS WILAYAH, Pertigaan Pakerin		BAIK
60	Taman ASA, Ds. Siwalanpanji, Sempadan Rel KA.		BAIK
61	Gerbang Kabupaten, Jembatan Porong		BAIK

62	Kebun Buah Perumahan Pesona Asri, Perumahan Pesona Asri		BAIK
63	Kebun Buah Perumahan Pesona Asri, Perumahan Pesona Asri		BAIK

A.3. FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SOP Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Penutupan Tempat Usaha;	-	-
		Penghimpunan Laporan Terkait Dugaan Tindakan Pidana Pelanggaran Perda/Perkada;	-	-
		Penghimpunan Resume BAP Terkait Dugaan Tindakan Pidana Pelanggaran Perda/Perkada Satpol PP Kab. Sidoarjo;	-	-
		Penyusunan BAP Pelanggaran Perda/Perkada Satpol PP Kab. Sidoarjo;	-	-
		Pengiriman Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan;	-	-
		Tata Cara Koordinasi Pelaksanaan Penyidikan Sekretariat PPNS Kab. Sidoarjo;	-	-
		Penyidikan Oleh Satpol PP Kab. Sidoarjo;	-	-

		Penyelidikan Oleh Satpol PP Kab. Sidoarjo.	-	-
2	SOP Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Penegakan Perda Nonyustisial	-	-
		Penegakan Perda Yustisial	-	-
		Penegakan Perkada	-	-
		Penyakit Masyarakat	-	-
		Operasi PMKS	-	-
		Deteksi Dini	-	-
		Cegah Dini	-	-
		Pembinaan	-	-
		Penyuluhan	-	-
		Patroli Blok	-	-
		Patroli Kawasan	-	-
		Patroli Khusus	-	-

		Pengawasan	-	-
		Pengamanan Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah	-	-
		Pengamanan Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah	-	-
		Pengamanan Aset Daerah selain Rumah Dinas dan Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintahan Daerah	-	-
		Pengamanan Lokasi Kunjungan/Tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan Tamu VIP	-	-
		Pengamanan Upacara dan Acara Penting	-	-
		Pengawasan Berjalan Kaki	-	-
		Pengawasan Dengan Kendaraan Bermotor	-	-
		Penertiban PKL	-	-
		Penertiban Reklame	-	-
		Penanganan Unjuk Rasa	-	-

A.4.FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD
SATPOL PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1	1	-
2	Alat Keamanan Lainnya	15	15	-
3	Alat Komunikasi Lainnya	21	21	-
4	Alat Studio Lainnya	1	1	-
5	Camera Electronic	3	3	-
6	Camera film	7	7	-
7	Detektor Perorangan	1	1	-
8	External/ Portable Hardisk	1	1	-
9	Filing Cabinet Besi	17	11	6
10	Handy Talky (HT)	43	43	-
11	Hard Disk	4	4	-
12	Helm Teknik	30	-	30
13	Laptop	2	2	-
14	Lemari Besi/Metal	4	4	-
15	Lemari Kayu	26	26	-
16	Lensa Kamera	1	1	-
17	Lighting Head Body	2	2	-
18	Megaphone	4	4	-
19	Mesin Gergaji	2	2	-
20	Mesin Kompresor	1	1	-

21	Mesin Las Listrik	1	1	-
22	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	-	1
23	Note Book	6	6	-
24	P.C Unit	3	3	-
25	Papan Gambar	6	6	-
26	Papan Nama Instansi	4	4	-
27	Papan Pengumuman	3	3	-
28	Papan Visual/Papan Nama	12	12	-
29	Peralatan Antena Penerima VHF	1	1	-
30	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1	-
31	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	1	-
32	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	3	3	-
33	Perkakas Bengkel Service Lainnya	2	2	-
34	Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya	2	2	-
35	Perlengkapan Bengkel Kayu	1	1	-
36	Perlengkapan Bengkel Mekanik	5	5	-
37	Pick Up	15	15	-
38	Pompa Kebakaran/Portable	3	3	-
39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	11	-
40	Professional Sound System	3	3	-
41	Sepeda Motor	51	51	-
42	Sepeda Motor Patroli	57	57	-
43	Sound System	1	1	-

44	Sport Utility Vehicle (SUV)	5	5	-
45	Station Wagon	8	8	-
46	Stationary Generating Set	1	1	-
47	Tablet PC	3	3	-
48	Tameng	40	40	-
49	Tangga Aluminium	1	1	-
50	Traffic Light	8	8	-
51	Truck + Attachment	5	5	-
52	Unit Power Supply	5	5	-
53	Unit Tranceiver HF Portable	1	1	-
54	Gedung Pos Jaga Permanen	16	16	-
55	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-
56	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	-
57	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	-
		475	438	37

A.5. FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS) KABUPATEN SIDAORJO

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	56	54	218	6	1185

A.6. FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN KABUPATEN SIDAORJO

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	0	

A.7. FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1		3	4	5	6
1.	Pelayanan Pengobatan	nihil	nihil	nihil	nihil

A.8. FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER KABUPATEN SIDOARJO

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6
1	WARUNG NASI	nihil	nihil	nihil	
2	WARUNG NASI KOPI	nihil	nihil	nihil	
3	KIOS	nihil	nihil	nihil	
4	WARUNG	nihil	nihil	nihil	
5	RUMAH	nihil	nihil	nihil	

B. Kebencanaan

B.1. FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

NO.	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/ tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	-	Mulyadi	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
2	-	Mujat	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
3	-	A. Ghofur	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
4	-	Misbahul M	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
5	-	Rifqi Rohi Dhofi	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
6	-	Sumino	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
7	-	Samsul Hadi	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
8	-	Suwandi	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
9	-	Nurmiyati	-	-	P	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
10	-	Sunaryo	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-
11	-	Prasetyo	-	-	L	-	-	Gisik Cemandi	Gisik Cemandi	Sedati	-	tidak	-	-

Lanjutan

434	-	Nur Ana	-	-	P	-	-	Tarik	Tarik	Tarik	-	tidak	-	-
-----	---	---------	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	---	-------	---	---

435	-	Sri Purnawati	-	-	P	-	-	Tarik	Tarik	Tarik	-	tidak	-	-
436	-	Riswandha, S.Pd	-	-	P	-	-	Pangkemiri	Pangkemiri	Tulangan	-	tidak	-	-
437	-	Siti Arofah	-	-	P	-	-	Tulangan	Tulangan	Tulangan	-	tidak	-	-
438	-	Umi Faridah	-	-	P	-	-	RT 02 , RW 01	Kenongo	Tulangan	-	tidak	-	-
439	-	Wanda Pridatul 'Aisy	-	-	P	-	-	Kepatihan	Kepatihan	Tulangan	-	tidak	-	-
440	-	Layli dayati, S. pd	-	-	P	-	-	Kepatihan	Kepatihan	Tulangan	-	tidak	-	-
441	-	Ida Hatiyani	-	-	P	-	-	Rt 04/02	Kenongo	Tulangan	-	tidak	-	-
442	-	Muzarroh, S.Pd	-	-	P	-	-	Kenongo	Kenongo	Tulangan	-	tidak	-	-
443	-	Siti Hlimah, S.Pd	-	-	P	-	-	Kepatihan	Kepatihan	Tulangan	-	tidak	-	-
444	-	Fitriah Dwi Rahmadani	-	-	P	-	-	Kureksari	Kureksari	Waru	-	tidak	-	-
445	-	Fefy yuli bachtiar	-	-	P	-	-	Medaeng	Medaeng	Waru	-	tidak	-	-
446	-	Sunarmi	-	-	P	-	-	Bungurasih	Bungurasih	Waru	-	tidak	-	-
447	-	Santi	-	-	P	-	-	Waru	Waru	Waru	-	tidak	-	-
448	-	Tuti handayani	-	-	P	-	-	Waru	Waru	Waru	-	tidak	-	-
449	-	Ida kurniati	-	-	P	-	-	Candinegoro	Candinegoro	Wonoayu	-	tidak	-	-
450	-	Suwarti, M.Pd.	-	-	P	-	-	Sumberrejo	Sumberrejo	Wonoayu	-	tidak	-	-
451	-	Rizca Aulia Aliffiandi	-	-	P	-	-	Candinegoro	Candinegoro	Wonoayu	-	tidak	-	-
452	-	Indah setyowati	-	-	P	-	-	Wonoayu	Wonoayu	Wonoayu	-	tidak	-	-

441	-	Ida Hatiyani	-	-	P	Kenongo	Tulangan	1						1						
442	-	Muzarroh, S.Pd	-	-	P	Kenongo	Tulangan	1						1						
443	-	Siti Ikhlimah, S.Pd	-	-	P	Kepatihah	Tulangan	1						1						
444	-	Fitriah Dwi Rahmadani	-	-	P	Kureksari	Waru	1	1					1						
445	-	Fefty yuli bachtiar	-	-	P	Medaeng	Waru	1	1					1						
446	-	Sunarmi	-	-	P	Bungurasih	Waru	1	1					1						
447	-	Santi	-	-	P	Waru	Waru	1	1					1						
448	-	Tuti handayani	-	-	P	Waru	Waru	1	1					1						
449	-	Ida kurniati	-	-	P	Candinegoro	Wonoayu	1	1					1						
450	-	Suwarti, M.Pd.	-	-	P	Sumberrejo	Wonoayu	1						1						
451	-	Rizca Aulia Aliffiandi	-	-	P	Candinegoro	Wonoayu	1						1						
452	-	Indah setyowati	-	-	P	Wonoayu	Wonoayu	1						1						

Form 5.A.3 Rekapitulasi Kelompok Warga Negara

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Rekapitulasi Kelompok Warga Negara								
			Variasi 1			Variasi 2			Variasi 3		
			Kelompok Jenis	Kk	Jiwa	Kelompok Jenis	Kk	Jiwa	Kelompok Jenis	Kk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Balongbendo	-	Banjir	20291	81163					Cuaca Ekstrim	20
2	Buduran	-	Banjir	30627	122509					Cuaca Ekstrim	28
3	Candi	-	Banjir	41369	165476					Cuaca Ekstrim	43
4	Gedangan	-	Banjir	32097	128389					Cuaca Ekstrim	32

5	Jabon	-	Banjir	15006	60025	Banjir Bandang	362	1449	Cuaca Ekstrim	15
6	Krembung	-	Banjir	17254	69017	Banjir Bandang	229	917	Cuaca Ekstrim	17
7	Krian	-	Banjir	33979	135917				Cuaca Ekstrim	34
8	Porong	-	Banjir	22433	89731	Banjir Bandang	2527	10108	Cuaca Ekstrim	22
9	Prambon	-	Banjir	21888	87551				Cuaca Ekstrim	218
10	Sedati	-	Banjir	25702	102809				Cuaca Ekstrim	30
11	Sidoarjo	-	Banjir	56835	227341				Cuaca Ekstrim	84
12	Sukodono	-	Banjir	31031	124125				Cuaca Ekstrim	31
13	Taman	-	Banjir	58123	232490				Cuaca Ekstrim	58
14	Tanggulangin	-	Banjir	27852	111408				Cuaca Ekstrim	278
15	Tarik	-	Banjir	16222	64889	Banjir Bandang	285	1140	Cuaca Ekstrim	162
16	Tulangan	-	Banjir	25905	103621				Cuaca Ekstrim	25
17	Waru	-	Banjir	63568	254271				Cuaca Ekstrim	636
18	Wonoayu	-	Banjir	20291	81163				Cuaca Ekstrim	207

FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA					JUMLAH W	
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	WARGA NEGARA	
								JIWA	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Balongbendo	Singkalan	-	-	-	-	-	-	-
2	Balongbendo	Kedung Sukodani	-	-	-	-	-	-	-
3	Balongbendo	Bakung Temenggungan	-	-	-	-	-	-	-
4	Balongbendo	Sumokembangsri	-	-	-	-	-	-	-
5	Balongbendo	Sedur	-	-	-	-	-	-	-
6	Balongbendo	Wonokupang	-	-	-	-	-	-	-
7	Balongbendo	Waruberon	-	-	-	-	-	-	-

8	Balongbendo	Bakalan Wringinpitu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Balongbendo	Gagang Kepuhsari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Balongbendo	Suwaluh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Balongbendo	Watesari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Balongbendo	Seketi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Balongbendo	Kemangsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Balongbendo	Jabaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Balongbendo	Balongbendo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Balongbendo	Jeruk Legi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Balongbendo	Penambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Balongbendo	Wonokarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Balongbendo	Bakung Pringgodani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lanjutan

336	Wonoayu	Tanggul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	Wonoayu	Wonokalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Wonoayu	Pagerngumbuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	Wonoayu	Plaosan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Wonoayu	Mulyodadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	Wonoayu	Lambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Wonoayu	Sawocangkring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Wonoayu	Becirongengor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	Wonoayu	Karangpuri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Wonoayu	Candinegoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT

DATA DASAR PETUGAS													
NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI	BERKEBUTUHAN KHUSUS	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kusnadi	-	-	L	-	-	-	-	Candi	-	Tidak	-	-
2	Totok Triko	-	-	L	-	-	-	-	Sidoarjo	-	Tidak	-	-
3	Dhito Tri Wahyudi	-	-	L	-	-	-	-	Taman	-	Tidak	-	-
4	Teguh Prasetyo	-	-	L	-	-	-	-	Jabon	-	Tidak	-	-
5	Eko Santoso	-	-	L	-	-	-	-	Sidoarjo	-	Tidak	-	-
6	M. Wahyudi	-	-	L	-	-	-	-	Waru	-	Tidak	-	-
7	Alfiansyah Arya P	-	-	L	-	-	-	-	Buduran	-	Tidak	-	-
8	Eko Fitrianto	-	-	L	-	-	-	-	Buduran	-	Tidak	-	-
Lanjutan													
86	Yulianto	-	-	L	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	-
87	Ahmadan	-	-	L	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	-
88	Kusno	-	-	L	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	-
89	Yuliono	-	-	L	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	-
90	Nur Kholis	-	-	L	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	-

91	Margiono	-	-	L	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	-
92	Harun	-	-	L	-	-	-	-	-	-	Tidak	-	-

FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

NO.	JENIS BENCANA	PENDUDUK			PETUGAS TRC PDB	PETUGAS TRC KLB	PE
		JIWA	KK	DESA			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Banjir	-	-	-	-	-	
2	Banjir Bandang	-	-	-	-	-	
3	Cuaca Ekstrim	-	-	-	-	-	
4	Gempa Bumi	-	-	-	-	-	
5	Kekeringan	-	-	-	-	-	
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	-	-	-	-	-	
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	

FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PE

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT LOKASI			
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS
1	2	3	4	5	6	7
1	APD Lengkap	1	-	-	√	√
2	APD Lengkap	8	-	-	√	√
3	APD Lengkap	0	-	-	-	√
4	Baju Hazmat	50	-	-	√	√
5	Baju Hazmat	0	-	-	√	√
6	AC Floor Standing	2	-	-	-	-

7	AC Floor Standing	1	-	-	-	-
8	AC Floor Standing	2	-	-	-	-
9	Alat Selam	1	-	-	√	-
10	Alat Semprot Disinfektan	5	-	-	-	-
11	Alat Semprot Disinfektan	4	-	-	-	-
12	Alat Semprot Disinfektan	4	-	-	-	-
13	Alat Semprot Disinfektan	1	-	-	-	-
14	Alat Semprot Disinfektan	2	-	-	-	-
15	Alat Ukur Ketinggian Air	0	√	-	-	-
16	Bilik Isolasi	0	-	-	-	-
17	Cangkul	0	-	-	-	-
18	Cangkul	15	-	-	-	-
19	Cangkul	2	-	-	-	-
20	Dayung Perahu	6	-	√	-	-
21	Dayung Perahu	0	-	√	-	-
22	Excavator	1	-	-	-	-
23	Excavator	1	-	-	-	-
24	Excavator	1	-	-	-	-
25	Excavator	6	-	-	-	-
26	Garpu Sampah	1	-	-	-	-
27	Genset	3	-	-	-	-
28	Genset	1	-	-	-	-
29	Genset	3	-	-	-	-
30	Genset	1	-	-	-	-
31	Genset	2	-	-	-	-
32	Genset	2	-	-	-	-

33	Genset	5	-	-	-	-
34	Genset	2	-	-	-	-
35	Gergaji Mesin	3	-	-	-	-
36	Gergaji Mesin	4	-	-	-	-
37	Gergaji Mesin	2	-	-	-	-
38	Gergaji Mesin	41	-	-	-	-
39	Gergaji Mesin	3	-	-	-	-
40	Handy Talky (HT)	3	√	√	-	-
41	Handy Talky (HT)	5	√	√	-	-
42	Handy Talky (HT)	10	√	√	-	-
43	Handy Talky (HT)	10	√	√	-	-
44	Handy Talky (HT)	3	√	√	-	-
45	Head Lamp	10	-	√	-	-
46	Head Lamp	4	-	√	-	-
47	Helm Proyek	10	-	-	-	-
48	Helm Rescue	10	-	-	-	-
49	Helm Rescue	4	-	-	-	-
50	Kantong Mayat	25	-	-	-	-
51	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	4	-	-	-	-
52	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	3	-	-	-	-
53	Kikir Gergaji Mesin	6	-	-	-	-
54	Kikir Gergaji Mesin	1	-	-	-	-
55	Kipas Angin Standing	4	-	-	-	-
56	Kipas Angin Standing	1	-	-	-	-
57	Kipas Angin Standing	3	-	-	-	-
58	Kursi Lipat	43	-	-	-	-
59	Lampu Penerangan	10	-	-	-	-

60	Lampu sorot	1	-	-	-	-
61	Linggis	1	-	-	-	-
62	Linggis	1	-	-	-	-
63	Linggis	1	-	-	-	-
64	Megaphone / TOA	1	-	-	-	-
65	Megaphone / TOA	1	-	-	-	-
66	Mesin Potong Rumput	1	-	-	-	-
67	Mesin Potong Rumput	3	-	-	-	-
68	Mesin Potong Rumput	2	-	-	-	-
69	Mesin Potong Rumput	122	-	-	-	-
70	Mobil Ambulans	2	-	-	√	√
71	Mobil Ambulans	2	-	-	√	√
72	Mobil Ambulans	33	-	-	√	√
73	Mobil Ambulans	14	-	-	√	√
74	Mobil Box	1	-	-	-	-
75	Mobil Dapur Umum	2	-	-	-	-
76	Mobil Dump Truck	1	-	-	-	-
77	Mobil Dump Truck	73	-	-	-	-
78	Mobil Pick Up	1	-	-	-	-
79	Mobil Pick Up	1	-	-	-	-
80	Mobil Pick Up	2	-	-	-	-
81	Mobil Pick Up	8	-	-	-	-
82	Mobil Pick Up	1	-	-	-	-
83	Mobil Pick Up	1	-	-	-	-
84	Mobil Pick Up	1	-	-	-	-
85	Mobil Rescue	1	-	√	√	√

86	Mobil Tangki	9	-	-	-	-
87	Motor Tempel Perahu 25PK	1	-	√	-	-
88	Motor Trail	6	-	√	-	-
89	Papan Informasi	1	-	-	-	-
90	Papan Tulis	1	-	-	-	-
91	Pelampung	6	-	√	-	-
92	Pelampung	15	-	√	-	-
93	Pelampung Jaket	20	-	√	-	-
94	Pelampung Jaket	1	-	√	-	-
95	Pembatas Jalan	4	-	-	-	-
96	Perahu Fiber	1	-	√	-	-
97	Perahu Karet	1	-	√	-	-
98	Peralatan Dapur	1	-	-	-	-
99	Pompa Air Portebel	2	-	-	-	-
100	Pompa Air Portebel	29	-	-	-	-
101	Pompa Air Portebel	1	-	-	-	-
102	Radio RIG	1	-	-	-	-
103	Radio RIG	2	-	-	-	-
104	Radio RIG	1	-	-	-	-
105	Rompi Lapangan	27	√	-	-	-
106	Rompi Lapangan	25	√	-	-	-
107	Sekop	20	-	-	-	-
108	Sekop	2	-	-	-	-
109	Sekop	20	-	-	-	-
110	Senter Tangan	4	-	√	-	-
111	Senter Tangan	5	-	√	-	-

112	Tandon Air	2	-	-	-	-
113	Tandon Air	3	-	-	-	-
114	Tandon Air	10	-	-	-	-
115	Tandu Lipat	8	-	-	√	√
116	Tangga	1	-	-	-	-
117	Tangga	2	-	-	-	-
118	Tangga	2	-	-	-	-
119	Tangga	1	-	-	-	-
120	Tangga	1	-	-	-	-
121	Tangga	1	-	-	-	-
122	Tangga	2	-	-	-	-
123	Tangga	3	-	-	-	-
124	Tangga	1	-	-	-	-
125	Tenda pengungsi	1	-	-	-	-
126	Tenda pengungsi	1	-	-	-	-
127	Tenda pengungsi	2	-	-	-	-
128	Tenda pengungsi	2	-	-	-	-
129	Tenda Posko	2	-	-	-	-
130	Tenda Posko	1	-	-	-	-
131	Tenda Posko	2	-	-	-	-
132	Terpal	394	-	-	-	-
133	Toilet Portabel	2	-	-	-	-
134	Velbed	20	-	-	-	-
135	Velbed	10	-	-	-	-
136	Velbed	45	-	-	-	-

FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNSIAN

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI		KONDISI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	R
1	2	3	4	5	6	
1	Air Mineral	35	Kantor PMK Buduran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	
2	Air Mineral	0	-	Dinas Perikanan	-	
3	Glangsing	2000	Kantor PMK Buduran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	
4	Jas Hujan	4	Satpolpp (Bidang Linmas)	Satpol PP	√	

5	Jas Hujan	10	Kwarcab Sidoarjo	Pramuka	√	
6	Jas Hujan	8	Markas PMI Sidoarjo	Palang Merah Indonesia	√	
7	Jas Hujan	2	Pos Satpam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	
8	Jas Hujan	75	Kantor PMK Buduran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	
9	Jirigen Air	10	Markas PMI Sidoarjo	Palang Merah Indonesia	√	
10	Jirigen Air	10	gudang sekretariat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	
11	Jirigen Air	20	Kantor PMK Buduran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	
12	Jirigen BBM	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	
13	Jirigen BBM	7	Gudang BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	√	
14	Jirigen BBM	3	Sekretariat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	
15	Jirigen BBM	1	Satpolpp (Bidang Linmas)	Satpol PP	√	
16	Jirigen BBM	5	Markas PMI Sidoarjo	Palang Merah Indonesia	√	
17	Kompur	5	Kantor PMK Buduran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	
18	Kompur	5	sekretariat dan masing masing bidang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	
19	Kompur	3	Markas PMI Sidoarjo	Palang Merah Indonesia	√	
20	Kompur	3	Kwarcab Sidoarjo	Pramuka	√	
21	Kompur	4	kantor Dinas	Dinas Perikanan	√	
22	Makanan Siap Saji	240	Kantor PMK Buduran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	
23	Masker	5	Markas PMI Sidoarjo	Palang Merah Indonesia	√	
24	Matras/Pallet plastik	5	Kantor PMK Buduran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	
25	Matras/Pallet plastik	4	Markas PMI Sidoarjo	Palang Merah Indonesia	√	
26	Meja Lipat	3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	
27	Meja Lipat	15	Gudang Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	√	
28	Meja Lipat	6	Gudang BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	√	
29	Meja Lipat	10	Kantor Dinas	Dinas Perikanan	√	
30	Meja posko	3	Kantor Baznas	Badan Amil Zakat	√	
31	Paket Kebersihan Keluarga	30	Kantor PMK Buduran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	

32	Paket Medical Kit	3	1 Buah di IGD, 2 Buah di Ambulance Rescue	RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo	√	
33	Paket Medical Kit	2	Markas PMI Sidoarjo	Palang Merah Indonesia	√	
34	Paket Sembako	100	Kantor Baznas	Badan Amil Zakat	√	
35	Sabun Cuci Tangan	15	gudang sekretariat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	
36	Sabun Cuci Tangan	3	Gudang BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	√	
37	Sepatu Boots	5	Satpolpp (Bidang Linmas)	Satpol PP	√	
38	Sepatu Boots	4	Kantor Baznas	Badan Amil Zakat	√	
39	Sepatu Boots	2	Dinkes	Dinas Kesehatan	-	
40	Sepatu Boots	3	gudang sekretariat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√	
41	Sepatu Boots	20	Kwarcab Sidoarjo	Pramuka	√	
42	Tali Karmentel	1	Kwarcab Sidoarjo	Pramuka	√	
43	Tambah Gizi Biskuit	8000	Kantor PMK Buduran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	

FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA

NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (Miskin/Tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (Ya/Tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (Bila ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ACHMAD HAZAM PRISTIANTO	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
2	SRI ASTUTIK	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
3	YUL ANIDAH	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
4	ABU BAKAR	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
5	TRI DAYASIH	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
6	WENI	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
7	MULIONO	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
8	PUTININGSIH	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
9	KERTO	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
10	SUBANDI	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
11	RIRIS SUJEFRI	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-

12	SELAMET SUGIONO	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
13	RACHMAD SYAIFUL BISRI	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
14	SALAMAH	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-
15	NGATENI	-	-	-	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-

Lanjutan

576	SUYANTO	3515060706600006	-	-	-	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-
577	M. IMRON	3515091701870001	-	-	-	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-
578	MUKYIDIN	-	-	-	-	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-
579	ARIFAH YULIATI	3515096409760001	-	-	-	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-
580	MU;IDAH	3515094403480001	-	-	-	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-
581	SITI MUSA'ADAH	-	-	-	-	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-
576	SUYANTO	3515060706600006	-	-	-	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-

FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA

DATA DASAR WARGA NEGARA							STATUS				PERAN DALAM PENANGGULANGAN					
NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KORBAN	PENGUNGSI			WARGA NEGERA RAWAN BENCANA		APARTUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA		PETU	
								MENINGGAL	HILANG	BUTUH BANTUAN MEDIS DARURAT	BUTUH BANTUAN MEDIS LANJUT	SELAMAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	ACHMAD HAZAM PRISTIANTO	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			
2	SRI ASTUTIK	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			
3	YUL ANIDAH	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			
4	ABU BAKAR	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			
5	TRI DAYASIH	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			
6	WENI	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			
7	MULIONO	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			
8	PUTININGSIH	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			
9	KERTO	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			
10	SUBANDI	-	-	-	KEPER	KREMBUNG	-	-	-	-	√	√	-			

Lanjutan

576	SUYANTO	3515060706600006	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
577	M. IMRON	3515091701870001	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
578	MUKYIDIN	-	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-

579	ARIFAH YULIATI	3515096409760001	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
580	MU;IDAH	3515094403480001	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-
581	SITI MUSA'ADAH	-	-	-	KEPATIHAN	TULANGAN	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-

FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCA

DATA DASAR PETUGAS										STATUS PETUGAS					
NO.	NAMA PETUGAS	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PNS	TNI	POLRI	SATLIMNAS	TENAGA KONTRAK	NON APARAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kusnadi	-	-	L	-	-	-	-	Candi	✓					
2	Totok Triko	-	-	L	-	-	-	-	Sidoarjo	✓					
3	Dhito Tri Wahyudi	-	-	L	-	-	-	-	Taman	✓					
4	Teguh Prasetyo	-	-	L	-	-	-	-	Jabon	✓					

5	Eko Santoso	-	-	L	-	-	-	-	Sidoarjo					✓	
88	Kusno	-	-	L	-	-	-	-	-						✓
89	Yuliono	-	-	L	-	-	-	-	-						✓
90	Nur Kholis	-	-	L	-	-	-	-	-						✓
91	Margiono	-	-	L	-	-	-	-	-						✓
92	Harun	-	-	L	-	-	-	-	-						✓
88	Kusno	-	-	L	-	-	-	-	-						✓

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA

NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENIT)	LOKASI	STATUS	
						TIDAK DIKELUARKAN	DI
1	2	03/01/00	4	5	6	7	
1	Banjir genangan	02/01/2025	17.00		Desa Buduran (Buduran) Desa Sumokali (Candi) Desa Jambangan (Candi)	√	
2	Angin Kencang	05/01/2025	14.00	-	Desa Popoh (Wonoayu)	√	
3	Banjir genangan	07/01/2025	16.00		Desa Sumokali (Candi) Desa Jambangan (Candi)	√	
4	Angin Kencang	08/01/2025	12.30	-	Desa Tlasi (Tulangan)	√	
5	Angin Kencang	12/01/2025	17.30	-	Desa Mindu Gading (Tarik)	√	

6	Banjir genangan	14/01/2025	15.30		Desa Kletek (Taman) Kelurahan Ketegan (Taman) Desa Kramat Jegu (Taman) Desa Bungurasih (Waru) Desa Tambaksumur (Waru) Desa Kalipecabean (Candi) Desa Kedungbanteng (Tanggulangin) Desa Banjarasri (Tanggulangin) Desa Tambakkalisogo (Jabon) Desa Semambung (Jabon) Desa Kupang (Jabon) Desa Kedungpandan (Jabon)	-	
7	Banjir genangan	19/01/2025	23.00		Desa Kedungbanteng (Tanggulangin) Desa Banjarasri (Tanggulangin) Desa Kalidawir (Tanggulangin) Desa Banjarpanji (Tanggulangin) Desa Penatarsewu (Tanggulangin) Desa Semambung (Jabon) Desa Kupang (Jabon) Desa Kedungrejo (Jabon) Desa Tambakkalisogo (Jabon) Desa Kedungpandan (Jabon) Desa Balonggabus (Candi) Desa Kebonsari (Candi) Desa Klurak (Candi) Desa Kalipecabean (Candi) Desa Kendal Pecabean (Candi)	-	
8	Banjir genangan	25/01/2025	05.00		Desa Pepelegi (Waru) Desa Waru (Waru) Desa Bungurasih (Waru) Desa Medaeng (Waru) Desa Kedungturi (Taman)	√	

9	Angin Kencang	29/01/2025	20.00	-	Desa Janti (Waru)	√	
10	Angin Kencang	01/02/2025	11.00		Desa Semambung (Jabon)	√	
11	Angin Kencang	07/02/2025	17.00		Desa Kebakalan (Porong) Desa Kalipecabean (Candi) Desa Balongdowo (Candi)	√	
12	Angin Kencang	08/02/2025	17.30		Desa Gedang (Porong) Desa Wunut (Porong) Desa Juwetkenongo (Porong)	√	
13	Angin Kencang	08/02/2025	18.00		Desa Cemandi (Sedati) Desa Kwangsan (Sedati) Desa Panggeh (Jabon)	√	
14	Angin Kencang	12/02/2025	17.00		Desa Pamotan (Porong)	√	
15	Angin Kencang	13/02/2025	15.00		Desa Ngingas (Waru) Desa Janti (Waru) Desa Wedoro (Waru) Desa Prasung (Buduran)	√	
16	Angin Kencang	17/02/2025	14.30		Desa Wedoro Klurak (Candi) Desa Klurak (Candi) Desa Kendal Pecabean (Candi) Desa Gebang (Sidoarjo)	√	
17	Angin Kencang	20/02/2025	16.30		Desa Semambung (Jabon) Desa Kedungpandan (Jabon) Desa Porong (Porong) Desa Juwetkenongo (Porong)	√	

18	Banjir genangan	24/02/2025	13.00	Desa Banjarbendo (Sidoarjo) Kelurahan Gebang (Sidoarjo) Desa Rangkahkidul (Sidoarjo) Desa Barengkrajan (Krian) Desa Tempel (Krian) Desa Wunut (Porong) Desa Candipari (Porong) Desa Pesawahan (Porong) Desa Pamotan (Porong) Desa Kedungsolo (Porong) Desa Grogol (Porong) Desa Durungbedug (Candi) Desa Candi (Candi) Desa balongdowo (Candi) Desa Ngampelsari (Candi) Desa Klurak (Candi) Desa Gelam (Candi) Desa Sumorame (Candi) Desa Bligo (Candi) Desa Kendalpecabean (Candi) Desa Balonggabus (Candi) Desa Kalipecabean (Candi) Desa Gempolsari (Tanggulangin) Desa Kedungbanteng (Tanggulangin) Desa Banjarasri (Tanggulangin) Desa Kalidawir (Tanggulangin) Desa Penatarsewu (Tanggulangin) Desa Kalitengah (Tanggulangin)	-
19	Banjir genangan	08/03/2025	12.00	Kelurahan Ketegan (Taman)	√
20	Angin Kencang	13/03/2025	18.27	Desa Wangkal (Krembung)	√

21	Banjir genangan	16/03/2025			Kelurahan Ketegan (Taman) Desa Ngelom (Taman) Desa Kedungturi (Taman) Desa Bungurasih (Waru) Desa Medaeng (Waru) Desa Waru (Waru)	-	
22	Angin Kencang	21/03/2025	17.00		Desa Pucang (Sidoarjo)	√	
23	Angin Kencang	23/03/2025	15.45		Desa Masangan Kulon (Sukodono)	√	

C. Kebakaran

a. FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM KABUPATEN SIDOARJO

NO.	PROVINSI KABUPATE N/KOTA	BENTUK KELEMBAGAAN				JUMLAH PENDUD UK	LUAS WILAY AH	BESARAN APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN						JUMLAH PETUGAS				JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN				
		DIN AS	SATP OL PP	BPB D	TIP E					MOBI L DAM KAR	MOBIL TANGK I	MOBIL TANG GA	MOBIL RESCU E	MOBIL LAINN YA	TAN DO N AIR/ GR OU ND TAN K	P N S	JABAT AN/ KUALI FIKASI	NON PNS	JABAT AN/ KUALI FIKASI	RELA WAN KEBAK ARAN	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Sidoarjo	-		V	B	2.027.874	719,34	5.947.714.970.802	13.059.269.339	14	-	-	2	3	6	1	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	91	Pemada m Kebakara n	185	198	549	554	287
																22	Pengelola Layanan Operasional	23	Rescue (Peryelatan)					
																17	Operator Layanan Operasional	26	Operator Mobil Pemada m Kebakara n					
																35	PPPK Pemula- Pemadam Kebakaran	2	Mekanik					
																3	PPPK Pemula- Pencarian Dan Pertolongan							
																2	PPPK Ahl Pertama- Analis Kebakaran							
																80		142						222

b. FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	5
1	Bayu Pratama Widjayanto	Laki-laki	42	Penyelamatan	Sidokare Indah Blok Gg No. 6
2	Achmad Arya Putra W	Laki-laki	19	Penyelamatan	Perumahan Magersari Ay
3	Ade Isa Afriyanto	Laki-laki	20	Penyelamatan	Perum Bumi Citra Fajar Jl. Sekawan Elok Iv Blok A5 No. 136
		Laki-laki	51	Penyelamatan	
4	Dwi Novian Darmawan	Laki-laki	20	Penyelamatan	Banjarbendo
5	Moch Imam Sobirin	Laki-laki	24	Penyelamatan	Lebo
6	Dheo Firman Prasetya	Laki-laki	26	Penyelamatan	Babatan-Jati-
7	Subakti	Laki-laki	31	Penyelamatan	Sidokare
8	Aulia Nova Arisvigo	Perempuan	21	Penyelamatan	Bogem Selatan
9	Arif Agung Laksono	Laki-laki	25	Penyelamatan	Kebonagung
10	Ukky Tholabuddin	Laki-laki	32	Penyelamatan	Saimbang
11	Achmad Yazid K	Laki-laki	25	Penyelamatan	Bogem Selatan
12	Edmon Dery Soumokil	Laki-laki	27	Penyelamatan	Perum Mutiara Citra Graha
13	Dedik Irawan	Laki-laki	24	Penyelamatan	Dsn. Sumber
14	Zaenal Arifin	Laki-laki	30	Penyelamatan	Jimbaran Kulon
15	Eko Budi Santoso	Laki-laki	29	Penyelamatan	Dermonegoro
16	Syaiful Bahri	Laki-laki	25	Penyelamatan	Jarakan
17	Endra Purwovicaksono	Laki-laki	26	Penyelamatan	Wonokasian
18	Sugito	Laki-laki	23	Penyelamatan	Lambangan
19	Abi Haris Akhmadi	Laki-laki	22	Penyelamatan	Sawo- Sawocangkring
20	Moch. Hadi Soleh	Laki-laki	28	Penyelamatan	Lumbang
21	Safiin	Laki-laki	39	Penyelamatan	Ngumbuk
22	Siti Nur Rohimah	Perempuan	37	Penyelamatan	Nyamplungan

23	Laili Nur Wachidah	Perempuan	42	Penyelamatan	Plaosan
24	Elok Fitrohtin	Perempuan	43	Penyelamatan	Tanggul Wetan
25	Mochammad Asrori Bahiruddin	Laki-laki	32	Penyelamatan	Tenggulunan
26	Suaidi	Laki-laki	45	Penyelamatan	Sidomukti
27	Djaenal Abidin	Laki-laki	42	Penyelamatan	Sidowaras
28	Citra Wulandari	Perempuan	25	Penyelamatan	Jl. Taruna Gg Masjid No. 84
29	Arya Barma Trangana	Laki-laki	34	Penyelamatan	Perum Rewin
30	Mushuda Ansori	Laki-laki		Penyelamatan	Jl. Rajawali Viii G-80
31	Haqiki Dhana Adhika, Sh	Laki-laki		Penyelamatan	Bohar Timur, Jl. Mangun
32	Ulum Andi Sugianto	Laki-laki		Penyelamatan	Sari No. 38
33	Mulyono	Laki-laki		Penyelamatan	Ketegan
34	Krismi Biki	Laki-laki		Penyelamatan	Kedungturi, Jl. Gajah Mada
35	Lisa Verawaty Adiya	Perempuan		Penyelamatan	Sepanjang, Jl.
36	Febri Willy Ramdhani	Laki-laki		Penyelamatan	Kutilang 29
		Perempuan		Penyelamatan	Pondok Wage Indah 1 K/8
37	Nur Aminuddin	Laki-laki		Penyelamatan	Jl. Gadung No. 51
38	Budi Utomo, S.Sos	Laki-laki		Penyelamatan	Jl.Malik
39	Achmad Thamrin	Laki-laki		Penyelamatan	Ibrahim
40	Mochamad Tri Hanafi	Laki-laki		Penyelamatan	Jl. Mawar No. 47
41	Akhmad Riono	Laki-laki		Penyelamatan	Dsn. Ngaban Rt 11 Rw 04
42	Seger Sutrisno	Laki-laki		Penyelamatan	Desa
43	Agung Wigianto	Laki-laki		Penyelamatan	Kepunten
44	M. Lumintu Rochmat	Laki-laki		Penyelamatan	Kepunten
45	Khoirul Bariyah	Perempuan		Penyelamatan	Kepunten
46	Sutikno	Laki-laki		Penyelamatan	Kepunten
47	Sugiarto	Laki-laki		Penyelamatan	Ngaban
48	Abdul Jalil	Laki-laki		Penyelamatan	Ngaban

49	Sulaiman	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
50	Nurul Huda	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
51	Mas Arif Efendi	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
52	Purwanto	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
53	Mokh. Amiril Mubin	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
54	Selamet	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
55	Selamet Wahyudi	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
56	Akhmad Nur Rosyid	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
57	Fkarudin Amin	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
58	Ririn Diana Lutfiyah	Perempuan		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
59	Alfi Nikmatul Qurriah, S.Pd	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
60	Muhammad Miftakhul Alim	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
61	Dafik Hendri	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
	Saporta	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
62	Junaedi	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
63	Machlab	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
64	Eko Purwanto	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
65	Machmud	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
66	Agus Sukamto	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
67	Mochammad Rois	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
68	Sulhan	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
69	Enggar Afrim A	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
70	Bakhrudin Alim	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Ngaban
71	Ayu Indriani	Perempuan		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
72	Solichah	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
73	Samsi	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
74	Hudijono	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
75	Widajat Widajati	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang

76	Kiki Fanny Amalia	Perempuan		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
77	Nanik Rahayu	Perempuan		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
78	Tri Anjar Winarsih	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
79	Febri Ardiansyah	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
80	M Rizal Solichin	Perempuan		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
81	Khamid	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
82	Solikhin	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
83	Marchuwat	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
84	Iswahyudi	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
85	Kasidi	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
86	Miskan	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
87	Harianto	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
88	Samsul Huda	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
89	Syaifuddin Zuhri	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
90	Ngariyo	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
91	Jalal	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
92	Rio Daniel Rahadiyan	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
93	Supardi	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
94	Slamet Basuki	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
95	Hapit	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
96	Abdul Ghoni	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
97	Mohammad Kafid	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
98	Suwarno	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
99	Suprpto	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
100	Selamet	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
101	Rajimin Cipto R.	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
102	Supriadi	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang
103	Sutopo	Laki-laki		<i>Penyelamatan</i>	Gilang

				<i>Penyelamatan</i>	<i>Penyelamatan</i>
104	Ainur Rofik	Laki-laki			Gilang
105	Slamet Harijono	Laki-laki			Gilang
106	Aditya Wahyu R.	Laki-laki	-	-	Dsn Kweni RT 2 RW 1, Ds Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo
107	Agung Mulyono	Laki-laki	-	-	Dsn Kweni RT 2 RW 1, Ds Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo
108	Alfin Bagas Samariyanto	Laki-laki	-	-	Anggaswangi RT 5 RW 3, Ds Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo
109	Bima Aji Saputro	Laki-laki	-	-	Anggaswangi RT 8 RW 4, Ds Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo
110	Djoni Sukamto	Laki-laki	-	-	Anggaswangi RT 8 RW 4, Ds Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo
111	Muhammad Novan Ferdiansyah	Laki-laki	-	-	Anggaswangi RT 10 RW 05, Ds Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo
112	Sandy Mukti Ali	Laki-laki	-	-	Anggaswangi RT 8 RW 1, Ds Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo
113	Soleh Rois	Laki-laki	-	-	Anggaswangi RT 8 RW 4, Ds Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo
114	Muhammad Nor Kholisun	Laki-laki	-	-	Dusun Kaliwungu RT 11 RW 3, Desa Banjarwungu, Tarik, Sidoarjo
115	Mukhammad Abdul Mudhofar, S Pd.I.	Laki-laki	-	-	Dusun Kandangan RT 08 RW 02, Desa Banjarwungu, Tarik, Sidoarjo
116	Heri Susanto	Laki-laki	-	-	Dsn Kandangan RT 7 RW 2, Ds Banjarwungu, Tarik, Sidoarjo
117	Bambang Supriadi	Laki-laki	-	-	Dusun Klintar RT 17 RW 04, Ds Banjarwungu, Tarik, Sidoarjo
118	Andika Wahyu Syarifudin	Laki-laki	-	-	Dsn Kandangan RT 3 RW 1, Ds Banjarwungu, Tarik, Sidoarjo
119	Yannuk Tria Bakti	Laki-laki	-	-	Kaliwungu/banjarwungu
120	Leo Candra Wijaya	Laki-laki	-	-	Dsn Kandangan RT 8 RW 2, Ds Banjarwungu, Tarik, Sidoarjo
121	Pandu Irawan	Laki-laki	-	-	Dsn Kandangan RT 9 RW 2, Ds Banjarwungu, Tarik, Sidoarjo

122	Durakim	Laki-laki	-
123	Heru Ahmad Hidayat	Laki-laki	-
124	Heru Purwanto	Laki-laki	-
125	Jali	Laki-laki	-
126	Mas'Ud	Laki-laki	-
127	Moch. Soleh	Laki-laki	-
128	Saifudin	Laki-laki	-
129	Subaedi	Laki-laki	-
130	Abdul Chalim	Laki-laki	-
131	Borkat Tumpuan Marahudin	Laki-laki	-
132	Hendro Cahyono	Laki-laki	-
133	Mundrik	Laki-laki	-
134	Riyadi	Laki-laki	-
135	Rizal Isnain Malik	Laki-laki	-
136	Saiful Arif	Laki-laki	-
137	Tardi	Laki-laki	-
138	Abdul Hari	Laki-laki	-

Candipari RT 1 RW 1, Ds Candipari, Porong, Sidoarjo
Candipari RT 3 RW 1, Ds Candipari, Porong, Sidoarjo
Candipari RT 3 RW 1, Ds Candipari, Porong, Sidoarjo
Candipari RT 7 RW 3, Ds Candipari, Porong, Sidoarjo
Candipari RT 7 RW 5, Ds Candipari, Porong, Sidoarjo
Candipari RT 9 RW 4, Ds Candipari, Porong, Sidoarjo
Candipari RT 4 RW 2, Ds Candipari, Porong, Sidoarjo
Candipari RT 6 RW 3, Ds Candipari, Porong, Sidoarjo
Jl. R. Kanjeng Jimat RT 1 RW 6, Ds Gedangan, Gedangan, Sidoarjo
Jl Pahlawan No 52 RT 1 RW 1, Ds Gedangan, Gedangan, Sidoarjo
Jl. R. Kanjeng Jimat RT 1 RW 8, Ds Gedangan, Gedangan, Sidoarjo
Gedangan RT 1 RW 3, Ds Gedangan, Gedangan, Sidoarjo
JL Jenggala No 43 RT 4 RW 5, Ds Gedangan, Gedangan, Sidoarjo
Jl Wirabymi No 12 RT 1 RW 7, Ds Gedangan, Gedangan, Sidoarjo
Jl Wirabumi No 60, RT 3 RW 8, Ds Gedangan, Gedangan, Sidoarjo
Magersari RT 3 RW 6 Ds Gedangan, Gedangan, Sidoarjo
Kedemangan RT 14 RW 5, Ds Jemirahan, Jabon, Sidoarjo

139	Abdul Nasir	Laki-laki	-	-	Kademangan RT 7 RW 3, Ds Jemirahan, Jabon, Sidoarjo
140	Ach Slamet Afifudin	Laki-laki	-	-	Kademangan RT 6 RW 3, Ds Jemirahan, Jabon, Sidoarjo
141	Ahmad Subhan	Laki-laki	-	-	Jemirahan RT 2 RW 1, Ds Jemirahan, Jabon, Sidoarjo
142	Imron	Laki-laki	-	-	Jemirahan RT 3 RW 1, Ds Jemirahan, Jabon, Sidoarjo
143	Imron Rosyadi, SE	Laki-laki	-	-	Jemirahan RT 5 RW 2, Ds Jemirahan, Jabon, Sidoarjo
144	Moh Rifai	Laki-laki	-	-	Kademangan RT 6 RW 3, Ds Jemirahan, Jabon, Sidoarjo
145	Sigit Riyadi	Laki-laki	-	-	Dsn Kademangan RT 8 RW 3, Ds Jemirahan, Jabon, Sidoarjo
146	Hadi Prayitno	Laki-laki	-	-	Perum Bumi Candi Asri K3 No 2 RT 16 RW 4, Ds Ngampelsari, Candi, Sidoarjo
147	Ilman Maulana	Laki-laki	-	-	Jl. Djaman RT 01 RW 01, Ds Ngampelsari, Candi, Sidoarjo
148	Misba	Laki-laki	-	-	Ngampelsari RT 1 RW 2, Ds Ngampelsari, Candi, Sidoarjo
149	Moch Syafi'ul Chamdi	Laki-laki	-	-	Ngampelsari RT 5 RW 3, Ds Ngampelsari, Candi, Sidoarjo
150	Moh.Sandi Pradana	Laki-laki	-	-	Ngampelsari Rt 6 RW 3, Ds Ngampelsari, Candi, Sidoarjo
151	Puguh Wiyoko	Laki-laki	-	-	Ngampelsari RT 5 RW 2, Ds Ngampelsari, Candi, Sidoarjo
152	Unun Basuki Arthawijaya	Laki-laki	-	-	Perumahan Bumi Candi Asri K2/45 RT 16 RW 4, Ds Ngampelsari, Candi, Sidoarjo
153	Moh. Zaini	Laki-laki	-	-	Ngampelsari RT 6 RW 2, Ds Ngampelsari, Candi, Sidoarjo
154	Achmad Jainuri	Laki-laki	-	-	Karangnongko RT 1 RW 1, Ds Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo

155	Adzan Maulana Sabililliah	Laki-laki	-	-	Karangnongko RT 6 RW 2, Ds Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo
156	Ariek Wahyu Kriswanto	Laki-laki	-	-	Pekarungan RT 63 RW 5, Ds Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo
157	Muhammad Nur Faizin	Laki-laki	-	-	Karangnongko RT 2 RW 1, Ds Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo
158	Puguh Nugroho Yulistiardi	Laki-laki	-	-	Karangnongko RT 4 RW 2, Ds Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo
159	Purwanto	Laki-laki	-	-	Pekarungan RT 18 RW 6, Ds Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo
160	Randi Cahyono	Laki-laki	-	-	Pekarungan RT 22 RW 07, Ds Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo
161	Zusar Ramdhan Risqullah	Laki-laki	-	-	Karangnongko RT 6 RW 2, Ds Pekarungan, Sukodono, Sidoarjo
162	Ach.Slamet Eko Dayono	Laki-laki	-	-	Suwaluh RT 7 RW 2, Ds Suwaluh, Balongbendo, Sidoarjo
163	Kayadi	Laki-laki	-	-	Suwaluh Rt 12 RW 3, Ds Suwaluh, Balongbendo, Sidoarjo
164	Lalu Juanda	Laki-laki	-	-	Suwaluh Utara RT 05 RW 02, Ds Suwaluh, Balongbendo, Sidoarjo
165	Muhammad Fathurrohman Nurrosyid	Laki-laki	-	-	Suwaluh Utara RT 3 RW 1, Ds Suwaluh, Balongbendo, Sidoarjo
166	Rudi Santoso	Laki-laki	-	-	Dusun Suwaluh Utara RT 02 RW 01. Ds Suwaluh, Balongbendo, Sidoarjo
167	Sugianto	Laki-laki	-	-	Suwaluh Utara RT 05 RW 02, Ds Suwaluh, Balongbendo, Sidoarjo
168	Wahyu Budianto	Laki-laki	-	-	Suwaluh Selatan RT 14 RW 4, Ds Suwaluh, Balongbendo, Sidoarjo
169	Wastam	Laki-laki	-	-	Suwaluh Utara RT 2 RW 1, Ds Suwaluh, Balongbendo, Sidoarjo
170	Mulyono	Laki-laki	-	-	Dusun Balongampel RT 15 RW 8, Ds Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo
171	Abdul Mujib	Laki-laki	-	-	Dusun Wagir RT 6 RW 3, Ds Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo

172	Ahmad Mujahidin Mahfudz	Laki-laki	-	-	Dusun Tanjek, RT 8 RW 4, Desa Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo
173	Arif Iswanto	Laki-laki	-	-	Dsn Tanjek RT 4 RW 2, Ds Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo
174	M Alfian Aditya	Laki-laki	-	-	Dusun Rawan RT 14 RW 07, Ds Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo
175	Muchammad Ridho'i	Laki-laki	-	-	Dusun Kedungnolo RT 019 RW 010, Ds Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo
176	Muhammad Febri R.	Laki-laki	-	-	Dusun Rawan RT 14 RW 07, Ds Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo
177	Tri Wahyudi Ha Ex Saputra	Laki-laki	-	-	Dusun Rawan RT 14 RW 7, Ds Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo
178	Puji Darjo	Laki-laki	-	-	Jl Sumber Rejo RT 8 RW 2, Ds Wunut, Porong, Sidoarjo
179	Iswahyudi	Laki-laki	-	-	Dsn Kesamben RT 20 RW 4, Ds Wunut, Porong, Sidoarjo
180	Mursidi	Laki-laki	-	-	Wunut RT 6 RW 1, Ds Wunut, Porong, Sidoarjo
181	Moh Khudori	Laki-laki	-	-	Dsn Kesamben RT 10 RW 3, Ds Wunut, Porong, Sidoarjo
182	Nasrul Khabib	Laki-laki	-	-	Wunut RT 4 RW 1, Ds Wunut, Porong, Sidoarjo
183	Moh. Rudi	Laki-laki	-	-	Wunut RT 3 RW 10, Ds Wunut, Porong, Sidoarjo
184	Subagio	Laki-laki	-	-	Wunut RT 9 RW 2, Ds Wunut, Porong, Sidoarjo
185	Ikwan	Laki-laki	-	-	Wunut RT 9 RW 2, Ds Wunut, Porong, Sidoarjo

FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO . KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus					
1	2	3		4					5		6	7	8	9	10
1	M. Haris Abd Kadir	L				26			1						Perum Griya Bhayangkara, C4 No. 26, RT 04 RW 06, Masangan Kulon, Sukodono
2	Moejiboer Rachman	L					49		1						Perum Griya Bhayangkara, C4 No. 26, RT 04 RW 06, Masangan Kulon, Sukodono
3	R. Arif Jusniar	L					54		1						Jl. Argopuro No. 16, RT 02/03, Waru
4	Brissa Vilandra Anggia Jusniar		P			23			1						Jl. Argopuro No. 16, RT 02/03, Waru
5	Astin	L						61	1						Dsn. Trompo Wetan, RT 014 RW 003, Trompoasri, Jabon

6. Urusan Sosial

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI/KAB/KOTA/KEC/DESA :

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KASPUAH		Perempuan		Barengkrajan	Tinggal bersama keluarga	Lainnya			Cerai Mati		Disabilitas Mental
2	DAFFA IBNUHAFIDZ		Laki-laki		Ngingas	Tinggal bersama keluarga	Anak			Blm ditentukan		Disabilitas Fisik
3	MAUDUAH		Perempuan		Trosobo	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Cerai Mati		Disabilitas Ganda/Multi
4	LINDAWATI		Perempuan		Ganggangpanjang	Tinggal bersama keluarga	Anak			Belum Kawin		Disabilitas Sensorik Netra
5	SIDHI		Laki-laki		Kludan	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Blm ditentukan		Disabilitas Fisik
6	M AGUS SULISTIANA		Laki-laki		Suko	Tinggal bersama keluarga	Anak			Blm ditentukan		Disabilitas Mental
7	SUGIONO		Laki-laki		Mergosari	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Kawin/nikah		Disabilitas Fisik
8	ROCHMAD		Laki-laki		Kedungturi	Tinggal bersama keluarga	Lainnya			Belum Kawin		Disabilitas Fisik
9	BAMBANG HERMANTO		Laki-laki		Rejeni	Tinggal bersama keluarga	Anak			Belum Kawin		Disabilitas Sensorik Wicara
10	LAMINAH		Perempuan		Semambung	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Cerai Mati		Disabilitas Ganda/Multi
11	WINDA UFRISAH		Perempuan		Klantingsari	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Belum Kawin		Disabilitas Fisik
12	CHALIMA		Perempuan		Entalsewu	Tinggal bersama keluarga	Istri/suami			Kawin/nikah		Disabilitas Sensorik Netra

13	BAMBANG SINGKONO		Laki-laki		Kalijaten	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Belum Kawin		Disabilitas Fisik
14	RIYAYAH		Perempuan		Wonokarang	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Kawin/nikah		Disabilitas Fisik
15	SITI ROCHAYAH		Perempuan		Bakungpringgodani	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Cerai Mati		Disabilitas Fisik
16	ARIS YULIANTO		Laki-laki		Kedungrejo	Tinggal bersama keluarga	Anak			Belum Kawin		Disabilitas Ganda/Multi
17	ABAKAT		Laki-laki		Keboananom	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Cerai Mati		Disabilitas Mental
18	MUHAMMAD ADAM HALIM RAMADHAN		Laki-laki		Dukuhtengah	Tinggal bersama keluarga	Anak			Belum Kawin		Disabilitas Intelektual
19	MAHFUD		Laki-laki		Kesambi	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Blm ditentukan		Disabilitas Ganda/Multi
20	SRI YANTI		Perempuan		Sepande	Tinggal bersama keluarga	Istri/suami			Kawin/nikah		Disabilitas Fisik
21	BUDI UTOMO		Laki-laki		Segodobancang	Tinggal bersama keluarga	Anak			Belum Kawin		Disabilitas Fisik
22	SRIYATUN		Perempuan		Pejangkungan	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Blm ditentukan		Disabilitas Sensorik Netra

Lanjutan

82488	SUPARTI		Perempuan		Anggaswangi	Tinggal bersama keluarga	Istri/suami			Blm ditentukan		LANSIA
82489	KARYAWATI		Perempuan		Kebonagung	Tinggal bersama keluarga	Istri/suami			Kawin/nikah		LANSIA
82490	TAMIN		Laki-laki		Kebonagung	Tinggal bersama keluarga	Orangtua/mertua			Blm ditentukan		LANSIA
82491	MUSTOFA		Laki-laki		Kedungrawan	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Blm ditentukan		LANSIA
82492	KASNAN		Laki-laki		Kludan	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Kawin/nikah		LANSIA
82493	FARKAN		Laki-laki		Kludan	Tinggal bersama keluarga	Kepala Keluarga			Kawin/nikah		LANSIA

FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS) PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SIDOARJO	BALONGBENDO	BAKALANWRINGINPITU	2	0	6	3	0	0	201		
2	SIDOARJO	BALONGBENDO	BAKUNGPRINGGODANI	0	1	0	0	2	0	369		
3	SIDOARJO	BALONGBENDO	BAKUNGTEMENGGUNGAN	2	0	6	1	2	5	381		
4	SIDOARJO	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	0	2	1	0	197		
5	SIDOARJO	BALONGBENDO	BOGEMPINGGIR	1	0	5	1	1	0	237		
6	SIDOARJO	BALONGBENDO	GAGANGKEPUHSARI	0	0	0	0	3	0	165		
7	SIDOARJO	BALONGBENDO	JABARAN	1	2	0	0	1	0	214		
8	SIDOARJO	BALONGBENDO	JERUKLEGI	0	0	1	0	0	0	273		
9	SIDOARJO	BALONGBENDO	KEDUNGSUKODANI	0	1	0	0	0	0	289		
10	SIDOARJO	BALONGBENDO	KEMANGSEN	6	0	4	1	4	0	436		
11	SIDOARJO	BALONGBENDO	PENAMBANGAN	4	0	6	0	0	0	447		
12	SIDOARJO	BALONGBENDO	SEDURI	8	0	4	0	0	0	214		
13	SIDOARJO	BALONGBENDO	SEKETI	2	0	3	0	2	0	526		
14	SIDOARJO	BALONGBENDO	SINGKALAN	4	0	2	2	1	0	294		
15	SIDOARJO	BALONGBENDO	SUMOKEMBANGSRI	7	2	6	5	4	0	457		
16	SIDOARJO	BALONGBENDO	SUWALUH	1	1	6	2	0	43	388		
17	SIDOARJO	BALONGBENDO	WARUBERON	1	0	0	1	0	0	165		

Lanjutan

347	SIDOARJO	WONOAYU	SIMOANGIN-ANGIN	2	0	2	1	3	0	135		
-----	----------	---------	-----------------	---	---	---	---	---	---	-----	--	--

348	SIDOARJO	WONOAYU	SIMOKETAWANG	0	0	0	0	0	0	108		
349	SIDOARJO	WONOAYU	SUMBERREJO	1	0	0	1	0	0	174		
350	SIDOARJO	WONOAYU	TANGGUL	0	0	2	1	0	0	174		
351	SIDOARJO	WONOAYU	WONOAYU	2	1	1	0	0	0	195		
352	SIDOARJO	WONOAYU	WONOKALANG	3	0	9	5	7	0	235		
353	SIDOARJO	WONOAYU	WONOKASIAN	15	0	3	6	3	0	315		
	Total			1346	73	922	904	620	1185	84492		

FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kabupaten Sidoarjo	0	0	5246	0	6	0	829	0	0	0	43	0	0	0	
	Total	0	0	5246	0	6	0	829	0	0	0	43	0	0	0	

**FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN/KOTA :

NO	Jumlah Penerima Pelayanan Dasar Yang Membutuhkan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana												Kondisi Sarana Prasarana			Tingkat Kerusakan		
		Shelter/Rumah Singgah	Puskesmas	Call Center	Kendaraan Khusus Kedaruratan	Trc Ketelantaran	Dapur Umum	Ldp	Manajemen Logistik	Manajemen Shelter	Keposkoan	Ksb	Trc Bencana	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Rendah	Sedang	Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																			
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	1	1	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1		v		v		
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	1	1	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1		v		v		
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	1	1	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1		v		v		
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	1	1	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1		v		v		

	Total sarana prasarana yang ada	1	1	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	v	v		
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan	1	1	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	v	v		
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota																	
1	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota	1	1	8	2	1	6135			6135			6135				
	Total sarpras yang ada	1	1	8	2	1	1			10			3	12	2		1 1
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan						2			33							

Keterangan :

Berdasarkan Form pengumpulan data, terdapat 84.892 orang penyandang Disabilitas dan 369 orang gelandang dan pengemis di Kabupaten Sidoarjo, yang mana data by name by address sudah kami input dalam Tahapan penerapan pada website spm.bangda.kemendagri.go.id.

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Capaian Mutu Pelayanan Dasar
- b. Capaian penerima Pelayanan Dasar

Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis. Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan Indikator Kinerja. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar tertuang sebagai berikut:

TAHPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN

DASAR

Tabel

Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas		Sosial
1	2	3	4	5		6
Form 1.B.2	Form 2.B.4	Form 3.B.3	Form 4.B.3	(Penegakan Perda)		
	Form 2.B.5	Form 3.B.4	Form 4.B.4	Form 5.B.1	Form 5.B.4	Form 6.B.1
			Form 4.B.7	Form 5.B.2	Form 5.B.5	Form 6.B.2
			Form 4.B.8	Form 5.B.3		Form 6.B.3
				(Damkar)		Form 6.B.4
				Form 5.B.1	Form 5.B.4	Form 6.B.6
				Form 5.B.2	Form 5.B.5	Form 6.B.7
				Form 5.B.3		
				(Kebencanaan)		
				Form 5.B.1	Form 5.B.2	

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

1. Urusan Pendidikan

FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA :

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTU HAN	KETERSE DIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	1 Tersedianya data	Peserta didik	83819	83819	0	0	Sumber data diperoleh dari : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah?year=2025
				2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali pertahun	2 Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan	1. parenting 2. pelatihan dasar deteksi dini pencegahan stunting	1. parenting 2. pelatihan dasar deteksi dini pencegahan stunting	0	1. 39625000 2. 81950000	121575000
				3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3 Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik					
				4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu)	4 Peserta didik terlayani	Peserta didik	1. pendamping BOP PAUD/TK 2. pendamping BOP kesetaraan	1. pendamping BOP PAUD/TK 2. pendamping BOP kesetaraan	0	1. 432000000 2. 108000000	540000000

				usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran				PAUD 3. sosialisasi PAUD berkualitas	PAUD 3. sosialisasi PAUD berkualitas			
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1	4	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan	Honor Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Uang Pada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta	Honor Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Uang Pada Lembaga Satuan Pendidikan Swasta	0	54000000	54000000
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	0	670000000	670000000
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan	pendidik = 5143 tenaga kependidikan = 1766	pendidik = 5143 tenaga kependidikan = 1766	0	0	0
	2		Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	pendidik = 5143 tenaga kependidikan = 1766	pendidik = 5143 tenaga kependidikan = 1766	0	0	0	
	3		Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan	3	Ajukan formasi guru	Guru	0	0	0	0	0	

				perundang-undangan																	
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	7	Tersedianya data	Pengawas atau penilik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	1. pelatihan proyek penguatatan profil pelajar pancasila 2. pelatihan diklat dasar PAUD 3. pelatihan diklat dasar lanjutan PAUD 4. pelatihan implementasi kurikulum merdeka PAUD 5. pembukaan bimtek peningkatan kapasitas guru 6. bansos guru PAUD NF 7. bansos guru TK/RA/BA	1. pelatihan proyek penguatatan profil pelajar pancasila 2. pelatihan diklat dasar PAUD 3. pelatihan diklat dasar lanjutan PAUD 4. pelatihan implementasi kurikulum merdeka PAUD 5. pembukaan bimtek peningkatan kapasitas guru 6. bansos guru PAUD NF 7. bansos guru TK/RA/BA	0	1. 29222500 2. 57837500 3. 67145000 4. 24873900 5. 48085000 6. 12600000000 7. 15945600000	28772763900
				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan	0	0	0	0	0
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik	Putus sekolah SD = 137 SMP = 39	Putus sekolah SD = 137 SMP = 39	0	0	0

		/MTs/Paket A/Paket B)	2	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik	0	0	0	0	0
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik	0	0	0	0	0
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik	5250	5250	0	525000000	525000000
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI /MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas	KKG, MGMP, K3S, MKKS	KKG, MGMP, K3S, MKKS	0	0	0
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	1. 9074224000 2. .6259787500	15.334.011.500

			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI /MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan	1. Keg. Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SD Sederajat 2. Keg. Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SMP Sederajat	1. Keg. Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SD Sederajat 2. Keg. Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SMP Sederajat	0	1. 23833000 2. 32233000	56066000	
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan	1. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Bangunan SD 2. Monitoring dan Evaluasi Hibah uang untuk rehabilitasi sekolah SD/SMP Swasta	1. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Bangunan SD 2. Monitoring dan Evaluasi Hibah uang untuk rehabilitasi sekolah SD/SMP Swasta	0	1.12.600.000 2. 8.400.000	21000000	
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	1. 1.306.343.000 2. 1.130.132.800	2436475800	
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi	4	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan	0	0	0	0	0	0

				terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran									
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik SD = 8030 Pendidik SMP = 4082 Tendik SD = 1322 Tendik SMP = 1204	Pendidik SD = 8030 Pendidik SMP = 4082 Tendik SD = 1322 Tendik SMP = 1204	0	0	0
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik SD = 8030 Pendidik SMP = 4082 Tendik SD = 1322 Tendik SMP = 1204	Pendidik SD = 8030 Pendidik SMP = 4082 Tendik SD = 1322 Tendik SMP = 1204	0	0	0
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajukan formasi guru	Guru	1.120	0	0	0	0
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan	SD = 291 SMP = 44	SD = 291 SMP = 44	0	0	0
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan	95	95	0	0	0

			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0	0	0
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas	SD = 58 SMP = 18	SD = 12 SMP = 17	SD = 46 SMP = 1	0	0
	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	1. 9074224000 2. .6259787500	15.334.011.500	
2		Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0 pembiayaan mandiri	0	0	0	0	0	
3		Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan	Kegiatan pendidikan dan pelatihan guru penggerak dilaksanakan pusat, Dikbud Sidoarjo memfasilitasi peserta	0	0	0	0		

2. Urusan Kesehatan

a. FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BMHP (vaksin Td, tablet TTD, kartu ibu, buku KIA,	30947	30947				
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Formulir partograf	30947	30947				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	BMHP (vaksin hepatitis B, vaksin K1, salep/ tetes mata, formulir MTBM)	29176	29176				
4	Pelayanan Kesehatan Balita	BMHP (vitamin A biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi)	117736	117736				
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Form pencatatan	282660	283511				
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	BMHP (vaksin Td), kuesioner, formulir pencatatan	1391348	1466121				

7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	BMHP (strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol)	266597	270657				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Obat Hipertensi	156726	166730				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Obat Diabetes Melitus	69784	71209				
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa, formulir skrining kesehatan jiwa	31	31				
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Katrid tes cepat molekuler	28250	28250				
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	34098	34098				

b. FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi	1349	1349	0	terpenuhi
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi	1349	1349	0	terpenuhi
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, promkes	1382	1382	0	terpenuhi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter, perawat, bidan, tenaga gizi	1254	1254	0	terpenuhi
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, promkes	1382	1382	0	terpenuhi
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, kesmas	1287	1287	0	terpenuhi
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, kesmas	1287	1287	0	terpenuhi
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, promkes	1382	1382	0	terpenuhi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, promkes	1382	1382	0	terpenuhi
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dokter	174	174	0	terpenuhi
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Dokter, perawat, skm, tenaga kefarmasian	815	815	0	terpenuhi
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter, perawat, bidan, tenaga kesmas	1234	1234	0	terpenuhi

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM

NO.	NO SAMBUNGAN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	JP
1		2	3	4	5	6		8	9	10	11
1	01/I /003/0095/2D	SIDOARJO	PUCANG			S.SOEPENO					1
2	01/I /003/0096/3F	SIDOARJO	PUCANG			HOLLY EKO CAHYONO					1
3	01/I /003/0097/2D	SIDOARJO	PUCANG			H.M.ALI ROIS					1
4	01/I /003/0098/2D	SIDOARJO	PUCANG			CORNELIS MANTAUW					1
5	01/I /003/0100/2D	SIDOARJO	PUCANG			KOESNO					1
6	01/I /003/0101/2D	SIDOARJO	PUCANG			PERUM.DOLOG					1
7	01/I /003/0102/2D	SIDOARJO	PUCANG			IR. SUHARYOKO					1
8	01/I /003/0104/2D	SIDOARJO	PUCANG			KUNTOYO					1
9	01/I /003/0105/2D	SIDOARJO	PUCANG			NURMAN					1
10	01/I /003/0106/2D	SIDOARJO	PUCANG			SUKARDI					1
11	01/I /003/0107/2D	SIDOARJO	PUCANG			YETTI BUDIYATI					1
12	01/I /003/0108/2D	SIDOARJO	PUCANG			HADI CAHYONO					1
13	01/I /003/0110/2D	SIDOARJO	PUCANG			BAMBANG SETYADI					1

14	01/I /003/0111/2D	SIDOARJO	PUCANG			IR. SUHARYOKO					1
15	01/I /003/0112/2D	SIDOARJO	PUCANG			SUKANDAR					1
16	01/I /003/0113/2D	SIDOARJO	PUCANG			SALIM					1
17	01/I /003/0114/2D	SIDOARJO	PUCANG			ACHMAD CHUMAIDI					1
18	01/I /003/0115/3D	SIDOARJO	PUCANG			RUBIANTO					1
19	01/I /003/0116/2D	SIDOARJO	PUCANG			LUCKY HARIAWAN					1
20	01/I /003/0117/2D	SIDOARJO	PUCANG			KURNIADI ASTUTI					1
21	01/I /003/0118/2D	SIDOARJO	PUCANG			H.M.MANSYUR					1
22	01/I /003/0119/2D	SIDOARJO	PUCANG			DRS.IMANUAL					1
23	01/I /003/0120/2D	SIDOARJO	PUCANG			SYAHRONI					1
24	01/I /003/0121/2D	SIDOARJO	PUCANG			LAILA ROSIDA					1
25	01/I /003/0122/2D	SIDOARJO	PUCANG			ACHMAD CHOLIS HAMZAH					1
26	01/I /003/0123/2D	SIDOARJO	PUCANG			M.AWAH A.S					1
27	01/I /003/0124/2D	SIDOARJO	PUCANG			DRS.HERMANI D.A					1
28	01/I /003/0126/2D	SIDOARJO	PUCANG			DODIT KUSWANTO					1
29	01/I /003/0127/2D	SIDOARJO	PUCANG			AHMAD					1
30	01/I /003/0128/2D	SIDOARJO	PUCANG			RUDIYANTO					1

31	01/I /003/0129/2D	SIDOARJO	PUCANG			SYAMSUL HIDAYAT					1
32	01/I /003/0131/2D	SIDOARJO	PUCANG			SLAMET.B					1
33	01/I /003/0132/2D	SIDOARJO	PUCANG			IR.SENTOT HARI.W					1
34	01/I /003/0134/2D	SIDOARJO	PUCANG			PURWO SUSILO					1
35	01/I /003/0135/2D	SIDOARJO	PUCANG			MUSLICH					1
36	01/I /003/0137/2D	SIDOARJO	PUCANG			MARDJUKI					1
37	01/I /003/0138/2D	SIDOARJO	PUCANG			HEDI UTOMO					1
38	01/I /003/0139/2D	SIDOARJO	PUCANG			NENENG HERMAWATI					1
39	01/I /003/0141/2D	SIDOARJO	PUCANG			SLAMET GUNARI					1
40	01/I /003/0142/2D	SIDOARJO	PUCANG			DJOKO PRASODJO					1
41	01/I /003/0143/2D	SIDOARJO	PUCANG			GATOT HERI SUTOPO					1
42	01/I /003/0144/2D	SIDOARJO	PUCANG			M.KABUL					1
43	01/I /003/0145/2D	SIDOARJO	PUCANG			BIMADJI					1
44	01/I /003/0148/2D	SIDOARJO	PUCANG			WASPODO					1
45	01/I /003/0149/2D	SIDOARJO	PUCANG			GATOT SOEMARTONO					1
46	01/I /003/0150/2D	SIDOARJO	PUCANG			HARI SUBAGIO					1
47	01/I /003/0151/2D	SIDOARJO	PUCANG			SABAR HUSAIN					1

48	01/I /003/0152/2D	SIDOARJO	PUCANG			KAMTO					1
49	01/I /003/0153/2D	SIDOARJO	PUCANG			DIAN MUNHAR BUDIARSO					1
50	01/I /003/0155/2D	SIDOARJO	PUCANG			BUDI SANTOSO					1
51	01/I /003/0156/2D	SIDOARJO	PUCANG			GATOT SUMITRO					1
52	01/I /003/0157/2D	SIDOARJO	PUCANG			BAMBANG RUSMAWAN					1
53	01/I /003/0158/2D	SIDOARJO	PUCANG			BUDI PRASITO					1
54	01/I /003/0159/2D	SIDOARJO	PUCANG			MUCHOLIS.BSC					1
55	01/I /003/0160/2D	SIDOARJO	PUCANG			MAS SUDIONO					1
56	01/I /003/0161/2D	SIDOARJO	PUCANG			ARIFIN HASANUSI					1
57	01/I /003/0162/2D	SIDOARJO	PUCANG			KOERMEN					1
58	01/I /003/0164/2D	SIDOARJO	PUCANG			NY.SOENARDI					1
59	01/I /003/0166/2D	SIDOARJO	PUCANG			DJUMADI					1
60	01/I /003/0167/2D	SIDOARJO	PUCANG			MUDJIMAN					1
61	01/I /003/0168/2D	SIDOARJO	PUCANG			HARI PUDJIATI					1
62	01/I /003/0170/2D	SIDOARJO	PUCANG			RUDIYANTO					1
63	01/I /003/0171/2D	SIDOARJO	PUCANG			KUNEDI					1
64	01/I /003/0172/2D	SIDOARJO	PUCANG			DJOKO WIDODO					1

65	01/I /003/0173/2D	SIDOARJO	PUCANG			ALI BUDI PRANOTO						1
66	01/I /003/0175/3F	SIDOARJO	PUCANG			PT SEKAR MULIA II						1
67	01/I /003/0176/2D	SIDOARJO	PUCANG			DJOKO SUYONO						1
68	01/I /003/0179/3B	SIDOARJO	PUCANG			DRG.H.ACH.MUFID						1
69	01/I /003/0180/3D	SIDOARJO	PUCANG			IVAN CHISANTO						1
70	01/I /002/0001/2D	SIDOARJO	PUCANG			SOETJIPTO						1
71	01/I /002/0002/2D	SIDOARJO	PUCANG			IVA EVRY ROBIYANSAH						1
72	01/I /002/0003/2D	SIDOARJO	PUCANG			RICKYANTO						1
73	01/I /002/0004/2D	SIDOARJO	PUCANG			DRS.EC.SUHERI						1
74	01/I /002/0006/2D	SIDOARJO	PUCANG			SAYID BASRI						1
75	01/I /002/0007/2D	SIDOARJO	PUCANG			ACHMAD SLAMET HADI S						1

Keterangan :

Sebanyak 191.067 sambungan rumah telah difasilitasi Jaringan Perpipaan, dan sebanyak 562.300 menggunakan Jaringan Non Perpipaan sehingga sejumlah 753.367 rumah telah mendapatkan Akses air bersih di kabupaten sidoarjo, adapun untuk data rincian by name by address sudah kami upload dalam website spm.bangda.kemendagri.go.id

b. Form 3.B.4

Form 3.B.4 merupakan kondisi SPALD. Data tersebut terdiri dari nama SPALD, lokasi SPALD, kondisi SPALD regional (beroperasi/ tidak beroperasi), wilayah pelayanan yang terdiri dari kecamatan dan kelurahan/desa, akses yang terdiri dari tersedia dan termanfaatkan. Pada saat ini belum dilaksanakan pendataan terhadap kondisi SPALD yang ada di kabupaten Sidoarjo oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sidoarjo.

3. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No.	Jenis Bencana	Tahun Terjadinya Bencana	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Status Kepemilikan Rumah	Kegiatan Pelayanan Yang Akan Diberikan	Belum Terlayani	Rencana Tahun Pemenuhan Spm	Status Kepemilikan Rumah	Kegiatan Pelayanan Yang Akan Diberikan	Belum Terlayani	Rencana Tahun Pemenuhan Spm	Pembangunan Kembali	Subsidi Uang Sewa	Relokasi/ Pembangunan				
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Milik	Milik	Sewa	Lainnya	Rehabilitasi							
1	2	3	4	5	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Angin Kencang, Puting beliung	2025	Tulangan	Singopadu	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	-		
		Tulangan	Kemantren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	
		Tulangan	Kepadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	
		Tulangan	Kepatihah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	34	-	-	
		Tulangan	Gelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26	-	-	
		Tulangan	Jiken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	
		Prambon	Kedungkembar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-	
		Kremlung	Wonolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		Kremlung	Wangkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11	-	-	
		Kremlung	Tanjekwagir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	-	-	
		Kremlung	Ploso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sidoarjo	Gebang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	
		Candi	Sugihwaras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		Sidoarjo	Blurukidul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	
		Sidoarjo	Bulusidokare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	
		Porong	Pesawahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	
		Porong	Kedungboto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tanggulangin	Banjarpanji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sidoarjo	Blurukidul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-
		Prambon	Simpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prambon	Simogirang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-
		Wonorejo	Semambung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	19	-	-
		Sidoarjo	Sekardangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tanggulangin	Kedungbanteng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	-	-		
Prambon	Kedungwonokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	33	-	-		
Prambon	Bendotretrek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-		
Tarik	Kalimati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	60	-	-		

b. Form 4.B.4

Form 4.B.4 merupakan penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana. Data tersebut terdiri dari kegiatan, komponen biaya, dan perhitungan biaya. Tidak ada data perhitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni pada Tahun 2023.

c. FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH	STATUS KEPEMILIKAN RUMAH	KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN
									MBR	NON MBR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tidak terdapat lahan yang potensial sebagai tempat relokasi, dan juga tidak terdapat kawasan yang berpotensi untuk di relokasi.. Karena kawasan disidoarjo rata-rata sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Adapun ada program RTLH, hanya bentuk rehabilitasi, tidak sampai di relokasi													

d. Form 4.B.8

Form 4.B.8 merupakan penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program. Data tersebut terdiri dari kegiatan, komponen biaya dan perhitungan biaya. Pada Tahun 2023 di Kabupaten Sidoarjo tidak ada penghitungan kebutuhan biaya layanan

pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program relokasi karena tidak ada program.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Ketentraman dan Ketertiban

a. FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP			Saat ini Satpol PP Belum melakukan penghitungan kebutuhan penerima layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)			
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP			
4		Pelayanan Perbaikan Materil			
5		Pelayanan Pengobatan			
6		Kebutuhan lainnya			

b. FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP	HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP	
1	2	3	4	6
1	Petunjukan teknis SOP penegakan peraturan daerah	masing menggunakan SOP 2021	107.068.895	107.068.895
2	Petunjukn teknis SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	masing menggunakan SOP 2021		
3	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	masing menggunakan SOP 2021		
4	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting	masing menggunakan SOP 2021		
5	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting	masing menggunakan SOP 2021		
6	Petunjuk Teknis SOP pelaksanaan operasional patroli	masing menggunakan SOP 202		
7	Tata cara pelaksanaan operasional penyidik pegawai negeri sipil daerah dalam penegakan peraturan daerah	masing menggunakan SOP 2021		

c. FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP,
PPNS, SATLINMAS

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	267			417,394,240	22						

d. FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7
A	Gedung Kantor	1	1	0	-	-
1	ruang kerja pimpinan dan staf;	1	1	0	-	-
2	ruang pos jaga;	1	1	0	-	-
3	ruang rapat;	1	1	0	-	-
4	ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;	1	1	0	-	-
5	ruang penyimpanan barang/gudang;	1	1	0	-	-
6	ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;	1	1	0	-	-
7	ruang sidang majelis kode etik;	1	1	0	-	-
8	tempat apel/upacara; dan	1	1	0	-	-
9	halaman parkir.	1	1	0	-	-
B	Kendaraan operasional Satpol PP				-	-
10	sepeda motor	108	108	0	-	-
11	jenis offroad/jeep / Pamwal	1	1	0	-	-
12	Mini Bus atau Van	11	11	0	-	-
13	Truk kecil	12	12	0	-	-
14	Truk sedang	3	3	0	-	-
15	truk besar	6	6	0	-	-
16	kendaraan lain	4	4	0	-	-
C	Perlengkapan Operasional				-	-
I	Perorangan			0	-	-
17	pakaian dinas;	291	291	0	-	-
18	tonfa dan holster tonfa;	-	1	0	-	-
19	borgol;	25	25	0	-	-
20	tameng;	40	40	0	-	-
21	senter;	25	25	0	-	-
22	ferplas;	6	6	0	-	-
23	tas atau ransel;	10	10	0	-	-
24	sleeping bag;	3	3	0	-	-

25	jaket;	291	291	0	-	
26	rompi/body protector; dan	100	100	0	-	
27	masker.	291	291	0	-	
II	Perlengkapan Beregu				-	
28	Matras	30	30	0	-	
29	Tenda Peleton	1	1	0	-	
30	peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi	-	1	0	-	
31	Telepon	1	1	0	-	
32	RIG	1	1	0	-	
33	Handy Talky	20	20	0	-	
34	Repeater	2	2	0	-	
35	GPS	-	1	0	-	
3	PICK UP	10	15	5	200.000.000	1.000.000.000
4	SEPEDA MOTOR	17	20	3	15.000.000	45.000.000

e. FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA
YANG TERKENA DAMPAK

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

C. Kebencanaan**a. FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN (x Rp.1000)	KEBUTUHAN BIAYA (x Rp.1000)	
							WARGA NEGERA	KK	APARAT/PETUGAS	DESA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12-13	15	16 = 14 x 15	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan KRB	BPBD	Dokumen KRB	Paket					10	6	4,00	15.000.000	60.000.000	
			Dikusi Publik terhadap dokumen KRB yang telah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	BPBD	Legalitas Dokumen KRB	Paket						10	6	4,00	15.000.000	60.000.000
			Laporan Efektivitas Pemanfaatan KRB			Paket						10	6	4,00	15.000.000	60.000.000
2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Penyediaan Tenaga Ahli yang Kompeten dalam Penyusunan Dokumen RPB	BPBD	Dokumen RPB	Paket					10	6	4,00	15.000.000	60.000.000	
			Diskusi Publik terhadap	BPBD	Legalitas	Paket						10	6	4,00	15.000.000	60.000.000

		dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal		Dokumen RPB															
				Laporan Efektivitas Pemanfaatan RPB	Paket								10	6	4,00	15.000.000	60.000.000		
	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Penyediaan Tenaga Ahli yang Kompeten dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi	BPBD	Dokumen Renkon	Paket								10	6	4,00	15.000.000	60.000.000		
		Diskusi Publik terhadap Dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	BPBD	Legalitas Dokumen Renkon	Paket								10	6	4,00	15.000.000	60.000.000		
				Laporan Efektivitas Pemanfaatan Renkon	Paket								10	6	4,00	15.000.000	60.000.000		

b. Form 5.B.2

Form 5.B.2 merupakan penghitungan kebutuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Data tersebut terdiri dari jenis pelayanan dasar, sub kegiatan, komponen perhitungan kebutuhan SPM sub urusan bencana, sasaran penerima SPM sub urusan bencana, keluaran, satuan, status darurat bencana yang terdiri

dari target kebutuhan, ketersediaan, usulan pemenuhan, harga satuan, dan jumlah biaya, total kebutuhan yang terdiri dari fisik dan anggaran.

B. Kebakaran

a. FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar	6	A*B*C	0
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	0		
			C. Harga satu unit	2,000,000,000		
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	2	(A*B)*C	50,000,000
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	25,000,000		
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	2	(A*B)*C	49,970,000
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1,900		

			C. Harga per liter bahan bakar	13150		
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>)	10	A*B	140,501,500
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit	14,050,150		
3	Kesiapan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	35	A*B	0
			B. Honorarium piket jaga	-		
		2. Pelaksanaan penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	35	A*B	0
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan	-		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas	35	(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan	0		0
C. Biaya per pelatihan	8,000,000					

b. FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos	6	A*B*C	0
			B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar	2.166666667		
			C. Harga satu unit	-		
		2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	13	A*B*C	235,000,000
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	1		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	18,076,923		
		3. Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	13	(A*B)*C	202,020,000
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	2,220		

			C. Harga per liter bahan bakar	7000		
		4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas	5	(A*B)*C	50,000,000
			B. Jumlah pelatihan	1		
			C. Biaya per pelatihan	10,000,000		
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	11	A*B	329,209,100
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	29,928,100		
		2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas	31	A*B	151,009,370
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	4,871,270		
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman	0	A*B	0
			B. Harga per jumlah/volume	15,000,000		
		2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air	0	(A*B)*C	0
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun	1		
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit	4,000,000		

4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	184	A*B	0
			B. honorarium piket jaga	-		
		2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	184	A*B	0
			A. honorarium per kejadian kebakaran	-		

c. FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar	6	A*B*C	0
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	0		
			C. Harga satu unit	2,000,000,000		
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	2	(A*B)*C	50,000,000
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	25,000,000		
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	2	(A*B)*C	49,970,000
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1,900		
			C. Harga per liter bahan bakar	13150		
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>)	10	A*B	140,501,500
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit	14,050,150		
3	Kesiapan petugas	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	35	A*B	0
			B. Honorarium piket jaga	-		

	penyelamatan (<i>rescue</i>)	2. Pelaksanaan penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	35	A*B	0
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan	-		
	3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas	35	(A*B)*C		
		B. Jumlah pelatihan	0		0	
		C. Biaya per pelatihan	8,000,000			

d. FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi	10	A*B	0
			B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi	-		
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan	1	A*B	139,690,840

	masyarakat relawan kebakaran	masyarakat relawan kebakaran	B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan	139,690,840		
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKI)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar	-	A*B	0
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi	2,500,000		
		2. Penyediaan Sarana satlakar	A. Jumlah satlakar	0	(A*B)*C	
			B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar	1		0
			C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket	10,000,000		
		3. Pembinaan operasionalisasi satlakar	A. Jumlah satlakar	15	A*B	0
			B. Biaya per kegiatan satlakar	-		

e. FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli	-	$((A*B*C*D)+(E*F))$	0
			B. Jenis potensi risiko	3		
			C. Jumlah orang	10		
			D. Jumlah bulan kerja	12		
			E. Jumlah pertemuan	-		
			F. Atk dan penggandaan laporan	1,000,000		
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana Induk sistem proteksi kebakaran	A. Jenis tenaga ahli	-	$((A*B*C)+(D*E))$	0
			B. Jumlah orang	8		
			C. Jumlah bulan kerja	12		
			D. Jumlah pertemuan	-		
			E. Atk dan penggandaan laporan	1,000,000		
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	A. Jenis tenaga ahli	-	$((A*B*C)+(D*E))$	0
			B. Jumlah orang	15		
			C. Jumlah bulan kerja	12		
			D. Jumlah pertemuan	-		
			E. Atk dan penggandaan laporan	1,000,000		
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana Induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i>	-	$((A+B+C)+((D+E)*F+((D+G)*H)+I)$	0
			B. Penyediaan peralatan pendukung (<i>infocus, layar, computer set</i>)	-		
			C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi	-		
			D. Akomodasi dan konsumsi	10,000,000		

			E. Transport peserta	1,000,000		
			F. Jumlah peserta	-		
			G. Honor tenaga ahli	2,000,000		
			H. Jumlah tenaga ahli laporan	-		
			I. Laporan	-		
		5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran	5	(A*B*C)+D	
			B. Jumlah petugas pendataan	5		0
			C. Honorarium petugas pendataan	-		
			D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan	-		
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung	1	(A*B)*C	
			B. Jumlah petugas	186		0
			C. Biaya per kegiatan	-		
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung	1	(A*B)*C	
			B. Jumlah petugas	186		0
			C. Biaya per kegiatan	-		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah petugas	186	(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan	186		0
			C. Biaya per pelatihan	-		
3	Investigasi pasca kebakaran	4. Inventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas	186	(A*B)*C	
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung	1		0
			C. Biaya kegiatan	-		
		5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas	3	A*B*C*D	
			B. Frekuensi investigasi	10		0
			C. Jumlah sarana pendukung	1		
			D. Biaya per kegiatan investigasi	-		

6. Urusan Sosial

a. Form 6.B.6

Form 6.B.6 merupakan penghitungan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan/pengemis di luar panti. Data tersebut terdiri dari jenis layanan, penerima layanan, standar layanan, indikator SPM, target/pemenuhan SPM, komponen biaya dan perhitungan.

b. Form 6.B.7

Form 6.B.7 merupakan penghitungan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota. Data tersebut terdiri dari jenis layanan, penerima layanan, standar layanan, indikator SPM, target/pemenuhan SPM, komponen biaya, perhitungan, dan data yang dibutuhkan.

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. OPD memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam rencana strategis (renstra) OPD dan rencana kerja (renja) OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen renja OPD dilakukan pada saat perumusan meliputi: hasil evaluasi renja OPD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; tujuan dan sasaran OPD, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan OPD dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan renja dan pendanaan OPD, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. Bappeda memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, renstra OPD, RKPD dan renja OPD.

OPD memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, renstra OPD, RKPD dan renja OPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar tercantum dalam APBD. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan, didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar.

Tabel

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas		Sosial
1	2	3	4	5		6
Form 1.C.2	Form 2.C.3	Form 3.C.3	Form 4.C.2	(Penegakan Perda)		
	Form 2.C.4	Form 3.C.4	Form 4.C.4	Form 5.C.2	Form 5.C.4	
					Form 5.C.6	
				(Damkar)		
				Form 5.C.1		
				(Kebencanaan)		
				Form 5.C.1	Form 5.C.2	

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

1. Urusan Pendidikan

a. FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

NO	PROG RAM	OUT COM E	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024
										2020			2021			2022			2023			2024			
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pendataan dari aplikasi dapodik	
				2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	207.261.245	207.261.245	1. parenting 2. pelatihan dasar deteksi dini pencegahan stunting	1.39625000 2.81950000	121575000	121575000		
				3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	324.000.000	324.000.000	1. pendampingan BOP PAUD /TK 2. pendampingan BOP kesetaraan	1.432000000 2.108000000	540000000	540000000		
				4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp. 690.000/ siswa/tahun	41.654.880.000	41.654.880.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	3402900000	3402900000	3402900000		
				5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Progam SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedia Data	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5250	525.000.000	525.000.000	5250	0	0	0	525.000.000	525.000.000	
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terseleenggara komunitas belajar	Unit komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NO	PROGRAM	UTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENTASAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DAN	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2024		
												2020			2021			2022			2023			2024			
												TARGET	HARGA SATU	Rp (JU)	TARG	HARGA SATUA	Rp (JUTA)	TARGE	HARGA SATUA	Rp (JUTA)	TARG	HAR GA SAT	Rp (JUTA)	TAR	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
							N (2019)	(2019)			A N (JUTA)	T A)	E T	N (JUTA)			N (JUTA)		UA N (JUTA)						
			hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MTs/Paket A/Paket B)	2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guru SD = 1500 16620 Guru SMP = 1500	SD = 16620 6800 SMP = 490000000	SD = 16620 6800 SMP = 490000000	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. 9074224000 2. 6259787500	#####	15.394.511.500
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SD Sederajat 2. Kegiatan Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SMP Sederajat	1. 23833000 2. 32233000	56.066.000	56.066.000
			Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.625.000	10.625.000	1. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Bangunan SD 2. Monitoring dan Evaluasi Hibah untuk rehabilitasi sekolah	1. 1.306.343.000 2. 1.150.132.800	21.000.000	21.000.000	

																				h SD/S MP Swasta					
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Tersele nggara nya Pemeli haran dan perbaik an	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 ruang	#### ####	20.480.421.89 0	1. Rehabi litasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekola h 2. Belanj a Hibah kepada Badan, Lemba ga, Organi sasi Kemas yarakat an yang Berhad an Hukum Indone sia	1. 1.306.343.000 2. 1.130.132.800	#####	2.436.475.800
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Tersele nggara nya Sosiali sasi	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26.85 0.000	26.850.000	0	0	0	0
Peme nuhan jumlah pendi dik dan tenaga kepen didika n (SD/S MP/P aket		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedi anya Data	Pendidik dan tenaga kependi dikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	2	Distrib usi	Pendidik dan tenaga kependi dikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A/Paket B)	untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan																		Tendik SD = 1322 Tendik SMP = 1204				
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajukan formasi guru	Guru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1120	0	0	0
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SD = 291 SMP = 44	0	0	0
	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SD = 58 SMP = 18	0	0	0
	Peningkatan kualitas pendidik	1	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Guru SD = 1500 Guru SMP = 1500 SD = 16620 SMP = 490000000 SD = 166206800 SMP = 490000000	1. Peningkatan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik	1.9074224000 2.6259787500	#####	15.394.511.500

2. Urusan Kesehatan

a. FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA

NO.	KODE *)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp					
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12							
1	1					Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar																						
	1	02				Urusan pemerintahan bidang kesehatan																						
	1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	1. AKI	59,69 per 100.000 KH	51,8 per 100.000 KH	1.755.089.250	51,15 per 100.000 KH	1.930.598.175	50,5 per 100.000 KH	2.123.657.993	49,85 per 100.000 KH	2.336.023.792	49,2 per 100.000 KH	2.569.626.171	49,2 per 100.000 KH								Dinas Kesehatan	
							2. AKB	3,01 per 1.000 KH	3,53 per 1.000 KH	319.311.840	3,4 per 1.000 KH	351.243.024	3,27 per 1.000 KH	386.367.326	3,13 per 1.000 KH	425.004.059	3 per 1.000 KH	467.504.465	3 per 1.000 KH								Dinas Kesehatan	
							3. Persentase balita stunting	7,6	7,64	8.992.981.680	7,54	9.892.279.848	7,44	10.881.507.833	7,34	11.969.658.616	7,24	13.166.624.478	7,24								Dinas Kesehatan	
							4. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67,59	100	28.112.500	100	30.923.750	100	34.016.125	100	37.417.738	100	41.159.511	100								Dinas Kesehatan	
							5. Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai standar	100	100	4.018.055.096	100	4.419.860.606	100	4.861.846.666	100	5.348.031.333	100	5.882.834.466	100								Dinas Kesehatan	

**b. FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN
DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS**

NO.	KODE *)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
	1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
	1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	1. AKI	59,69 per 100.000 KH	51,8 per 100.000 KH	51,15 per 100.000 KH	50,5 per 100.000 KH	49,85 per 100.000 KH	49,2 per 100.000 KH	49,2 per 100.000 KH			49,2 per 100.000 KH		Dinas Kesehatan		
							2. AKB	3,01 per 1.000 KH	3,53 per 1.000 KH	3,4 per 1.000 KH	3,27 per 1.000 KH	3,13 per 1.000 KH	3 per 1.000 KH	3 per 1.000 KH			3 per 1.000 KH		Dinas Kesehatan		
							3. Persentase balita stunting	7,6	7,64	7,54	7,44	7,34	7,24	7,24			7,24		Dinas Kesehatan		
							4. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67,59	100	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan		
							5. Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan tidak langsung yang dilaksanakan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan		
	1	02	02	2.02		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Persentase balita stunting yang ditangani (TB/U atau PB/U)	100	100	100	100	100	100			100			Dinas Kesehatan		
							2. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	90,13											Dinas Kesehatan		
							3. Persentase populasi usia 15-59 tahun yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM;	82	100	100	100	100	100	100			100		Dinas Kesehatan		
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36887	38.009	38.650	38.966	39.246	39.246	39.246			39.246		Dinas Kesehatan		

	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35207	36.282		36.893		37.195		37.462		37.462		37.462		Dinas Kesehatan		
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34569	34.554		35.136		35.424		35.679		35.679		35.679		35.679		Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141896	143.199		145.752		147.194		148.632		148.632		148.632		148.632		Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216798	308.187		307.910		307.910		307.910		307.910		307.910		307.910		Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1316764	1.598.906		1.635.092		1.652.073		1.668.019		1.668.019		1.668.019		1.668.019		Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191016	208.456		230.081		241.240		252.651		252.651		252.651		252.651		Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	392149	589.521		598.722		607.753		616.535		616.535		616.535		616.535		Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64098	77.136		78.336		79.521		80.666		80.666		80.666		80.666		Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3886	3.299		3.345		3.392		3.438		3.438		3.438		3.438		Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11520	27.554		27.949		28.338		28.729		28.729		28.729		28.729		Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang beresiko HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28996	52.583		52.990		53.378		53.731		53.731		53.731		53.731		Dinas Kesehatan

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
2	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	47,17	%	Kabupaten Sidoarjo	12.420.193.225	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	47,17	%	Kabupaten Sidoarjo	12.420.193.225	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		SUB KEGIATAN					
	APBD	Penambahan jaringan distribusi di kecamatan Sedati, Gedangan, Sidoarjo, Porong, Waru.					
	DAK	Penambahan jaringan distribusi di desa Punggul, Larangan, Balongdowo, Kedungsolo, Kedungcangkring sampai Pangreh.					Dinas P2CKTR
	PDAM	Penambahan SR = 1899					Perumda Delta Tirta

b. Form 3.C.4

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA : SIDOARJO

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1		3	4	5	6	7		8
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	99,34	%	Kabupaten Sidoarjo	31.676.607.303	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	99,34	%	Kabupaten Sidoarjo	31.676.607.303	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
1	Rehabilitasi		680000000	680000000									
2	Pembangunan kembali												
3	Penyediaan rumah relokasi												
	a. Pengadaan lahan												
	b. Pembangunan baru												
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana												
Jumlah *)													

FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Subsidi uang sewa					
3	Penyediaan rumah layak huni	0	0	680000000	-	-
Jumlah *)						

5. UrusanTrantibumlinmas**a. FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB
URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN**

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Rp1,055,136,578.00	APBD	100
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Rp454,550,000.00	APBD	100

				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	Rp110,000,000.00	APBD	100
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	Rp1,552,994,800.00	APBD	100

				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	Rp8,225,313,021.00	APBD	100
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	Rp988,810,000.00	APBD DAN DBHCHT	100
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	Rp1,874,293,325.00	APBD DAN DBHCHT	100

			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	Rp133,517,200.00	APBD	100
--	--	--	---	--	--	---------	------------------	------	-----

b. FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlatih dan terkukuhkann ya satlinmas	Orang	454550000	APBD	417,394,240
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Laporan	133517200	APBD	417,394,240

c. FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Handy Talky (HT) Handy Talky (HT)	Unit	154,512,000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Unit Handy Talky (HT) baru
2	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Handy Talky (HT) Handy Talky (HT)	Unit	66,955,200	[DANA KHUSUS] - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13 Unit Handy Talky (HT) baru

3. Kebencanaan

a. FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				Jumlah Sasaran Pemenuhan (Tahun Sebelumnya)	Alokasi Anggaran (Tahun Sebelumnya)	Sumber Dana	TARGET KINERJA															KONDISI AKHIR 5 TAHUN	
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/PETUGAS	DESA				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)
														Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15X16	18	19	20=18X19	21	22	23=21X22	24	25	26=24X25	27	28	29=27X28	30 = 15 + 18 + 21 + 24 + 27	31 = 17 + 20 + 23 + 26 + 29
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan KRB	BPBD	Dokumen KRB	Paket					4	60.000.000	APBD	4	-	-	6	15.000.000	90.000.000	8	15.000.000	120.000.000	10	15.000.000	150.000.000	12	15.000.000	180.000.000	40	540.000.000
			Diksi Publik terhadap dokumen KRB yang telah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	BPBD	Legalisasi Dokumen KRB	Paket					4	60.000.000	APBD	4	-	-	6	15.000.000	90.000.000	8	15.000.000	120.000.000	10	15.000.000	150.000.000	12	15.000.000	180.000.000	40	540.000.000
						Paket					4	60.000.000	APBD	4	-	-	6	15.000.000	90.000.000	8	15.000.000	120.000.000	10	15.000.000	150.000.000	12	15.000.000	180.000.000	40	540.000.000

2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Penyusunan Rencana Pengulangan Rencana	Penyediaan Tenaga Ahli yang Kompeten dalam Penyusunan Dokumen RPB	BPBD	Dokumen RPB	Paket					4	60.000.000	APBD	4	-	-	6	15.000.000	90.000.000	8	15.000.000	120.000.000	10	15.000.000	150.000.000	12	15.000.000	180.000.000	40	540.000.000	
			Diskusi Publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/leg al	BPBD	Legalisasi Dokumen RPB	Paket						4	60.000.000	APBD	4	-	-	6	15.000.000	90.000.000	8	15.000.000	120.000.000	10	15.000.000	150.000.000	12	15.000.000	180.000.000	40	540.000.000
			Laporan Efektivitas Pemanfaatan RPB		Paket							4	60.000.000	APBD	4	-	-	6	15.000.000	90.000.000	8	15.000.000	120.000.000	10	15.000.000	150.000.000	12	15.000.000	180.000.000	40	540.000.000
			Pembuatan Rencana Kontinjensi (Rencana Kontinjensi)	BPBD	Dokumen Renkon	Paket						4	60.000.000	APBD	4	-	-	6	15.000.000	90.000.000	8	15.000.000	120.000.000	10	15.000.000	150.000.000	12	15.000.000	180.000.000	40	540.000.000
			Diskusi Publik terhadap Dokumen Rencana Kontinj	BPBD	Legalisasi Dokumen Renkon	Paket						4	60.000.000	APBD	4	-	-	6	15.000.000	90.000.000	8	15.000.000	120.000.000	10	15.000.000	150.000.000	12	15.000.000	180.000.000	40	540.000.000

			ensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/leg al	Lap oran Efek tivitas Pem anifa tan Ren kon	Paket					4	60.000.00 0	APBD	4	-	-	6	15.000 .000	90.000. 000	8	15.000. 000	120.0 00.00 0	10	15. 00 0.0 00	150. 000. 000	12	15.00 0.000	180. 000. 000	40	540.000.000
--	--	--	--	---	-------	--	--	--	--	---	-------------	------	---	---	---	---	-------------	-------------	---	-------------	---------------	----	---------------	---------------	----	-------------	---------------	----	-------------

b. FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

N O.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA															KONDISI AKHIR 5 TAHUN				
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/PETUGAS	DESA				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Targ et	Jumlah Biaya (xRp.10 00)			
														Targ et	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Targ et	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Targ et	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Targ et	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Targ et	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15 X16	18	19	20=18 X19	21	22	23=21 X22	24	25	26=24 X25	27	28	29=27 X28	30 = 15 + 18 + 21 + 24 + 27	31 = 17 + 20 + 23 + 26 + 29			
4	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/W abah Zoonosis Prioritas	Investigasi/peny elidikan epidemiologi terpadu/ wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium	Pusdalops	Jumlah Petugas TRC KLB yang ditugaskan	Ora ng Hari																											
					Dokumen Laporan investigasi epidemiologi terpadu/ wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian	Set								20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-		

2. Kebakaran

a. FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Kabupaten Sidoarjo	18	10	105	8	105

6. Urusan Sosial

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
1	Rehabilitasi	163	400,000,000	400,000,000								360.000.000	360.000.000
2	Pembangunan kembali												
3	Penyediaan rumah relokasi											82.695.000	82.695.000
	a. Pengadaan lahan												
	b. Pembangunan baru												
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana												
Jumlah *)													

b. Form 4.C.4

Form 4.C.4 merupakan rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program. Data tersebut terdiri dari kegiatan layanan, jumlah rumah tangga, kebutuhan biaya, sumber pembiayaan pada tahun n+1 yang terdiri dari APBD, DAK, dan lainnya. Tidak ada rencana pemenuhan rumah Layak Huni yang terkena relokasi program di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023 karena tidak ada Program relokasi.

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

OPD melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. OPD menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara, pemerintah daerah dapat: membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu; dan atau memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya. Penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM.

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibumlinmas		Sosial
1	2	3	4	5		6
Form 1.D.2	Form 2.D.2	Form 3.D.3	Form 4.D.2	(Penegakan Perda)		Form 6.D.5
		Form 3.D.4	Form 4.D.4	Form 5.D.2	Form 5.D.4	
					Form 5.D.6	
				(Damkar)		
				Form 5.D.1	Form 5.D.2	
				(Kebencanaan)		
				Form 5.D.1	Form 5.D.2	

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

1, Urusan Pendidikan

a. FORM 1.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	Sumber data diperoleh dari : https://data.dikdasmen.go.id/publikasi/pendidikan/pendidikan-anak-usia-dini-dasar-dan-menengah/year=2025
2	Jumlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat	Kegiatan	1. parenting 2. pelatihan dasar deteksi dini pencegahan stunting	1. 39625000 2. 81950000	1. parenting 2. pelatihan dasar deteksi dini pencegahan stunting	109275000	100	89,88	APBD	Masih kurangnya pemahaman Orangtua peserta didik PAUD tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan	Kegiatan Sosialisasi PAUD Berkualitas "PARENTING" ,
3	Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan (PAUD)	Peserta didik	1. pendamping BOP PAUD/TK 2. pendamping BOP kesetaraan	1. 432000000 2. 108000000	1. pendamping BOP PAUD/TK 2. pendamping BOP kesetaraan	1. 432000000 2. 108000000	100	100	APBD	Terdapat peserta didik PAUD dan kesetaraan yang kesulitan dalam pembiayaan pendidikan baik di PAUD maupun pendidikan kesetaraan	Pemerintah Daerah memberikan bantuan melalui BOP pendamping PAUD dan BOP pendamping kesetaraan bagi peserta didik kurang mampu
4	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD)	Peserta didik	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	3618444492	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	3356900000	100	92,77	APBD	kegiatan berjalan baik dan lancar	-
5	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (PAUD)	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	Tidak terdapat wilayah yang kekurangan daya tampung	Satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.620, mencukupi daya tampung PAUD
6	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (PAUD)	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	Tidak terdapat wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal	Ad a beberapa satuan pendidikan berada di daerah sulit terjangkau di kecamatan Buduran, Porong dan Sidoarjo
7	Jumlah pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan	1. pendampingan akreditasi 2. kegiatan pelatihan guru PAUD se kec. Balongbendo 3. workshop manajemen berbasis sekolah 4. gebyar PAUD	1. 23415000 2. 49999837 3. 327711554 4. 200152750	1. pendampingan akreditasi 2. kegiatan pelatihan guru PAUD se kec. Balongbendo 3. workshop manajemen berbasis sekolah 4. gebyar PAUD	437493750	100	100	APBD	Keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya sangat diperlukan	Pelaksanaan MBS di sekolah bermanfaat untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah
8	Jumlah kegiatan pelatihan/seminar/ lokakarya guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan (PAUD)	Kegiatan	1. diklat dasar himpaudi 2. diklat lanjutan himpaudi 3. pengimbasan	1. 49379843 2. 49796093 3. 105538857	1. diklat dasar himpaudi 2. diklat lanjutan himpaudi 3. pengimbasan	204714793	100	100	APBD	0	0

			diklat dasar dan lanjutan untuk 4 kawedanan		diklat dasar dan lanjutan untuk 4 kawedanan						
9	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kegiatan	1. sosialisasi juknis BOP PAUD 2. sosialisasi aplikasi OSS PAUD 3. sosialisasi PAUD berkualitas	1. 17175000 2. 18637500 3. 72312500	1. sosialisasi juknis BOP PAUD 2. sosialisasi aplikasi OSS PAUD 3. sosialisasi PAUD berkualitas	83524500	100	77,25	APBD	Serapan anggaran disesuaikan dengan kondisi riil di kegiatan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar
10	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (PAUD)	Kegiatan	Honor Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Uang Pada	54000000	Honor Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Uang Pada	54000000	100	100	APBD	kegiatan berjalan baik dan lancar	-
11	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (PAUD)	Kegiatan	Belanja hibah uang untuk Sarana, Prasarana dan utilitas	670000000	Belanja hibah uang untuk Sarana, Prasarana dan utilitas	670000000	100	100	APBD	kegiatan berjalan baik dan lancar	
12	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	pendidik = 5143 tenaga kependidikan = 1766	0	0	0	0	0	0	Satuan PAUD Negeri di Kabupaten Sidoarjo ada 2 (Kec. Sidoarjo dan Sedati), dimana guru PNS di kedua PAUD telah mencukupi, untuk guru swasta menjadi wewenang dan tanggungjawab satuan pendidikan dan yayasan	Pemenuhan pemerataan guru di satuan PAUD swasta menjadi wewenang dan tanggung jawab satuan pendidikan dan yayasan.
13	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	pendidik = 5143 tenaga kependidikan = 1766	0	0	0	0	0	0	Satuan PAUD Negeri di Kabupaten Sidoarjo ada 2 (Kec. Sidoarjo dan Sedati), dimana guru PNS di kedua PAUD telah mencukupi, untuk guru swasta menjadi wewenang dan tanggungjawab satuan pendidikan dan yayasan	Pemenuhan pemerataan guru di satuan PAUD swasta menjadi wewenang dan tanggung jawab satuan pendidikan dan yayasan.
14	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PAUD)	Guru	0	0	0	0	0	0	0	Formasi guru ASN untuk satuan PAUD sampai dengan saat ini masih belum ada	0
15	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (PAUD)	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (PAUD)	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Calon kepala sekolah PAUD dari lulusan guru penggerak masih	0

											belum ada, ada 95 kepala sekolah dari guru penggerak mengisi formasi kepala SDN dan SMPN	
17	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (PAUD)	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	Calon kepala sekolah PAUD dari lulusan guru penggerak masih belum ada, ada 95 kepala sekolah dari guru penggerak mengisi formasi kepala SDN dan SMPN	0
18	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Pengawas atau penilik	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawas dan penilik PAUD kurang memadai dengan jumlah satuan PAUD sejumlah 1.620	0
19	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (PAUD)	Kegiatan	1. pelatihan proyek penguatatan profil pelajar pancasila 2. pelatihan diklat dasar PAUD 3. pelatihan diklat dasar lanjutan PAUD 4. pelatihan implementasi kurikulum merdeka PAUD 5. pembukaan bimtek peningkatan kapasitas guru 6. bansos guru PAUD NF 7. bansos guru TK/RA/BA	1. 29222500 2.57837500 3. 67145000 4. 24873900 5. 48085000 6. 12600000000 7. 15945600000	1. pelatihan proyek penguatatan profil pelajar pancasila 2. pelatihan diklat dasar PAUD 3. pelatihan diklat dasar lanjutan PAUD 4. pelatihan implementasi kurikulum merdeka PAUD 5. pembukaan bimtek peningkatan kapasitas guru 6. bansos guru PAUD NF 7. bansos guru TK/RA/BA	1. 29222500 2.57837500 3. 67145000 4. 24873900 5. 48085000 6. 12600000000 7. 15945600000	100		APBD	0	0	
20	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan menyelesaikan S1 difasilitasi melalui bantuan beasiswa di bagian Kesra	0
21	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD)	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD) telah dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan dengan lulusan 42 peserta	0

22	Jumlah data warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	Putus sekolah SD = 137 SMP = 39	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Peserta didik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Peserta didik	5250	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jumlah komunitas belajar pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Unit komunitas	KKG, MGMP, K3S, MKKS	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. 9074224000 2 .6259787500	1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. 7818365000 2. 5316562500	100	1. 86,16 2. 84,93	APBD	0	0
28	Jumah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1. Keg. Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SD Sederajat 2. Keg. Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SMP Sederajat	121575000	1. Keg. Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SD Sederajat 2. Keg. Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Siswa SMP Sederajat	109275000	100	89,88	APBD	Kegiatan dilaksanakan dengan baik dan lancar	realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
29	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Bangunan SD 2. Monitoring dan Evaluasi Hibah uang untuk rehabilitasi sekolah SD/SMP Swasta	1. 8400000 2. 12600000	1. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Bangunan SD 2. Monitoring dan Evaluasi Hibah uang untuk rehabilitasi sekolah SD/SMP Swasta	0	0	0	APBD	0	0
30	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21248427860	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17798070311	100	83,76	APBD	0	0
31	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik SD = 7978 Pendidik SMP = 4069 Tendik SD = 1692 Tendik SMP = 996	0								
33	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	1.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. 9074224000 2. .6259787500	1.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. 7818365000 2. 5316562500	100	1. 86,16 2. 84,93	APBD	0	0	0
34	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Guru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	95	0	95	0	100	0	0	0	0	0
37	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pengawas atau penilik	Pendidik SD = 8030 Pendidik SMP = 4082 Tendik SD = 1322 Tendik SMP = 1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. 9074224000 2. .6259787500	1.Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. 7818365000 2. 5316562500	100	1. 86,16 2. 84,93	APBD	0	0	0
40	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	pembiayaan mandiri	0	0	0	0	0	0	0	bantuan biaya pendidikan bagi pendidik dan tenaga	0

										kependidikan menyelesaikan S1 difasilitasi melalui bantuan bea siswa bagian Kesra	
41	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	Kegiatan pendidikan dan pelatihan guru penggerak dilaksanakan pusat, Dikbud Sidoarjo memfasilitasi peserta	0	0	0	0	0	0	Kegiatan pendidikan dan pelatihan guru penggerak dilaksanakan pusat, Dikbud Sidoarjo memfasilitasi peserta	0

2. Urusan Kesehatan**a. FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMAS ALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.947	31.134	100,60	3.932.782.500	3.899.755.108	99,2%	APBD dan BOK		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	30.947	31.035	100,28	30.525.000	28.619.970	93,8%	APBD dan BOK		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	29.176	30.885	105,86	211.422.500	207.317.770	98,1%	APBD dan BOK		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	117.736	118.526	100,67	28.782.005	26.197.680	91,0%	APBD dan BOK		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	282.660	295.997	104,72	889.535.252	879.303.920	98,8%	APBD dan BOK		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.391.348	1.466.120	105,37	20.528.500	19.347.470	94,2%	APBD dan BOK		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	266.597	270.541	101,48	16.855.000	16.094.970	95,5%	APBD dan BOK		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	156.726	167.120	106,63	4.533.191	4.348.460	95,9%	APBD dan BOK		

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	69.784	71.429	102,36	14.750.000	14.719.970	99,8%	APBD dan BOK		
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	4.169	5.325	127,73	407.845.750	405.451.720	99,4%	APBD dan BOK		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	28.250	39.862	141,10	4.863.931.260	3.475.005.397	71,4%	APBD dan BOK		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	34.098	37.744	110,69	191.349.700	179.945.168	94,0%	APBD dan BOK		

3. Urusan Pekerjaan umum

a. FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TARGET	REALISASI		
			Total (unit Rumah)	Terlayani JP (unit Rumah)	Terlayani BJP (unit Rumah)	Belum Terlayani (unit Rumah)
1	2	3	4	5	6	7
1	Porong	Plumbon	389	64	325	0
2		Kedungboto	849	121	728	0
3		Kebonagung	2332	50	2282	0
4		Glagaharum	1738	0	1738	0
5		Porong	2077	0	2077	0
6		Mindi (Lumpur)	1407	0	1407	0

7		Jatirejo (Lumpur)	693	0	693	0
8		Renokenongo (Lumpur)	1243	0	1243	0
9		Siring (Lumpur)	513	0	513	0
10		Gedang	2080	0	2080	0
11		Juwet Kenongo	2002	550	1452	0
12		Kedungsolo	1684	0	1684	0
13		Kabakalan	625	0	625	0
14		Kesambi	1961	0	1961	0
15		Pamotan	1500	0	1500	0
16		Wunut	1987	1000	987	0
17		Candipari	1568	1200	368	0
18		Lajuk	2063	0	2063	0
19		Pesawahan	892	0	892	0
		Update 2023	997		997	0
20	Jabon	Kedungpandan	986	125	861	0
21		Kupang	1555	60	1495	0
22		Balingtani	1026	200	826	0
23		Kedungrejo	1642	574	1068	0
24		Tropoasri	2086	57	2029	0
25		Permisan	542	7	535	0
26		Semambung	1708	0	1708	0
27		Tambakkalisogo	892	0	892	0
28		Jemirahan	1072	0	1072	0
29		Pangreh	1599	0	1599	0

30		Dukuhsari	1847	1725	122	0
31		Kedungcangkring	1733	0	1733	0
32		Pejarakan	399	0	399	0
33		Besuki	647	0	647	0
34		Keboguyang	1762	0	1762	0
35	Tanggulangin	Putat	986	372	614	0
36		Penatarsewu	994	25	969	0
37		Sentul	893	60	833	0
38		Banjarasri	793	72	721	0
39		Banjarpanji	440	165	275	0
40		Kedungbanteng	1024	30	994	0
41		Ganggangpanjang	1640	30	1610	0
42		Ngaban	1669	33	1636	0
43		Kalidawir	2080	0	2080	0
44		Randegan	2607	0	2607	0
45		Kedensari	2144	0	2144	0
46		Kalisampurno	2670	0	2670	0
47		Ketapang	151	0	151	0
48		Kedungbendo	0	0	0	0
49		Gempolsari	1362	0	1362	0
50		Kalitengah	3736	0	3736	0
51		Kludan	1225	0	1225	0
52		Boro	1508	0	1508	0
53	Ketegan	1920	0	1920	0	

		Update 2023	6689		6689	0
54	Balongbendo	Suwaloh	862	346	516	0
55		Balongbendo	711	288	423	0
56		Jabaran	1560	176	1384	0
57		Singkalan	634	138	496	0
58		Bakalanwringinpitu	508	3	505	0
59		Seduri	622	13	609	0
60		Seketi	1559	45	1514	0
61		Watesari	711	20	691	0
62		Wonokarang	601	0	601	0
63		Penambangan	1064	0	1064	0
64		Sumokembangsri	794	0	794	0
65		Wonokupang	744	77	667	0
66		Kedung Sukodani	597	0	597	0
67		Bakung Temenggungan	1001	0	1001	0
68		Waruberon	386	0	386	0
69		Gagang Kepuhsari	385	0	385	0
70		Kemangsen	1659	0	1659	0
71		Jeruk legi	662	0	662	0
72		Bakung Pringgodani	777	0	777	0
73		Bogempinggir	497	0	497	0
		Update 2023	41		41	0
74	Candi	Kedungpeluk	1258	0	1258	0
75		Kalipecabean	3247	0	3247	0

76	Balongdowo	2344	60	2284	0
77	Kendalpecabean	1323	16	1307	0
78	Karang Tanjung	2473	0	2473	0
79	Sumorame	2775	0	2775	0
80	Ngampelsari	3020	0	3020	0
81	Balonggabus	1534	0	1534	0
82	Klurak	1985	0	1985	0
83	Kebonsari	2226	0	2226	0
84	Gelam	2634	0	2634	0
85	Candi	1334	0	1334	0
86	Sugihwaras	2655	0	2655	0
87	Kedungkendo	2983	0	2983	0
88	Durung Banjar	948	500	448	0
89	Durung Bedug	2247	625	1622	0
90	Jambangan	1395	0	1395	0
91	Sumokali	2017	0	2017	0
92	Tenggulunan	2328	0	2328	0
93	Bligo	2040	0	2040	0
94	Wedoro Klurak	1574	0	1574	0
95	Larangan	3047	0	3047	0
96	Sepande	3310	0	3310	0
97	Sidodadi	1405	0	1405	0
	Update 2023	25104		25104	0

98	Tulangan	Kemantren	2016	30	1986	0
99		Pangkemiri	1200	30	1170	0
100		Telasih	1196	80	1116	0
101		Modong	1062	50	1012	0
102		Janti	937	0	937	0
103		Kebaron	1190	65	1125	0
104		Kenongo	1796	0	1796	0
105		Gelang	1360	0	1360	0
106		Jiken	854	0	854	0
107		Kepatihan	1600	0	1600	0
108		Tulangan	1624	0	1624	0
109		Kepadangan	1698	0	1698	0
110		Kajeksan	796	20	776	0
111		Singopadu	977	0	977	0
112		Medalem	1214	0	1214	0
113		Sudimoro	1200	0	1200	0
114		Kedondong	1833	0	1833	0
115		Grogol	1330	0	1330	0
116		Grinting	1927	0	1927	0
117	Kepuh Kemiri	985	0	985	0	
118	Kepunten	2547	0	2547	0	
119	Grabagan	2572	28	2544	0	
120	Krembung	Jenggot	591	504	87	0

121		Kandangan	574	230	344	0
122		Lemujut	527	13	514	0
123		Tambakrejo	1425	105	1320	0
124		Keret	1011	42	969	0
125		Wangkal	921	130	791	0
126		Gading	616	34	582	0
127		Kedungsumur	776	502	274	0
128		Tanjekwagir	828	265	563	0
129		Mojoruntut	1253	284	969	0
130		Ploso	624	114	510	0
131		Balonggarut	279	97	182	0
132		Rejeni	968	185	783	0
133		Krembung	1139	68	1071	0
134		Keper	678	0	678	0
135		Kedungrawan	687	0	687	0
136		Waung	443	0	443	0
137		Cangkring	710	0	710	0
138		Wonomlati	1096	0	1096	0
139	Buduran	Sawohan	702	100	602	0
140		Dukuhtengah	1349	25	1324	0
141		Entalsewu	2189	0	2189	0
142		Pagerwojo	3157	0	3157	0
143		Sidokerto	3498	0	3498	0

144		Buduran	1680	0	1680	0	
145		Siwalanpanji	2198	0	2198	0	
146		Sidomulyo	527	0	527	0	
147		Prasung	1387	0	1387	0	
148		Damarsi	1708	0	1708	0	
149		Banjarsari	678	0	678	0	
150		Wadungasih	1698	0	1698	0	
151		Banjarkemantren	2349	0	2349	0	
152		Sukorejo	1115	0	1115	0	
153		Sidokepong	3987	0	3987	0	
		Update 2023	15718		15718	0	
154		Tarik	Kramattemenggungan	710	3	707	0
155			Sebani	1420	78	1342	0
156	Gempolklutuk		450	70	380	0	
157	Segodobancang		815	174	641	0	
158	Kemuning		1529	25	1504	0	
159	Mliriprowo		1222	9	1213	0	
160	Klantingsari		1303	0	1303	0	
161	Janti		891	16	875	0	
162	Mindugading		748	0	748	0	
163	Kalimati		1673	28	1645	0	
164	Kedungbocok		1034	0	1034	0	
165	Singogalih		798	0	798	0	

166		Tarik	2515	0	2515	0
167		Mergobener	586	0	586	0
168		Mergoasri	1166	0	1166	0
169		Kendalsewu	638	0	638	0
170		Banjarwungu	1121	0	1121	0
171		Balongmacekan	818	0	818	0
172		Gampingrowo	944	0	944	0
173		Kedinding	1055	0	1055	0
174	Krian	Terungwetan	787	135	652	0
175		Keboharan	1693	12	1681	0
176		Sedenganmijen	2132	242	1890	0
177		Sidomojo	1234	127	1107	0
178		Sidomulyo	1937	142	1795	0
179		Terik	1087	3	1084	0
180		Tempel	3141	2	3139	0
181		watugolong	1965	180	1785	0
182		Junwangi	3011	220	2791	0
183		Tropodo	1922	0	1922	0
184		Katrungan	1831	0	1831	0
185		Jeruk Gamping	1531	0	1531	0
186		Gamping	1815	0	1815	0
187		Terungkulon	1745	0	1745	0
188		Jatikalang	1843	0	1843	0

189		Ponokawan	1360	0	1360	0
190		Kemasan	1899	0	1899	0
191		Tambak Kemerakan	2406	0	2406	0
192		Krian	3445	0	3445	0
193		Kraton	2569	0	2569	0
194		Barengkrajan	2930	0	2930	0
195		Sidorejo	3489	0	3489	0
		Update 2023	8676		8676	0
196	Prambon	Wonoplintahan	1171	80	1091	0
197		Prambon	907	270	637	0
198		Gampang	531	241	290	0
199		Kedungkembar	642	176	466	0
200		Wiroboting	877	94	783	0
201		Pejangkungan	694	235	459	0
202		Cangkringturi	555	0	555	0
203		Kajartengguli	623	305	318	0
204		Jati Alun - alun	571	3	568	0
205		Simpang	741	0	741	0
206		Watutulis	954	70	884	0
207		Jedongcangkring	761	71	690	0
208		Gedangrowo	726	320	406	0
209		Kedungsugo	1007	107	900	0
210	Bulang	857	0	857	0	

211		Jatikalang	808	0	808	0
212		Kedungwonokerto	1272	0	1272	0
213		Bendotretek	1064	0	1064	0
214		Simogirang	1145	0	1145	0
215		Temu	703	76	627	0
		Update 2023	3034		3034	0
216	Tulangan	Kejeksan	796	135	661	0
217		Grabakan		25	-25	0
218		Kedondong	1833	9	1824	0
219		Kebaron	1190	65	1125	0
220		Kepunten	2547	0	2547	0
221		Janti	937	4	933	0
222		Kenongo	1796	0	1796	0
223		Gelang	1360	0	1360	0
224		Jiken	854	0	854	0
225		Pangkemiri	1200	0	1200	0
226		Kepatihan	1600	0	1600	0
227		Tulangan	1624	0	1624	0
228		Kepadangan	1698	0	1698	0
229		Tlasi	1196	260	936	0
230		Singopadu	977	0	977	0
231		Kemantren	2016	0	2016	0
232	Medalem	1214	0	1214	0	

233		Sudimoro	1200	0	1200	0
234		Grogol	1330	0	1330	0
235		Modong	1062	0	1062	0
236		Grinting	1927	0	1927	0
237		Kepuh Kemiri	985	0	985	0
238	Sukodono	Sambungrejo	1453	100	1353	0
239		Plumbungan	1182	176	1006	0
240		Suruh	1272	24	1248	0
241		Wilayat	1064	124	940	0
242		Pademonegoro	1641	60	1581	0
243		Jogosatru	1132	0	1132	0
244		Kloposepuluh	2150	116	2034	0
245		Ngaresrejo	1136	0	1136	0
246		Kebonagung	4174	0	4174	0
247		Anggaswangi	2000	0	2000	0
248		Jumputrejo	3201	400	2801	0
249		Pekarungan	3115	0	3115	0
250		Cangkringsari	1736	0	1736	0
251		Sukodono	2663	0	2663	0
252		Masangan Wetan	1547	0	1547	0
253		Suko	4428	0	4428	0
254		Masangkulon	4141	0	4141	0
255		Panjunan	1271	0	1271	0

256		Bangsri	1704	0	1704	0
		Update 2023	1052		1052	0
257	Wonoayu	Candinegoro	1350	3	1347	0
258		Mulyodadi	823	3	820	0
259		Pagergumbuk	1084	0	1084	0
260		Wonokalang	1064	6	1058	0
261		Plaosan	1173	0	1173	0
262		Sawocangkring	1673	23	1650	0
263		Popoh	1178	0	1178	0
264		Becirongengor	1570	120	1450	0
265		Simoketawang	670	0	670	0
266		Jimbaran Wetan	614	0	614	0
267		Ketimang	1006	0	1006	0
268		Pilang	2025	0	2025	0
269		Sumberejo	1354	0	1354	0
270		MoJORangagung	267	0	267	0
271		Wonokasian	1958	0	1958	0
272		Ploso	1256	0	1256	0
273		Jimbaran Kulon	492	0	492	0
274		Wonoayu	1526	0	1526	0
275	Semambung	1477	0	1477	0	
276	Simo angin-angin	1117	0	1117	0	
277	Tanggul	1813	0	1813	0	

278		Lambangan	1216	0	1216	0	
279		Karangpuri	2057	0	2057	0	
		Update 2023	1364		1364	0	
280	Gedangan	Ganting	1453	0	1453	0	
281		Karangbong	2722	0	2722	0	
282		Tebel	4382	0	4382	0	
283		Kragan	722	0	722	0	
284		Gemurung	1517	0	1517	0	
285		Punggul	2421	0	2421	0	
286		Sruni	2522	0	2522	0	
287		Kebonanom	2945	0	2945	0	
288		Keboansikep	4232	0	4232	0	
289		Gedangan	3604	0	3604	0	
290		Ketajen	2838	0	2838	0	
291		Wedi	1906	0	1906	0	
292		Semambung	2318	0	2318	0	
293		Sawatratap	4795	0	4795	0	
294		Bangah	2284	0	2284	0	
			Update 2023	7546		7546	0
295		Sedati	Kwangsan	1493	0	1493	0
296	Pepe		4541	0	4541	0	
297	Buncitan		1777	0	1777	0	
298	Kalanganyar		1955	0	1955	0	

299		Tambak Cemandi	1253	0	1253	0
300		Gisik Cemandi	927	0	927	0
301		Cemandi	2179	0	2179	0
302		Pulungan	1237	0	1237	0
303		Betro	2780	0	2780	0
304		Sedati Agung	2722	0	2722	0
305		Sedati Gede	3943	0	3943	0
306		Pabean	6163	0	6163	0
307		Semampir	1081	0	1081	0
308		Pranti	983	0	983	0
309		Segoro Tambak	693	0	693	0
310		Banjar Kemuning	744	0	744	0
		Update 2023	4589		4589	0
311	Sidoarjo	Lebo	1980	0	1980	0
312		Suko	5573	0	5573	0
313		Banjarbendo	3049	0	3049	0
314		Lemah Putro	5205	0	5205	0
315		Sidokare	6025	0	6025	0
316		Celep	2190	0	2190	0
317		Sekardangan	2759	0	2759	0
318		Gebang	2344	0	2344	0
319		Rangkah Kidul	1510	0	1510	0
320		Bulusidokare	3148	0	3148	0

321		Pucanganom	2237	0	2237	0
322		Pekauman	1005	0	1005	0
323		Sidokumpul	2532	0	2532	0
324		Sidoklumpuk	2280	0	2280	0
325		Bluru Kidul	6467	0	6467	0
326		Kemiri	2586	0	2586	0
327		Pucang	2282	0	2282	0
328		Magersari	5256	0	5256	0
329		Jati	3591	0	3591	0
330		Cemengkalang	1279	0	1279	0
331		Cemengbakalan	1387	0	1387	0
332		Urangagung jedong	2487	0	2487	0
333		Sarirogo	1744	0	1744	0
334		Sumput	2391	0	2391	0
		Update 2023	20430		20430	0
335	Taman	Kramat Jegu	3286	0	3286	0
336		Trosobo	2179	0	2179	0
337		Pertapan Maduretno	1407	0	1407	0
338		Tanjungsari	1981	0	1981	0
339		Sidodadi	2201	0	2201	0
340		Bringinbendo	2251	0	2251	0
341		Sambibulu	2616	0	2616	0
342		Gilang	1590	0	1590	0

343		Krembangan	1398	0	1398	0	
344		Tawang Sari	2943	0	2943	0	
345		Kletek	1606	0	1606	0	
346		Jemundo	2002	0	2002	0	
347		Sadang	1211	0	1211	0	
348		Geluran	3796	0	3796	0	
349		Bohar	1763	0	1763	0	
350		Wage	5276	0	5276	0	
351		Kedungturi	3250	0	3250	0	
352		Taman	1847	0	1847	0	
353		Kalijaten	2775	0	2775	0	
354		Ngelom	1759	0	1759	0	
355		Wonocolo	2094	0	2094	0	
356		Ketegan	1743	0	1743	0	
357		Bebekan	2095	0	2095	0	
358		Sepanjang	3436	0	3436	0	
			Update 2023	6299		6299	0
359		Waru	Medaeng	3847	0	3847	0
360	Pepelegi		4546	0	4546	0	
361	Waru		4542	0	4542	0	
362	Kureksari		6467	0	6467	0	
363	Ngingas		3425	0	3425	0	
364	Tropodo		7432	0	7432	0	

365		Tambak Sawah	3470	0	3470	0
366		Tambak Rejo	3728	0	3728	0
367		Tambak Oso	771	0	771	0
368		Tambak Sumur	3140	0	3140	0
369		Wadungsari	3697	0	3697	0
370		Berbek	5843	0	5843	0
371		Kepuh Kiriman	5418	0	5418	0
372		Wedoro	4290	0	4290	0
373		Janti	1944	0	1944	0
374		Kedungrejo	4206	0	4206	0
375		Bungurasih	4349	0	4349	0
		Update 2023	3491		3491	0
Total			753367	191067	562300	0
Persentase Layanan				25,36%	74,64%	0,00%
Capaian SPM				100,00%		

b. FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

No	Kecamatan	Desa	TARGET				REALISASI				
			Total	Akses Dasar	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T

			(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KRIAN	GAMPING	1815		0				1815		
2		JATIKALANG	1843		0				1843		
3		JERUK GAMPING	1531		92				1439	92	
4		JUNWANGI	3011		0				3011		
5		KATERUNGAN	1831		0				1831		
6		KEMASAN	1899		0				1899		
7		KRATON	2569		0				2569		
8		KRIAN	3445		277				3321		56
9		SEDENGAN MIJEN	2132		0				2132		
10		SIDOMULYO	1937		6				1931		
11		TAMBAK KEMERAKAN	2406		286				2109	275	11
12		TERIK	1087		0				1087		
13		TERUNG KULON	1745		0				1745		
14		TERUNG WETAN	787		0				787		
15		TROPODO	1922		11				1912		
16		BARENGKRAJAN	2930		73				2857		
17		KEBOHARAN	1693		0				1693		
18		PONOKAWAN	1360		60				1300	18	
19		SIDOMOJO	1234		0				1234		
20		SIDOREJO	3489		87				3402		
21		TEMPEL	3141		133				3008	106	

22		WATUGOLONG	1965		217			1751			
23	BUDURAN	ENTALSEWU	2189		34			2155	57		
24		PAGERWOJO	3157		29			3128	21		
25		SIDOKERTO	3498		0			3498			
26		BUDURAN	1680		63			1680			
27		SIWALAN PANJI	2198		28			2170			
28		SIDOMULYO	527		35			527			
29		PRASUNG	1387		157			1284			
30		SAWOHAN	702		82			686			
31		DAMARSI	1708		26			1693			
32		DUKUH TENGAH	1349		91			1258	46		
33		BANJAR SARI	678		28			650			
34		WADUNGASIH	1698		47			1698			
35		BANJAR KEMANTREN	2349		0			2349			
36		SUKOREJO	1115		76			1039			
37		SIDOKEPUNG	3987		14			3973	7		
38		CANDI	Candi	1334		23			1311		
39			Bligo	2040		0			2040		
40	Larangan		3047		62			2985			
41	Tenggulunan		2328		0			2328			
42	Sepande		3310		0			3310	17		
43	Sumokali		2017		0			2017	21		
44	KEDUNGKENDO		2983		18			2978			
45	Karang Tanjung		2473		69			2404	60		

46		SUGIH WARAS	2655		45			2610	45	
47		Gelam	2634		139			2495		
48		Sumorame	2775		40			2735		
49		Ngampelsari	3020		0			3020		
50		Balongdowo	2344		300			2044	242	
51		Balunggabus	1534		0			1534		
52		Kendal Pecabean	1323		102			1221		
53		Kali Pecabean	3247		68			3193		
54		Kedung Peluk	1258		132			1126	101	
55		Wedoro klurak	1547		0			1547		
56		Klurak	1985		0			1985		
57		Kebonsari	2226		90			2136	90	
58		Durung Bedug	2247		49			2198	24	
59		Sidodadi	1405		22			1383	15	
60		Jambangan	1395		1			1395		
61		Durung Banjar	948		50			898	45	
62	GEDANGAN	BANGAH	2284		30			2254	30	
63		GANTING	1453		2			1451		
64		KARANGBONG	2722		61			2661	61	
65		KEBON ANOM	2945		60			2885		
66		KEBON SIKEP	4232		37			4195		
67		SRUNI	2522		77			2445	77	
68		TEBEL	4382		111			4271	111	
69		SAWOTRATAP	4795		42			4753	42	

70		KRAGAN	722		17			705		
71		KETAJEN	2838		29			2809	23	
72		GEMURUNG	1517		34			1501		
73		PUNGGUL	2421		62			2359		
74		GEDANGAN	3604		169			3493		
75		WEDI	1906		0			1906		
76		SEMAMBUNG	2318		0			2318		
77	WONOAYU	PILANG	2025		0			2025		
78		SUMBEREJO	1354		114			1240	69	
79		MOJORANG AGUNG	267		0			267		
80		WONOKASIAN	1958		103			1855		
81		TANGGUL	1813		0			1813		
82		SIMO ANGIN-ANGIN	1117		0			1117		
83		SIMOKETAWANG	670		0			670		
84		SEMAMBUNG	1477		0			1477		
85		WONOKALANG	1064		0			1064		
86		PAGER NGUMBUK	1084		81			1003	71	
87		MULYODADI	823		2			821		
88		CANDI NEGORO	1350		116			1234	116	
89		PLAOSAN	1173		159			1014	159	
90		KARANGPURI	2057		369			1688	332	
91		BECIRONGENGOR	1570		0			1570		
92		SAWOCANGKRING	1673		66			1607	66	
93		LAMBANGAN	1216		0			1216		

94		PLOSO	1265		141			1124	102	
95		KETIMANG	1006		0			1006		
96		JIMBARAN WETAN	614		0			614		
97		JIMBARAN KULON	492		0			492		
98		POPOH	1178		154			1024	154	
99		WONOAYU	1526		35			1491		
100	WARU	WADUNG ASRI	3697		0			3691	6	
101		TAMBAKREJO	3728		32			3696	32	
102		KUREKSARI	6467		146			6215	106	
103		WEDORO	4290		78			4212	45	
104		TAMBAK OSO	771		124			637	10	
105		NGINGAS	3425		25			3390	10	
106		TAMBAK SUMUR	3140		78			2997	10	55
107		TROPODO	7432		0			7422	10	
108		BERBEK	5843		40			5803		
109		KEPUH KIRIMAN	5418		83			5315	20	
110		TAMBAK SAWAH	3470		0			3460	10	
111		MEDAENG	3847		28			3819		
112		WARU	4542		80			4462	2	
113		PEPELEGI	4546		5			4541		
114		JANTI	1944		4			1930	10	
115		KEDUNGREJO	4206		45			4151	10	
116	BUNGURASIH	4349		29			4320			
117	TULANGAN	SINGOPADU	977		51			926	10	

118		KEPUNTEN	2547		0			2547		
119		MEDALEM	1214		0			1214		
120		GRINTING	1927		0			1927		
121		SUDIMORO	1200		0			1200		
122		KAJEKSAN	796		48			748	17	
123		GRABAGAN	1914		111			1803	77	
124		Modong	1062		0			1062		
125		Tulangan	1624		11			1602	11	
126		Kepuh Kemiri	985		157			828	130	
127		Kemantren	2016		0			2016		
128		Grogol	1330		102			1228	80	
129		KEPADANGAN	1698		134			1564	79	
130		KENONGO	1796		20			1776	18	
131		KEBARON	1190		18			1172	15	
132		TLASIH	1196		0			1196		
133		JANTI	937		129			808	108	
134		GELANG	1360		24			1336	14	
135		JIKEN	854		50			804	45	
136		KEPATIHAN	1600		79		47	1521	47	
137		PANGKEMIRI	1200		0			1200		
138		KEDONDONG	1833		0			1833		
139	TAMAN	BRINGIN BENDO	2251		101			2150	59	
140		GILANG	1590		59			1531		
141		KRAMAT JEGU	3286		48			3238		

142		KREMBANGAN	1398		17			1381		
143		PERTAPAN MADURETNO	1407		157			1250	76	
144		SAMBI BULU	2616		313			2303		
145		SIDODADI	2201		12			2189		
146		TANJUNGSARI	1981		115			1866	86	
147		TROSOBO	2179		51			2128		
148		BEBEKAN	2095		119			1976	112	
149		BOHAR	1763		15			1748		
150		GELURAN	3796		11			3785		
151		JEMUNDO	2002		7			1996		
152		KALIJATEN	2775		8			2767		
153		KEDUNG TURI	3250		7			3243		
154		KATEGAN	1743		15			1728	13	
155		KLETEK	1606		44			1562	23	
156		NGELOM	2759		27			2735		
157		SADANG	1211		11			1210		
158		SEPANJANG	3436		15			3421		
159		TAMAN	2847		11			2836		
160		TAWANGSARI	2943		29			2914		
161		WAGE	5276		15			5261		
162		WONOCOLO	2094		40			2054	23	
163	TARIK	BALONGMACEKAN	818		127			691	25	
164		BANJARWUNGU	1121		30			1091	26	
165		GAMPINGROWO	944		108			836	71	

166		GEMPOLKLUTUK	450		0			450		
167		JANTI	891		19			872		
168		KALIMATI	1673		212			1461	212	
169		KEDINDING	1055		61			994	39	
170		KEDUNGBOCOK	1034		141			893	83	
171		KEMUNING	1529		43			1486		
172		KENDALSEWU	638		0			638		
173		KLANTINGSARI	1303		52			1251	52	
174		KRAMAT TEMENGGUNG	710		14			696	7	
175		MERGOBENER	586		0			586	20	
176		MERGOSARI	1166		132			1034	93	
177		MINDUGADING	748		123			625	122	
178		MLIRIPROWO	1222		65			1157	15	
179		SEBANI	1420		10			1410		
180		SEGODOBANCANG	815		0			815		
181		SINGOGALIH	798		120			678	92	
182		TARIK	2515		0			2515	14	
183	JABON	Tambak Kalisogo	892		59			833	59	
184		Dukuhsari	1847		0			1847		
185		Jemirahan	1072		0			1072		
186		Keboguyang	1762		117			1645	117	
187		KEDUNGPANDAN	986		0			986	22	
188		Kupang	1555		0			1555	19	
189		Semambung	1708		202			1506	202	

190		Pangreh	1599		64			1535	64	
191		Pejarakan	399		5			389	5	
192		KEDUNGCANGKRING	1733		53			1707		
193		Trompoasri	2086		0			2086		
194		KEDUNGREJO	1642		0			1642	22	
195		PERMISAN	542		0			542		
196		BESUKI	647		0			647		
197		Balingtani	1026		28			998	28	
198	TANGGULANGIN	BANJAR ASRI	793		127			666	64	
199		BANJAR PANJI	440		74			366	56	
200		BORO	1508		59			1449	46	
201		GANGGANG PANJANG	1640		238			1402	174	
202		GEMPOLSARI	1362		120			1242	62	
203		KALIDAWIR	2080		143			1937	124	
204		KALISAMPURNO	2670		0			2670		
205		KALITENGAH	3736		0			3736		
206		KEDENSARI	2144		61			2083	35	
207		KEDUNG BANTENG	1024		0			1024		
208		KETAPANG	151		0			151		
209		KETEGAN	1920		0			1920		
210		KLUDAN	1225		0			1225		
211		NGABAN	1669		72			1597	63	
212		PENATAR SEWU	994		0			994		

213		PUTAT	986		0			986		
214		RANDEGAN	2607		0			2607		
215		SENTUL	893		95			798	75	
216	PORONG	CANDIPARI	1568		45			1523	45	
217		KEBAKALAN	625		8			617	8	
218		KEBON AGUNG	2332		146			2186	146	
219		KEDUNGBOTO	849		0			849		
220		KEDUNGSOLO	1684		0			1684		
221		KESAMBI	1961		192			1769	138	
222		LAJUK	2063		372			1691	243	
223		PESAWAHAN	892		162			730	162	
224		WUNUT	1987		0			1987		
225		Porong	2077		0			2077		
226		Mindi (lumpur)			0			0		
227		Jatirejo (lumpur)			0			0		
228		Renokenongo (lumpur)			0			0		
229		GLAGAH ARUM	1738		284			1454	252	
230		Plumbon	389		98			373		
231		Siring (lumpur)			0			0		
232		Gedang	2080		216			1864	189	
233		JUWET KENONGO	2002		66			1936	42	
234		Pamotan	1500		128			1372	80	
235	SUKODONO	ANGGASWANGI	2000		0			2000		
236		CANGKRINGSARI	1736		0			1736		

237		JOGOSATRU	1132		114			1018	114	
238		JUMPUT REJO	3201		0			3201		
239		KEBON AGUNG	4174		0			4174		
240		KLOPO SEPULUH	2150		0			2150		
241		MASANGAN KULON	4141		29			4121		
242		MASANGAN WETAN	1547		0			1547		
243		NGARESREJO	1136		0			1136		
244		PADEMONEGORO	1641		0			1641		
245		PANJUNAN	1271		30			1241	27	
246		PEKARUNGAN	3115		4			3115		
247		PLUMBUNGAN	1182		0			1182		
248		SAMBUNG REJO	1453		0			1453		
249		SUKO	4428		5			4428		
250		SUKODONO	2663		97			2566	50	
251		SURUH	1272		0			1272		
252		WILAYUT	1016		0			1016		
253		BANGSRI	1704		60			1644	58	
254	KREMBUNG	Tambakrejo	1425		208			1217	204	
255		Keper	678		67			611	67	
256		Kedungsumur	776		198			380	198	
257		Kedungrawan	687		0			687		
258		TANJEK WAGIR	828		25			803	20	
259		Mojaruntut	1253		0			1253		
260		Gading	616		0			616		

261		Wangkal	921		0			921		
262		Jenggot	591		183			408	183	
263		Waung	443		0			443		
264		Ploso	624		91			533	91	
265		Rejeni	968		0			968		
266		Kandangan	575		0			575		
267		Krembung	1139		0			1139		
268		Lemujut	527		0			527		
269		Cangkring	710		121			589	106	
270		Keret	1011		0			1011		
271		Wonomlati	1096		0			1096		
272		Balonggarut	279		3			276		
273	SIDOARJO	MAGERSARI	5256		3			5253		
274		PUCANG	2282		16			2266		
275		KEMIRI	2586		4			2582		
276		BLURU KIDUL	6467		77			6390		
277		SIDOKLUMPUK	2280		67			2213		
278		SIDOKUMPUL	2532		22			2510	22	
279		SIDOKARE	6025		9			6016		
280		PEKAUMAN	1005		24			981		
281		LEMAHPUTRO	5205		13			5192		
282		SEKARDANGAN	2759		46			2713		
283		RANGKAH KIDUL	1510		26			1484		
284		CELEP	2190		72			2118		

285		Gebang	2344		23			2321		
286		BULU SIDOKARE	3148		105			3043		
287		PUCANG ANOM	2237		161			2080		
288		BANJARBENDO	3049		0			3049		
289		JATI	3591		0			3591		
290		Suko	5573		14			5559		
291		Urangagung	2487		13			2474	13	
292		Lebo	1980		18			1962		
293		Cemengbakalan	1387		53			1334		
294		Cemengkalang	1279		4			1275		
295		Sumptut	2391		30			2361		
296		Sarirogo	1744		9			1735		
297	PRAMBON	BENDOTRETEK	1098		268			830	268	
298		BULANG	872		151			721	73	
299		CANGKRING TURI	565		136			429		
300		GAMPANG	540		89			451	89	
301		GEDANG ROWO	738		155			583	155	
302		JATI ALUN-ALUN	593		203			593		
303		JATI KALANG	831		0			831		
304		JEDONG CANGKRING	776		192			584	192	
305		KAJAR TENGGULI	638		73			565		
306		KEDUNG KEMBAR	655		228			427	228	
307		KEDUNG SUGO	1038		361			677	292	
308		KEDUNG WONOKERTO	1231		170			1061		

309		PEJANGKUNGAN	709		201			508	201	
310		PRAMBON	923		0			923		
311		SIMOGIRANG	1203		273			930	222	
312		SIMPANG	761		252			509	252	
313		TEMU	718		116			602	88	
314		WATUTULIS	977		173			804	153	
315		WIROBITING	897		343			554	343	
316		WONOPLINTHAN	1197		130			1067		
317	BALONGBENDO	<i>Singkalan</i>	634		99			446	89	
318		Kedung Sukodani	597		0			597		
319		BAKUNG TEMENGGUNGAN	1001		0			1001		
320		Sumokembangsri	794		315			479	315	
321		Seduri	622		0			622		
322		Wonokupang	744		0			744		
323		Waruberon	386		0			386		
324		Bakalan Wringinpitu	508		0			508		
325		Gagang Kepuh Sari	385		0			385		
326		Suwaluh	862		0			862		
328		Seketi	1557		529			1028	22	
329		Kemangsen	1659		61			1614		45
330		<i>Jabaran</i>	1560		14			1546		
331		Balongsendo	711		0			711		
332		Jeruk Legi	662		0			662		
333		<i>Penambangan</i>	1064		68			1049		

334		Wonokarang	601		145			588			
335		Bakung Pringgodani	774		79			774			
336		BOGEMPINGGIR	497		0			497			
337	SEDATI	SEDATI GEDE	3943		0			3943			
338		SEDATI AGUNG	2722		5			2717			
339		BETRO	2780		94			2686	81		
340		KWANGSAN	1493		28			1465			
341		PEPE	4541		44			4497			
342		<i>PULUNGAN</i>	1237		7			1230			
343		<i>BUNCITAN</i>	1777		17			1760			
344		<i>CEMANDI</i>	2179		8			2171			
345		KALANGANYAR	1955		46			1909			
346		TAMBAK CEMANDI	1253		237			1016	100		
347		GISIK CEMANDI	927		100			827	63		
348		BANJAR KEMUNING	744		33			711	20		
349		<i>SEGOROTAMBAK</i>	693		127			566	80		
350		PRANTI	983		0			983			
351		<i>SEMAMPIR</i>	1081		7			1074			
352		PABEAN	6163		6			6157			
Total			644075		20500		0	47	624169	12054	167
Persentase Layanan						0,00%	0,01%	96,91%	1,87%	0,03%	
Capaian SPM						98,81%					

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

KABUPATEN/KOTA TAHUN-N

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYAN
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Angin Kencang, Puting beliung	2023	Taman	-	18	-	18	-	18	-	-	-	18	-	-	-	-
			Taman	-	4	-	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-
			Krembung	-	41	-	41	-	41	-	-	-	41	-	-	-	-
			Krembung	-	71	-	71	-	71	-	-	-	71	-	-	-	-
			Porong	-	9	-	9	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-
			Candi	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
			Krembung	-	19	-	19	-	19	-	-	-	19	-	-	-	-
Total *)																	
Persentase layanan **)																	
Capaian SPM Total ***)																	

b. FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	DESA	TARG				REALIS			ASI		
				TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA		PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA		PENYEDIAAN RLH	
				(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
2	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan												
5	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Illegal	Sidoarjo	Sidoarjo	116	116	-	-	116	-	-	-		
6	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana												
7	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman												

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**A. Ketentraman dan Ketertiban**a. FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM
TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET
WARGA NEGARA

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	orang	50039	orang	50039	orang	100,00%	100,00%	APBD	Penghitungan Kebutuhan sesuai target tahunan sudah diperhitungkan maksimal, namun apabila ada kegiatan diluar prediksi atau tak terduga sehingga, kebutuhan yang sudah terpagu untuk menyesuaikan	

b. FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah anggota Satpol-PP yang mendapatkan pelatihan dan Binjas	Orang	298	638 600 00	298	4245 0000	66.47	33.53	APBD	Pada dasarnya kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal dan mencapai target, namun dalam pelaksanaannya narasumber kegiatan dari internal OPD karena adanya efisiensi anggaran	Melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tahun 2026
2	Jumlah peserta Kirab Pataka Kabupaten dan Kirab Pataka Provinsi	Laporan	4	108 846 000	4	9983 5776	91.72	8.28	APBD	Tidak terdapat kasus yang membutuhkan gelar perkara	NIHIL
3	Jumlah PPNS Kabupaten yang Pembinaan	Orang	298	638 600 00	298	4245 0000	66.47	33.53	APBD	Pada dasarnya kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal dan mencapai target, namun dalam pelaksanaannya narasumber kegiatan dari internal OPD karena adanya efisiensi anggaran	Melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tahun 2026

d. FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

NO .	KELUARAN (OUTPUT)	SATUA N	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Handy Talky (HT) Handy Talky (HT)	Unit	30	4	30	4	100	100	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	NIHIL	NIHIL
2	Handy Talky (HT) Handy Talky (HT)	Unit	13	4	13	4	100	100	[DANA KHUSUS] - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	NIHIL	NIHIL

C. Kebencanaan

a. FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN MUTU LAYANAN (%)	BOBOT KEPENTINGAN (%)	PROGRES KINERJA SPM (%)	
							VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	FISIK	KEUANGAN			PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15	16 = $\bar{X}(12+13+14)$	17 = $\bar{\Sigma}(15x16)$
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana	Jenis tenaga ahli, jumlah orang, jumlah bulan kerja, jumlah pertemuan, ATK	Tersedia nya data/info rmasi tentang jenis dan resiko bencana												

b. FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARU				RAT BENCA	NAN			CAPAIAN RATA-RATA (%)			BOBOT KEPENTINGAN	SOLUSI					
							TARGET				REALISASI				KOEFSIEN INDIKATOR LAYANAN (1/0)	CAPAIAN %								
							VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (Rp.1000)	VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (Rp.1000)		FISIK	KEUANGAN			MUTU LAYANAN	FISIK	KEUANGAN	MUTU LAYANAN	
1							8	9	10	11= $\frac{8 \times 9}{10}$	12	13	14	15= $\frac{12 \times 13}{14}$	16	17= $\frac{12 \times 13}{8 \times 9}$	18= $\frac{15}{11}$	19	20=X (Capaian Fisik)	21=X (Capaian Keuangan)	22=X (Capaian Mutu Layanan)	23	30	
	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi bagi penduduk korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi, perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana																				

B. Kebakaran**a. FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)**

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
	Kabupaten Sidoarjo	100%	100%	100%

b. FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN/ KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMA TAN PADA KETINGGIAN	PENYELAM ATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGAN AN POHON TUMBANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten Sidoarjo	-	3	377	-	-	4	0	83

6. Bidang Urusan Sosial

a. FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI		
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%					
1	2	3	4	5	6	7	FISIK	KEUANGAN	10	11	12	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	orang	3871	8,312,813,555	3871	8,312,813,555	100%	100%	APBD MURNI	Dikarenakan kondisi penerima layanan di kabupaten sidoarjo tidak memerlukan seluruh mutu layanan yang diwajibkan dalam SPM, sehingga tidak semua memilili target dan realisasi. adapun tidak tedapat pilihan untuk menutup mutu, sehingga kami buat menjadi 1/1	diberikan akses buka tutup mutu menyesuaikan kondisi daerah	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	orang	1485		1485							
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	orang	65068		65068							
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	orang	80		80							
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	3424		3424							

b. FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR LUAR PANTI
PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	orang	3871	8,312,813,555	3871	8,312,813,555	100%	100%	APBD MURNI	Dikarenakan kondisi penerima layanan di kabupaten sidoarjo tidak memerlukan seluruh mutu	diberikan akses buka tutup mutu menyesuaikan kondisi daerah
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	orang	1485		1485					layanan yang diwajibkan dalam SPM, sehingga	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	orang	65068		65068					tidak semua memiliti target dan realisasi.	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	orang	80		80					adapun tidak tedapat pilihan untuk menutup mutu, sehingga kami buat menjadi 1/1	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	3424		3424						

C. FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN LANSIA UAR PANTI

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	orang	3871	8,312,813,555	3871	8,312,813,555	100%	100%	APBD MURNI	Dikarenakan kondisi penerima layanan di kabupaten sidoarjo tidak memerlukan seluruh mutu layanan yang diwajibkan dalam SPM, sehingga tidak semua memiliti target dan realisasi.	diberikan akses buka tutup mutu menyesuaikan kondisi daerah
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	orang	1485		1485					adapun tidak terdapat pilihan untuk menutup mutu, sehingga kami buat menjadi 1/1	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	orang	65068		65068						
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	orang	80		80						
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	3424		3424						

D. FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR,

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	orang	3871	8,312,813,555	3871	8,312,813,555	100%	100%	APBD MURNI	Dikarenakan kondisi penerima layanan di kabupaten sidoarjo tidak memerlukan seluruh mutu layanan yang diwajibkan dalam SPM, sehingga tidak semua memiliti target dan realisasi.	diberikan akses buka tutup mutu menyesuaikan kondisi daerah
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	orang	1485		1485					adapun tidak terdapat pilihan untuk menutup mutu, sehingga kami buat menjadi 1/1	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	orang	65068		65068						
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	orang	80		80						
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	3424		3424						

BAB 3 **PENCAPAIAN SPM TAHUN 2025**

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak UsiaDini

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)		
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2025
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2025

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain:

No	MATA ANGGARAN			BESARAN ANGGARAN
				655,399,077,247
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,609,989,000
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30,677,150,185
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	873,596,825
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	1,133,000,000
		5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	13,746,240
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	59,936,848,373

		7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,672,215,200
		8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8,139,357,700
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	248,295,700
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	572,793,037
		11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89,133,447
		12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	31,058,649
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,854,686,856
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	83,200,000
		15	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3,827,996,500
		16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,038,160,800
		17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5,584,815,400
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	375,008,766
		19	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	163,314,050
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	247,749,050
		21	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	431,043,950
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			536,795,917,519
	1.	4 2025 Pengeloan dana BOP PAUD 1202333		40,070,185,000.00
	2.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD 1202344		21,262,500.00
	3.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202354		2,275,184,589.00
	4.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa sekolah dasar 1202360		375,652,393.00

5.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202371	214,741,538,000.00
6.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202373	119,072,298.00
7.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202380	42,409,893,699.00
8.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa sekolah menengah pertama 1202386	225,085,193.00
9.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202392	180,811,708,600.00
10.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202398	31,452,900.00
11.	4 2025 Sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan sekolah menengah pertama 1202403	51,391,350.00
12.	4 2025 Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan 1202408	4,232,820,000.00
13.	4 2025 Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan 1202410	41,861,207,700.00
14.	4 2025 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan 1202414	139,539,050.00
15.	4 2025 Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan 1202419	5,143,597,500.00
16.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP nonformal/kesetaraan 1202422	852,394,413.00
17.	4 2025 Koordinasi, perencanaanm supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 1202432	3,133,523,684.00
18.	4 2025 Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik nonformal/kesetaraan 1202436	54,408,650.00
19.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas pendidikan nonformal 1202440	246,000,000.00

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain:

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH KELAS	JUMLAH MURID	TENAGA PENGAJAR
1	Sekolah Dasar Negeri	464	4.131	110.829	6.033

2	Sekolah Dasar Swsata dan Sederajat	122	1.521	34.113	2.047
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri	47	1.264	42.273	1.988
4	Sekolah Menengah Pertama Swasta	143	2.676	34.241	4.132
5	Sekolah PAUD Negeri	2	15	276	19
6	Sekolah PAUD Swasta	1.625	5.669	64.347	5.034

5. Hasil Capaian

Hasil Caiapan adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	204423	204423	100 %	Jumlah Warga Kabupaten/NegaraUsia 7-15 Tahunyangberpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) _____ JumlahWarga Kabupaten Usia 7-15Tahun
2	Pendidikan Kesenjangan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5369	5369	100 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					<u>Pendidikan kesetaraan</u> Jumlah Warga Kabupaten Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) JumlahWarga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83819	83819	100 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi <u>dalam pendidikan PAUD</u> Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6Tahun

5.2 Realisasi Anggaran

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase
-1	-2	-3	-4	-9	-10	-11
				655,399,077,247	612,687,269,637	93.48 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,609,989,000	1,555,901,097	96.64 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30,677,150,185	27,142,606,757	88.48 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	873,596,825	686,962,858	78.64 %
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	1,133,000,000	528,900,000	46.68 %
		5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	13,746,240	12,777,600	92.95 %
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	59,936,848,373	41,705,720,135	69.58 %
		7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,672,215,200	1,274,153,604	76.20 %

		8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8,139,357,700	8,115,305,000	99.70 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	248,295,700	228,687,500	92.10 %
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	572,793,037	537,226,795	93.79 %
		11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	89,133,447	78,620,000	88.20 %
		12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	31,058,649	30,997,500	99.80 %
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,854,686,856	1,787,504,390	96.38 %
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	83,200,000	71,875,000	86.39 %
		15	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3,827,996,500	3,612,793,590	94.38 %
		16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,038,160,800	766,706,295	73.85 %
		17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5,584,815,400	5,551,212,600	99.40 %
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	375,008,766	370,793,375	98.88 %
		19	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	163,314,050	158,600,000	97.11 %
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	247,749,050	239,003,178	96.47 %
		21	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	431,043,950	290,724,100	67.45 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			536,795,917,519	517,940,198,263	96%
	1.	4 2025 Pengeloan dana BOP PAUD 1202333		40,070,185,000.00	39,858,996,759.00	99.47 %
	2.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD 1202344		21,262,500.00	14,962,500.00	70.37 %

3.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202354	2,275,184,589.00	1,195,315,961.00	52.54 %
4.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa sekolah dasar 1202360	375,652,393.00	354,058,500.00	94.25 %
5.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202371	214,741,538,000.00	214,740,038,000.00	100.00 %
6.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202373	119,072,298.00	118,482,500.00	99.50 %
7.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202380	42,409,893,699.00	37,065,876,489.00	87.40 %
8.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa sekolah menengah pertama 1202386	225,085,193.00	185,054,500.00	82.22 %
9.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202392	180,811,708,600.00	180,547,078,600.00	99.85 %
10.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202398	31,452,900.00	30,767,500.00	97.82 %
11.	4 2025 Sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan sekolah menengah pertama 1202403	51,391,350.00	21,757,000.00	42.34 %
12.	4 2025 Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan 1202408	4,232,820,000.00	4,232,760,000.00	100.00 %
13.	4 2025 Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan 1202410	41,861,207,700.00	30,568,555,000.00	73.02 %
14.	4 2025 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan 1202414	139,539,050.00	97,407,250.00	69.81 %
15.	4 2025 Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan 1202419	5,143,597,500.00	4,940,101,471.00	96.04 %
16.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP nonformal/kesetaraan 1202422	852,394,413.00	793,562,083.00	93.10 %
17.	4 2025 Koordinasi, perencanaanm supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 1202432	3,133,523,684.00	2,886,551,650.00	92.12 %
18.	4 2025 Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik nonformal/kesetaraan 1202436	54,408,650.00	54,122,500.00	99.47 %
19.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas pendidikan nonformal 1202440	246,000,000.00	234,750,000.00	95.43 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pendidikan antara lain :

1. Meskipun Kabupaten Sidoarjo memiliki akses pendidikan yang cukup baik secara umum, terdapat beberapa wilayah yang masih mengalami ketimpangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sekolah negeri di beberapa kecamatan, sehingga anak-anak harus menempuh jarak jauh untuk mengakses pendidikan. Warga setempat berharap agar setiap kecamatan memiliki sekolah negeri, baik SMP maupun SMA, untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut.
2. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan signifikan dalam kompetensi literasi dan numerasi siswa. Meskipun telah diterapkan kurikulum darurat dan Merdeka, proses pemulihan masih berlangsung dan memerlukan perhatian lebih untuk menghindari "lost generation"
3. Sebagian besar sekolah negeri di Sidoarjo mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah atau dipimpin oleh pejabat sementara (PLT) dalam waktu lama. Hal ini mengganggu manajemen sekolah dan berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diberikan.
4. Program Pendidikan Paket C di Sidoarjo, yang ditujukan untuk warga yang tidak memiliki ijazah setara SMA, menghadapi kendala serius. Keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang minim, dan kurangnya gedung

permanen menghambat pelaksanaan program ini secara optimal.

5. Masih adanya perbedaan persepsi antara pemangku SPM di daerah dengan Tim SPM pusat dalam penentuan target dan menghitung realisasi.
6. Para Pihak dalam hal ini BPS, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat memfasilitasi pemberian informasi terkait penghitungan SPM Pendidikan.
7. Permasalahan akses pendidikan di kabupaten Sidoarjo menjadi tantangan, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil, pesisir, dan perkampungan tambak terutama di musim hujan ketika jalur darat rusak dan siswa harus menggunakan perahu untuk berangkat ke sekolah. Keterbatasan akses internet cukup menghambat pembelajaran yang berbasis digital.
8. Permasalahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo mencerminkan tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar. Ketimpangan fasilitas dan akses pendidikan dalam distribusi fasilitas pendidikan, terutama antara sekolah berada di kawasan padat penduduk dan yang terletak di daerah terpencil. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan jumlah pendaftar antara sekolah di pusat kota mengalami kelebihan kapasitas, sementara sekolah pinggiran kekurangan murid. Kondisi ini menunjukkan perlunya penambahan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah (SMP) di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

B. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang SPM Bidang Kesehatan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	2025
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	2025

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Kesehatan Antara lain:

No	MATA ANGGARAN		BESARAN ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		10,612,840,658
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237	10,612,840,658
			<u>3,932,782,500</u>
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	
			<u>30,525,000</u>
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	
			<u>211,422,500</u>
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	
			<u>28,782,005</u>
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	
			<u>28,782,005</u>

		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	889,535,252
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	20,528,500
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	16,855,000
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	4,533,191
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	14,750,000
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	407,845,750
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,863,931,260
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	191,349,700

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan antara lain:

	FASILITAS KESEHATAN	
	RS DI KABUPATEN SIDOARJO	PUSKESMAN
Jumlah Fasilitas	33 Rumah Sakit	31 Puskesmas
Dokter Umum	1224	143
Dokter Gigi	450	61
Dokter Spesialis	734	-
Perawat	3.202	509
Bidan	586	505
Apoteker dan Tenaga Kefarmasian	478	79

Tenaga umum/admin	2.421	541
-------------------	-------	-----

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	30947	31134	100%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta <hr/> Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	30947	31025	100%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan <hr/> Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	29176	30885	100%	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar <hr/> Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
							kurun waktu satu tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	117736	118526	100%	Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. <hr/> Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	282660	295997	100%	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar <hr/> Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	1391348	1466120	100%	Jumlah pengunjung usia 15 tahun keatas mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun <hr/> Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	266597	270541	100%	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun <hr/> Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	156726	167120	100%	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun <hr/> Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	69784	71429	100% %	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun <hr/> Jumlah penyandang DM berdasarkan angka revalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	4169	5325	100%	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun <hr/> Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	28250	39862	100%	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun <hr/> Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	34098	37744	100%	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
							fasyankes dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	10,612,840,658	9,156,107,603	86.27 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10,612,840,658	9,156,107,603	86.27 %
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237	10,612,840,658	9,156,107,603	86.27 %
	1 Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	3,932,782,500	3,899,755,108	99.16 %
	2 Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	30,525,000	28,619,970	93.76 %
	3 Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	211,422,500	207,317,770	98.06 %
	4 Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	28,782,005	26,197,680	91.02 %
	5 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	889,535,252	879,303,920	98.85 %
	6 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	20,528,500	19,347,470	94.25 %
	7 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	16,855,000	16,094,970	95.49 %
	8 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	4,533,191	4,348,460	95.92 %
	9 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	14,750,000	14,719,970	99.80 %
	10 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	407,845,750	405,451,720	99.41 %
	11 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,863,931,260	3,475,005,397	71.44 %

	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	191,349,700	179,945,168	94.04 %
JUMLAH INDIKATOR			10,612,840,658	9,156,107,603	86.27 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Kesehatan antara lain :

1. Rasio tenaga medis belum ideal sesuai standar pelayanan minimal.RSUD Sidoarjo Barat misalnya, mengalami kekurangan tenaga medis setelah lonjakan pasien pasca-pemutusan kerjasama dengan RS swasta.
2. Penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas, semakin meningkat di Sidoarjo. Puskesmas Kota Sidoarjo berperan penting dalam memberikan layanan pemeriksaan, pengobatan, dan edukasi kesehatan untuk penyakit-penyakit tersebut. Namun, tantangan seperti kurangnya pemantauan oleh keluarga dan rendahnya kepatuhan pasien dalam pengobatan masih menjadi hambatan dalam pengendalian penyakit tidak menular.
3. Meskipun Pemkab Sidoarjo telah meresmikan Puskesmas Urangagung 2 untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan, masih terdapat wilayah yang kekurangan fasilitas kesehatan. Beberapa puskesmas belum menerapkan konsep Integrated Health Post (ILP), yang mencakup pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat

secara menyeluruh. Hal ini menghambat upaya preventif dan promotif dalam pelayanan kesehatan.

4. erdapat kekurangan sekitar 33 tenaga dokter dan tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas. Hal ini disebabkan oleh rasio kapitasi BPJS yang mengharuskan setiap 5.000 peserta memiliki satu dokter. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dapat mengajukan penambahan tenaga medis melalui jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), PTT (Pegawai Tidak Tetap), atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
5. Tingginya angka layanan kesehatan yang dilakukan diluar kabupaten menyebabkan adanya gap dalam realisasi di kabupaten sidoarjo.
6. Banyak bantuan berupa hibah dari Provinsi maupun dari Pusat yang berupa Barang, bukan bentuk anggaran, sehingga terlihat anggaran tidak mumpuni untuk melayani seluruh warga, padahal berbagai kebutuhan layanan seperti obat, vaksin dan alat alat kesehatan lainnya di berikan berupa hibah barang secara langsung.
7. Menggunakan data proyeksi kemenkes sebagai data target penerima layanan SPM Bidang Kesehatan karena pemerintah daerah belum bisa menentukan target secara mandiri

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	2025
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2025

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:

No	MATA ANGGARAN		BESARAN ANGGARAN
	KAB. SIDOARJO		52,096,433,280
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		20,175,880,780
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638	20,175,880,780
		1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	100,000,000
		2 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	122,838,700
		3 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100,000,000
		4 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3,506,215,991
		5 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17,5
		6 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	16,346,808,589
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		12,197,233,215
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559	12,197,233,215
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	838,673,994
		2 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	11,358,541,721
		3 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	17,5
		4 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0

3			
	1.	Perluasan Jaringan Pipa Distribusi	17,535,000,000
	2.	Biaya Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan BJP PDAM	779,653,665
	3.	Operasional BBM Kendaraan Tangki BJP PDAM	358,665,620
	4.	Pembangunan Sanitasi oleh Kelompok SANIMAS	1,050,000,000

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil	KET
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	6 PNS 4 PPPK PENUH WAKTU 2 PPPK PARUH WAKTU 2 Konsultan Individu	P2CKTR
		656 NON PNS	PDAM
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	6 PNS 4 PPPK PENUH WAKTU 2 PPPK PARUH WAKTU 2 Konsultan Individu	P2CKTR

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	PDAM Sidoarjo dan P2CKTR	24244	41288	100 %	Jumlah Rumah Warga yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Seluruh Rumah warga kabupaten
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Dinas Pekerjaan Umum, Bina marga, dan Sumber Daya Air	21240	21563	100 %	Jumlah Rumah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah <u>domestic</u> Seluruh Rumah warga kabupaten

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	52,096,433,280	42,129,708,816	80.87 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20,175,880,780	15,864,177,334	78.63 %
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638	20,175,880,780	15,864,177,334	78.63 %
	1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	100,000,000	0	0%
	2 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	122,838,700	0	0%
	3 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100,000,000	0	0%
	4 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaian	3,506,215,991	2,992,509,918	85.35 %

	5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17,5	0	0%
	6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	16,346,808,589	12,871,667,416	78.74 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		12,197,233,215	7,647,512,962	62.70 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559	12,197,233,215	7,647,512,962	62.70 %
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	838,673,994	207,335,998	24.72 %
	2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	11,358,541,721	7,440,176,964	65.50 %
	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	17,5	0	0%
	4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	0	0%
KEGIATAN LAINNYA					
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA				
	1.	Perluasan Jaringan Pipa Distribusi	17,535,000,000	16,904,276,750	96.40 %
	2.	Biaya Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan BJP PDAM	779,653,665	305,076,150	39.13 %
	3.	Operasional BBM Kendaraan Tangki BJP PDAM	358,665,620	358,665,620	100.00 %
	4.	Pembangunan Sanitasi oleh Kelompok SANIMAS	1,050,000,000	1,050,000,000	100.00 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah - langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain :

1. Pembinaan KPSPAM tidak dapat dilaksanakan karena terdapat efisiensi anggaran dan mempengaruhi pengurangan jumlah peserta

2. Dalam Pemberian Air Bersih di Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan beberapa daerah di sekitarnya dalam mensukseskan jaringan Umbulan, sehingga PDAM saat ini banyak menyumbang angka jaringan perpipaan di Sidoarjo, sedangkan dari P2CKTR programnya menjangkau warga terpencil perdesaan dan beberapa di perkotaan

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2025
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:

No	MATA ANGGARAN		ANGGARAN
	KAB. SIDOARJO		2,779,081,900
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		4,860,000
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340	3,255,000
	1	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	1,605,000
	2	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1,650,000
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348	1,605,000
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1,605,000
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA		
	1.	BTT Hidrometeorologi Kecamatan Tanggulangin	1,201,546,900
	2.	RKB BTT Perubahan (Ponpes Al Khoziny)	1,572,675,000

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil	KET
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	6 PNS 2 PPPK PENUH WAKTU 3 PPPK PARUH WAKTU 9 THL 1 Konsultan Individu	DP2CKTR
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	6 PNS 2 PPPK PENUH WAKTU 3 PPPK PARUH WAKTU 9 THL 1 Konsultan Individu	CP2CKTR

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DP2CKTR	163	163	100%	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni — Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang rumahnya tidak layak huni karena bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas	DP2CKTR	0	0	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni — Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
		ilitasipenyediaa rumah yang layakhuni					atprogramPemerintahDa erahkabupaten

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	2,779,081,900	2,774,221,900	99.83 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4,860,000	0	0.00 %
	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340	3,255,000	0	0.00 %
	1 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	1,605,000	0	0%
	2 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1,650,000	0	0%
	2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348	1,605,000	0	0.00 %
	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1,605,000	0	0%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			
	1. BTT Hidrometeorologi Kecamatan Tanggulangin	1,201,546,900	1,201,546,900	100.00 %
	2. RKB BTT Perubahan (Ponpes Al Khoziny)	1,572,675,000	1,572,675,000	100.00 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal.

2. Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. (tidak ada atau tidak diinformasikan ke DP2CKTR Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) di setiap proyek Relokasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pengalokasian anggarannya).
3. Tidak terjadi bencana yang sampai mengakibatkan diterbitkan SK Bencana, namun tetap memerlukan rehabilitasi rumah warga seperti terdadi genangan dan angin puting beliung skala kecil dimana anggaran rehabilitasinya diambil dari BTT

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

1. Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD;
2. Memasukan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 69 Tahun 2012 Tentangperubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standarpelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertibanUmum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	2025
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2025
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2025
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2025
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	2025

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara lain:

No	MATA ANGGARAN	TARGET
	KAB. SIDOARJO	21,959,287,117
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	12,199,401,198
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2025444	10,691,333,139
	1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	1,380,778,800
	2 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	7,438,658,450
	3 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	585,631,089
	4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	125,620,560
	5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	417,394,240
	6 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	743,250,000
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2025455	1,388,768,859
	1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500,000,000
	2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,000,000
	3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	788,768,859
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2025457	119,299,200
	1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	119,299,200
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1,989,217,012

4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2025456		643,246,470
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	75,000,000
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	568,246,470
5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2025447		342,998,867
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	80,000,000
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	81,348,867
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	165,000,000
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16,650,000
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2025445		270,000,000
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	270,000,000
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2025446		732,971,675
	1	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	732,971,675
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		7,770,668,907
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2025449	7,516,679,256
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	520,000,000
	2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	57,500,000
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	446,917,546
	4	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	6,492,261,710
9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2025459		253,989,651
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	177,102,832
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	76,886,819

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Personil
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	78 PNS 32 PPPK PENUH WAKTU 214 PPPK PARUH WAKTU 8 NON ASN
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	43 PNS, 29 PPPK 175 TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang	Satuan Polisi Pamong Praja	50039	50039	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
		memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara					hukum Perda dan <u>perkara</u> Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena penegakan hukum Perda dan perkara
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan formasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1500	5385	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi <u>rawan bencana</u> Jumlah Warga Kabupaten di wilayah rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	330	659	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap <u>bencana</u> Jumlah Warga Kabupaten di wilayah rawan bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2046	2046	100%	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang) Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang)
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	235	237	100%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
		layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran					dampak kebakaran Jumlah kejadiankebakaran dengan menggunakan skala kabupaten/kota yang seharusnya diselamatkan dan dievakuasi menggunakan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamat lengkap (Orang)

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	29,852,959,258	27,249,187,915	91.28 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	13,787,867,214	12,328,170,609	89.41 %
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444	10,685,917,889	9,785,164,072	91.57 %
1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1,064,181,968	921,174,790	86.56 %
2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	63,860,000	42,450,000	66.47 %
3	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	110,000,000	107,068,895	97.34 %
4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1,514,945,200	1,416,360,488	93.49 %

	5	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	<u>7,932,930,721</u>	<u>7,298,109,899</u>	92.00 %
JUMLAH INDIKATOR			10,685,917,889	9,785,164,072	91.57 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455	2,993,103,325	2,443,170,761	81.63 %
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<u>888,810,000</u>	<u>770,014,000</u>	86.63 %
	2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	<u>2,104,293,325</u>	<u>1,673,156,761</u>	79.51 %
JUMLAH INDIKATOR			2,993,103,325	2,443,170,761	81.63 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457	108,846,000	99,835,776	91.72 %
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	<u>108,846,000</u>	<u>99,835,776</u>	91.72 %
JUMLAH INDIKATOR			108,846,000	99,835,776	91.72 %
JUMLAH PROGRAM			13,787,867,214	12,328,170,609	89.41 %
	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	2,819,022,705	2,092,738,868	74.24 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456	558,372,750	423,523,110	75.85 %
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	<u>105,155,500</u>	<u>87,787,010</u>	83.48 %
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	<u>453,217,250</u>	<u>335,736,100</u>	74.08 %
JUMLAH INDIKATOR			558,372,750	423,523,110	75.85 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443	1,240,773,775	1,001,810,362	80.74 %

	1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	<u>336,413,375</u>	<u>280,900,700</u>	83.50 %
	2	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	<u>258,008,000</u>	<u>172,805,330</u>	66.98 %
	3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<u>139,449,400</u>	<u>136,530,000</u>	97.91 %
	4	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	<u>226,605,000</u>	<u>168,086,200</u>	74.18 %
	5	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	<u>100,298,000</u>	<u>68,345,800</u>	68.14 %
	6	Penyusunan rencana kontijensi	<u>180,000,000</u>	<u>175,142,332</u>	97.30 %
	JUMLAH INDIKATOR		1,240,773,775	1,001,810,362	80.74 %
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445		434,593,000	414,105,800	95.29 %
	1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	<u>123,593,000</u>	<u>104,305,800</u>	84.39 %
	2	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	<u>311,000,000</u>	<u>309,800,000</u>	99.61 %
	JUMLAH INDIKATOR		434,593,000	414,105,800	95.29 %
7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446		585,283,180	253,299,596	43.28 %
	1	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	<u>71,583,180</u>	<u>53,814,536</u>	75.18 %
	2	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	<u>513,700,000</u>	<u>199,485,060</u>	38.83 %
	JUMLAH INDIKATOR		585,283,180	253,299,596	43.28 %
	JUMLAH PROGRAM		2,819,022,705	2,092,738,868	74.24 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		13,246,069,339	12,828,278,438	96.85 %

	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449	13,059,269,339	12,644,478,438	96.82 %
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	625,125,420	618,933,500	99.01 %
	2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	174,480,019	164,277,550	94.15 %
	3	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	5,588,536,400	5,542,223,336	99.17 %
	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6,671,127,500	6,319,044,052	94.72 %
	JUMLAH INDIKATOR		13,059,269,339	12,644,478,438	96.82 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459	186,800,000	183,800,000	98.39 %
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	186,800,000	183,800,000	98.39 %
	JUMLAH INDIKATOR		186,800,000	183,800,000	98.39 %
	JUMLAH PROGRAM		13,246,069,339	12,828,278,438	96.85 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

- a. Penegakan perda dan perkada

Banyak peraturan perda perkara yang belum ditegakkan dengan baik sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan mulai penyuluhan, pembinaan maupun penegakan hukum. Kasus dominan terkait dengan penegakan perda adalah pelanggaran izin

- b. KRB Belum detail mendeskripsikan kejadian rawan bencana tiap desa atau kelurahan, sehingga belum bisa dihitung secara detail kebutuhan barang dan biaya untuk pengantasan bencana baik di pra bencana maupun pasca bencana.
- c. Pola Layanan dan kesiapsiagaan bencana selama ini belum maksimal karena selalu mengandalkan tatap muka yang diundang oleh BPBD Kabupaten.
- d. Untuk mencapai target SPM 15 menit, Kabupaten Sidoarjo harus memiliki 36 Pos Damkar, sedangkan kondisi eksisting hanya memiliki 5 Pos Damkar, sehingga rasio antara sumber daya dengan target kinerja sangat jauh. Selain itu belum terbentuknya relawan kebakaran dan Satuan Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di desa/kelurahan juga menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya target respon time. Penanganan kebakaran di Kabupaten Sidoarjo sementara masih mengandalkan aparatur dan sarana prasarana dr BPBD, sementara itu dengan jumlah kejadian kebakaran yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 menyebabkan rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran menurun.

Adapun solusi yang kami upayakan antara lain :

- a. Dokumen Teknis dari KRB agar disahkan dalam PERBUP atau SK Bupati, agar mudah di Reviu tiap tahun (KRB Per Desa/Kelurahan)
- b. Reviu Bencana tiap tahun hendaknya melibatkan dari pihak Desa dan Kecamatan dengan Hasil Reviu berbasis peta citra.

- c. Dokumen Teknis KRB (KRB perdesa kelurahan) harus detail menyajikan area yang rawan bencana per Desa/Kelurahan sehingga bisa dihitung perencanaan kebutuhan barang dan biaya penanganan Bencana (Pra dan Pasca) lebih detail.
- d. Posting/alokasi anggaran dan barang diserahkan kepada OPD masing2 yang menangani dibawah koordinasi BPBD seperti Dinsos, Dinkes, DP2CKTR.
- e. Membuat Group WA berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan, WA group Desa dan WA Group RT.
- f. BPBD Menyiapkan materi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seperti mitigasi bencana dan bagaimana penangann bencana (Pra dan Pasca) Berupa video animasi dan paparan.
- g. Mengadakan pelatihan perwakilan dari satgas bencana tiap desa/kelurahan yang dibagi perkecamatan.

F. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh	100%	2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		Rehabilitasi social diluar panti		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2025
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2025
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100%	2025
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat& pasca	100%	2025

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahn daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:

No	MATA ANGGARAN		ANGGARAN
	KAB. SIDOARJO		8,312,813,555
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8,312,813,555
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2025152	8,256,813,555
		1	Penyediaan permakanan
			7,048,825,600
		2	Penyediaan sandang
			14,459,322
		3	Penyediaan alat bantu
			100,815,000
		4	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
			191,075,000
		5	Pemberian layanan data dan pengaduan
			121,595,538
		6	Pemberian layanan kedaruratan
			780,043,095
	JUMLAH INDIKATOR		8,256,813,555
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2025153	56,000,000
		1	Penyediaan makanan
			48,000,000
		2	Penanganan khusus bagi kelompok rentan
			8,000,000

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Dukungan Personil
1	Rehabilitasisocialdasarpenyandang Disabilitastelantar diluarPanti	17 PNS 5 PPPK PENUH WAKTU
2	Rehabilitasisocialdasar anak telantar diluar Panti	48 PPPK PARUH WAKTU 121 SRLT

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Dukungan Personil
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanjar diluar Panti	15 TKSK 39 TAGANA
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	114 PKH 8 PENDAMPING REHSOS 11 TENAGA OUTSOURCHING
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	
6.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlanjar diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosia	3805	7533	100%	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti Jumlah keseluruhan warga kabupaten penyandang disabilitas diluar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlanjar diluar Panti	Persentase (%) anak terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosia	1681	1681	100%	Jumlah anak terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah keseluruhan anak terlanjar diluar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Persentase (%) Warga Kabupaten lanjut	Dinas Sosial	75804	75804	100%	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia yang memperoleh

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2025			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
	terlantar diluar Panti	usiaterlantar yangmemperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti					Rehabilitasi sosial diluar panti JumlahWarga Kabupaten lanjut usiaterlantar diluar panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten yang gelandangan danpengemisy angmemperole hrehabilitasiso cialdasartuna sosial diluar panti	Dinas Sosial	80	80	100 %	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis diluar panti
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Presentase (%) korban bencana skalakabupate n yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat& pasca	Dinas Sosial	12155	12155	100 %	Jumlah korban bencana yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO	12,849,988,235	12,039,252,007	93.69 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11,055,218,235	10,256,462,807	92.77 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	10,705,218,235	10,066,999,107	94.04 %

		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152				
	1	Penyediaan permakanan	8,307,158,622	7,982,754,756		0%
	2	Penyediaan sandang	94,778,460	84,004,800		0%
	3	Penyediaan alat bantu	661,698,640	574,469,100		0%
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	554,441,995	547,906,400		0%
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	124,963,640	51,170,850		0%
	10	Pemberian layanan kedaruratan	962,176,878	826,693,201		0%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153	350,000,000	189,463,700		54.13 %
	1	Penyediaan makanan	350,000,000	189,463,700		54.13 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota - Belanja Natura dan Pakan dari BTT	1,794,770,000	1,782,789,200		99.33 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain :

1. Terdapat indikator yang seharusnya dilengkapi dengan pilihan buka tutup seperti misalnya pemberian sandang, dll, dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda beda khususnya terhadap bencana dimana untuk kabupaten sidoarjo selama ini tidak terdapat bencana yang mengharuskan masyarakat sampai mengungsi dan memerlukan bantuan sandang. sehingga walaupun ditentukan target serta anggarannya maka hal tersebut

tidak akan terserap yang berpotensi silpa. bukan berarti tidak berkinerja, melainkan melakukan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

2. Meskipun telah disepakati Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, implementasinya masih menghadapi hambatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dasar masyarakat, serta belum adanya insentif dan disinsentif yang jelas bagi daerah atau pihak yang berhasil atau gagal dalam melaksanakan kebijakan SPM
3. Meskipun telah dilakukan berbagai pelatihan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), namun kapasitas SDM di tingkat desa dan kecamatan masih terbatas. Hal ini berdampak pada kemampuan dalam melakukan verifikasi dan validasi data, serta dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat miskin dan rentan miskin
4. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memiliki pedoman teknis yang jelas mengenai pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program, termasuk dalam hal mekanisme pencairan, distribusi bantuan, dan pengawasan terhadap toko/agen yang bekerja sama. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana bantuan dibagi kepada beberapa keluarga dalam satu nomor Kartu Keluarga tanpa dasar hukum yang jelas
5. Proses pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seringkali dilakukan berdasarkan usulan dari kepala desa tanpa verifikasi dan validasi yang memadai. Akibatnya, terdapat penerima ganda yang menerima bantuan dari berbagai program sosial seperti BPNT, PKH, BST, dan PBI.

Misalnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa 630 KPM menerima bantuan ganda, dan meskipun sebagian telah diperbaiki, masih terdapat data yang tidak valid dan tidak didukung oleh dokumen resmi dari pemerintah desa

6. Sidoarjo telah memperoleh UHC sehingga seluruh penerima layanan dari siap tiap indikator telah menerima layanan kesehatan, itulah yang menjadikan capaian Kabupaten Sidoarjo sudah tinggi di TW 1
7. Adanya perubahan data dari dispendukcapil untuk pemenuhan target penerima layanan tanpa pemberitahuna ke Dinas Sosial sehingga ada beberapa penerima yang tidka tersalur.

BAB

4

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENERAPAN SPM 2025

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

Program SKPD

Program SKPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program SKPD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

Program Lintas SKPD

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapanprogram. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas SKPD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang urusan SKPD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber

pembiayaan. Contohnya seperti program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Dimana program lintas SKPD ini membutuhkan koordinasi dari beberapa Dinas terkait seperti Disporabudpar dan Dinsosnaker Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu Dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas SKPD. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas SKPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program SKPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Adapun program kegiatan per bidang Urusan yang dilakukan antara lain :

A. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
-1	-2	-3	-4
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan
		5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
		11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

		12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		15	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		19	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		21	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA		
	1.	4 2025 Pengeloan dana BOP PAUD 1202333	
	2.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD 1202344	
	3.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202354	
	4.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa sekolah dasar 1202360	
	5.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202371	
	6.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar 1202373	
	7.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dasar 1202380	
	8.	4 2025 Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa sekolah menengah pertama 1202386	
	9.	4 2025 Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202392	
	10.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama 1202398	

11.	4 2025 Sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan sekolah menengah pertama 1202403
12.	4 2025 Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan 1202408
13.	4 2025 Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan 1202410
14.	4 2025 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan 1202414
15.	4 2025 Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan 1202419
16.	4 2025 Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP nonformal/kesetaraan 1202422
17.	4 2025 Koordinasi, perencanaanm supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 1202432
18.	4 2025 Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik nonformal/kesetaraan 1202436
19.	4 2025 Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas pendidikan nonformal 1202440

B. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan

PROG RAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
KAB. SIDOARJO		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2024237	
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

C. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KAB. SIDOARJO	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM
	2	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	4	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
	3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	
	1.	Perluasan Jaringan Pipa Distribusi
	2.	Biaya Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan BJP PDAM
	3.	Operasional BBM Kendaraan Tangki BJP PDAM
	4.	Pembangunan Sanitasi oleh Kelompok SANIMAS

D. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KAB. SIDOARJO	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340
	1	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
	2	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	
	1.	BTT Hidrometeorologi Kecamatan Tanggulangin
	2.	RKB BTT Perubahan (Ponpes Al Khoziny)

E. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KAB. SIDOARJO	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2025444
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
	6	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2025455
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2025457
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2025456
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2025447
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2025445
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana

	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2025446
	1	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
3		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2025449
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
	2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	4	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
	9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2025459
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

F. Program Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KAB. SIDOARJO	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152
	1	Penyediaan permakanan
	2	Penyediaan sandang
	3	Penyediaan alat bantu
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan
	10	Pemberian layanan kedaruratan
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153
	1	Penyediaan makanan
2		
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota - Belanja Natura dan Pakan dari BTT

BAB 5 **PENUTUP**

Demikian Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kami sampaikan. Kegiatan Penyusunan Capaian SPM Tahun 2025.

Evaluasi penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait didalam SPM telah dijalankan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam penetapan pembangunan pemerintah daerah sehingga program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

..._...